



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

KOTA MADIUN TAHUN 2016

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengintegrasikan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran, diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 ;
- b. bahwa Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2016 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 18 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19610512 198803 1 010

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2016 NOMOR 18/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam satu periode perencanaan dalam konstelasi perundangan dimungkinkan untuk diakomodasikan dalam sebuah dokumen perubahan. Kerangka berpikir yang digunakan adalah perubahan tersebut diupayakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut dilaksanakan untuk harmonisasi terhadap target dan sasaran baik yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian. Demikian juga guna melakukan integrasi terhadap RKPD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD). Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Dalam pelaksanaannya RKPD tahun 2016 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Madiun tahun 2014–2019, yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD tersebut maka substansi penetapan prioritas memiliki nilai strategis dan penting dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMD. Sesuai dengan RKPD 2016 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik;
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2016 tersebut di atas dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip 6 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah antara lain :

- a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya.
- b. sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- c. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPD.
- d. adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 2015 yang harus digunakan untuk tahun 2016.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2016;

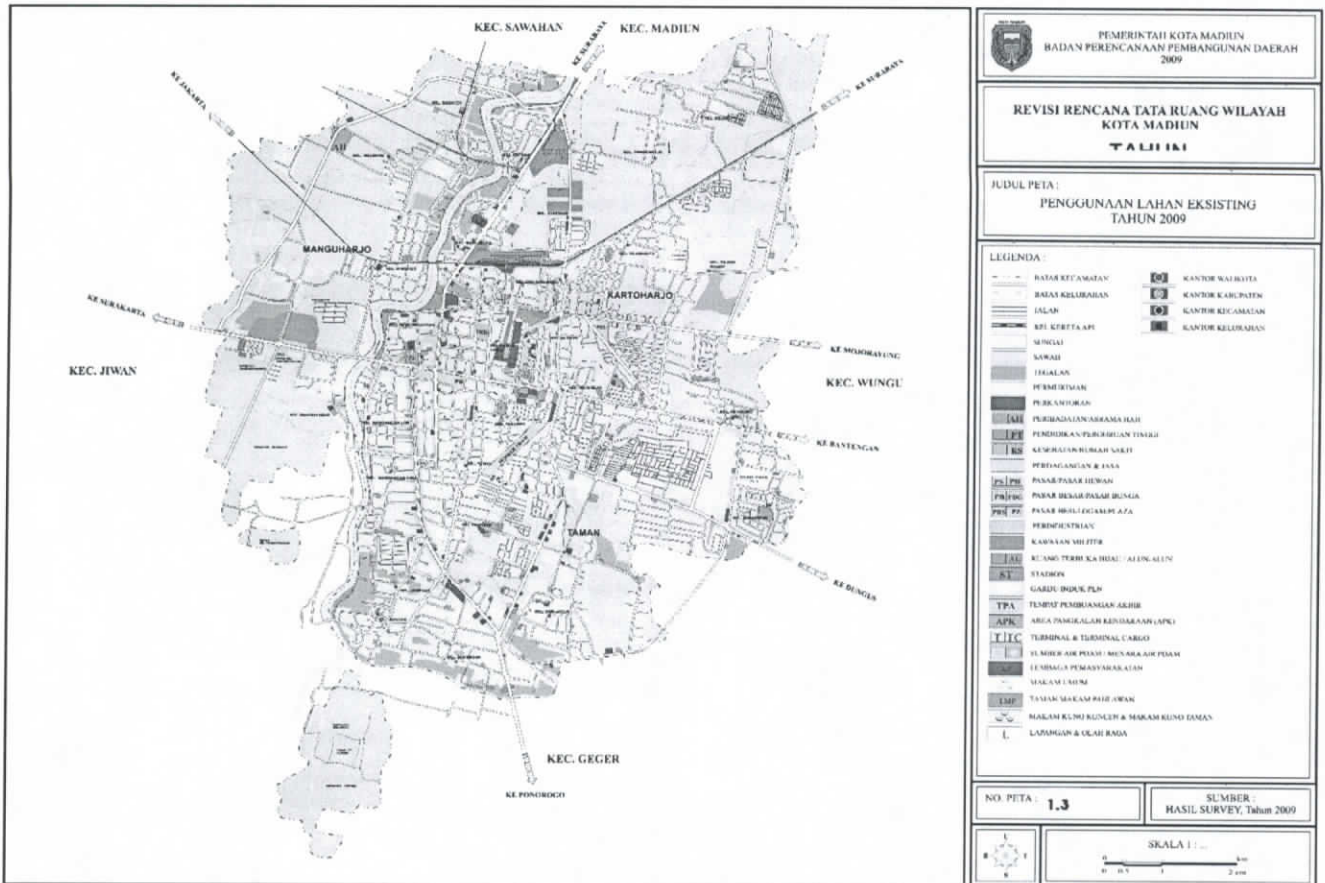
1.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS, berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 20°C hingga 35°C . Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. perbatasan sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,
2. perbatasan sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,
3. perbatasan Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun,
4. perbatasan Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Sumber: madiunkota.go.id

Gambar 1. 1.
Peta Administratif Kota Madiun

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan.

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 208.248 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.777 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.276 jiwa, dan Kecamatan Taman 88.195 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1.
Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2011 s/d 2015

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kartoharjo	55.332	55.970	57.090	58.125	57.777
2	Manguharjo	60.804	60.712	62.086	63.007	62.276
3	Taman	85.951	86.575	88.205	89.867	88.195
	Total	202.087	203.257	207.381	210.999	208.248

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

Selain itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 69.799 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 440 jiwa; D-III 5.507 jiwa; S-1 18.608 jiwa; S-2 1.205 jiwa, dan S-3 20 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011 s/d 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	30.321	29.751	30.586	31.218	30.989
Tidak Tamat SD;	12.503	15.062	16.883	18.383	18.575
Tamat SD;	34.825	33.571	33.704	33.767	32.950
Tamat SLTP;	29.605	29.660	29.932	30.247	30.155
Tamat SLTA;	69.317	69.515	70.414	71.142	69.799
Tamat D-I/II;	434	438	449	448	440
Tamat D-III;	5.359	5.447	5.544	5.624	5.507
Tamat S-1;	18.634	18.731	18.740	18.985	18.608
Tamat S-2;	1.070	1.067	1.112	1.169	1.205
Tamat S-3.	19	15	17	16	20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2015 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2011 s/d 2016

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
Belum/Tidak	42.231	39.935	39.525	39.214	38.404
PRT	34.069	34.131	34.560	35.064	34.603
Pelajar/Mahasiswa	34.810	37.768	40.077	43.158	43.581
Pensiunan	6.865	6.692	6.655	6.509	6.374
PNS	7.848	7.709	7.708	7.623	7.379
TNI	1.895	1.901	1.938	1.952	1.850
POLRI	1.040	1.040	1.062	1.060	1.048
Jasa	7.155	8.918	7.723	5.058	8.608
Karyawan	40.100	40.920	41.871	42.745	42.126
Buruh	4.692	4.900	5.054	5.115	5.082
Wiraswasta	20.693	18.753	20.039	18.687	18.727
Lain-lain	689	590	562	4.814	466

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2011 s/d 2015 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB (Rp)		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2011	6.813,4	6.494,4	6,79
2012	7.533,6	6.937,7	6,83
2013	8.390,4	7.470,7	7,68
2014	9.214,2	7.965,5	6,62
2015*)	10.191,7	8.442,4	6,05

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Tabel 1. 5.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70,2	76,1	82,0	86,5	92,2	97,9
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	2,0	2,0	2,2	2,3	2,5
3	Industri Pengolahan	1.068,1	1.156,5	1.252,0	1.369,7	1.490,9	1.636,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,1	5,4	5,4	5,6	6,7
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,5	16,5	18,0	19,8	21,1	22,6
6	Konstruksi	396,1	461,1	516,3	568,7	612,5	664,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.446,2	1.660,7	1.839,1	2.095,3	2.296,9	2.530,3
8	Transportasi dan Pergudangan	171,1	190,3	211,5	242,2	280,8	321,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,3	316,8	346,6	379,6	415,4	464,8
10	Informasi dan Komunikasi	880,5	967,1	1.060,7	1.165,2	1.264,9	1.393,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	507,6	590,3	708,4	827,9	942,4	1.056,6
12	Real Estate	152,7	176,0	193,4	217,1	237,3	274,0
13	Jasa Perusahaan	44,3	47,5	51,1	56,2	61,8	69,3

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,4	273,8	288,1	298,0	306,2	329,4
15	Jasa Pendidikan	458,1	511,6	576,3	643,8	725,3	803,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,2	80,6	90,9	101,1	114,2	131,1
17	Jasa Lainnya	259,3	281,3	291,9	311,5	344,4	387,2
PDRB		6.081,2	6.813,4	7.533,6	8.390,4	9.214,2	10.191,7

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Tabel 1. 6.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kota Madiun Tahun 2011 s/d 2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70,2	70,9	73,1	73,5	74,2	75,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
3	Industri Pengolahan	1.068,1	1.115,9	1.174,3	1.262,6	1.360,4	1.448,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,2	5,7	6,0	6,1	6,4
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,5	16,1	16,8	17,5	17,9	18,4
6	Konstruksi	396,1	431,5	459,9	495,3	520,0	539,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.446,2	1.544,3	1.665,4	1.797,1	1.895,3	1.981,7
8	Transportasi dan Pergudangan	171,1	184,4	195,6	209,6	227,4	242,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,3	308,4	328,8	354,3	380,1	407,8
10	Informasi dan Komunikasi	880,5	954,2	1.041,2	1.139,6	1.232,3	1.332,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	507,6	552,9	603,5	673,6	726,2	780,7
12	Real Estate	152,7	166,5	178,0	191,0	203,9	217,7
13	Jasa Perusahaan	44,3	46,1	48,6	52,3	56,7	61,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,4	262,5	266,1	268,8	270,9	281,4
15	Jasa Pendidikan	458,1	484,3	513,4	544,6	586,6	623,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,2	784,0	85,8	91,4	98,6	107,8
17	Jasa Lainnya	259,3	270,9	279,6	291,5	307,1	320,2
PDRB		6.081,2	6.494,4	6.937,7	7.470,7	7.965,5	8.447,4

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 1. 7.
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun
Tahun 2011 – 2015

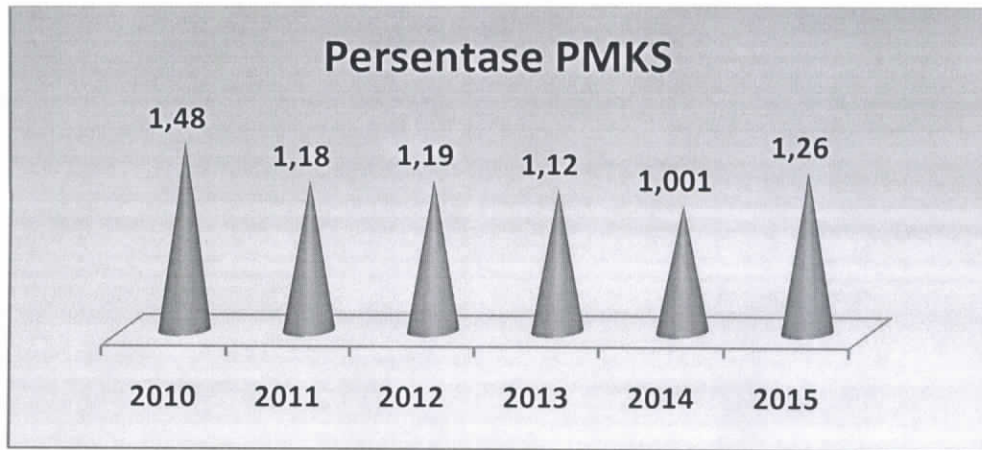
Kategori	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pra KS	673	503	374	497	332
KS-I	7.759	7.805	7.896	7.402	7.643
KS-II	14.996	15.643	13.519	17.168	17.759
KS-III	23.047	24.244	25.724	24.372	23.815
KS-III Plus	2.392	2.662	4.560	2.991	3.096

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2016

Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan tahun 2014 jumlahnya 7.899 keluarga, sedangkan tahun 2015 jumlahnya 7.975 keluarga penambahan 76 keluarga atau 0,96% karena adanya dampak kondisi perekonomian baik regional, nasional maupun internasional. Prosentase Keluarga Sejahtera II , III dan III Plus mengalami kenaikan 0,31% (139 KK) yaitu tahun 2014 jumlahnya 44.531 menjadi 44.670 pada tahun 2015, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 44.670 keluarga atau 84,85% dari jumlah KK 52.645.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2015

Gambar 1. 2.

**Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kota Madiun
Tahun 2010 – 2015**

Pada tahun 2015, jumlah PMKS di Kota Madiun mencapai 1,26% atau 2.630 orang dari total penduduk yakni 208.248 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,259% dibandingkan dengan PMKS di tahun 2014 yang berjumlah 2.113 orang. Dari jumlah PMKS yang ada pada tahun 2015, sejumlah 2.630 orang atau 100% telah mendapat penanganan dari pemerintah Kota Madiun. Penanganan PMKS di tahun 2015 meliputi pembinaan, pengiriman ke panti rehabilitasi sosial, dan pemulangan ke tempat asal/ keluarga jika PMKS berasal dari hasil sidak di jalanan. Selain itu, persentase PMKS terhadap jumlah penduduk setiap tahun memiliki tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat Kota Madiun yang mengalami masalah kesejahteraan sosial menurun semenjak tahun 2010 yang lalu sampai 2014 tapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, yaitu 6 prestasi di bidang seni dan budaya sedangkan pada tahun 2014 prestasinya 5. Beberapa keikutsertaan dalam event regional maupun nasional diantaranya :

1. Festival Pedalangan,
2. Festival Karya Tari,
3. Lomba Bina Kreatifitas SDLB dalam rangka HAN dan Pekan Seni Pelajar (Ada 8 jenis lomba Tingkat SD/MI, 6 jenis lomba tingkat SMP, dan 4 jenis lomba tingkat SMA).

Di sisi lain, dalam mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan even seni budaya dalam tahun 2015 sebanyak 11 even. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang juga hanya 11 even, diantaranya :

1. Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun,
2. Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW,
3. Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD dan SMP,
4. Pembinaan Seniman,
5. Pentas Seni Secara Periodik,
6. Lomba Keroncong dan Campursari Tingkat Kota,
7. Pentas Dalang Kecil, dan
8. Pagelaran Wayang Kulit.

Indikator ini menunjukkan jumlah even seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah secara tahunan. Semakin banyak even wisata, seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan seni budaya dan pariwisata di Kota Madiun, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya.

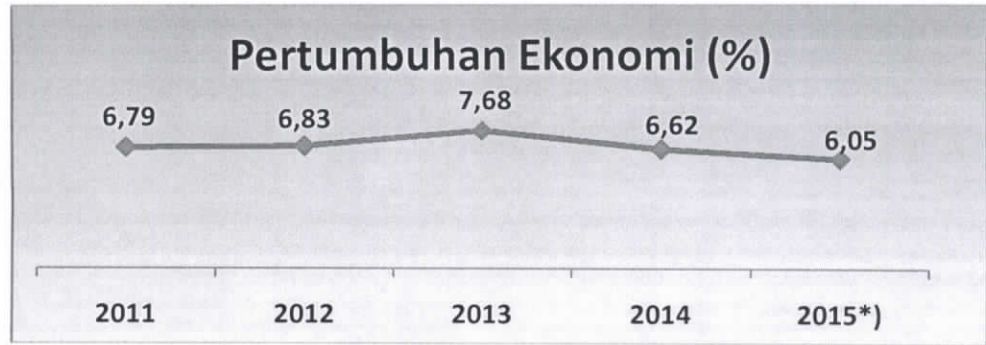
Sementara itu, pembinaan generasi muda di Kota Madiun pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan. Perkembangan prestasi olahraga pelajar pada tahun 2015 di tingkat nasional ada satu, sedangkan prestasi olahraga pelajar untuk tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 Kota Madiun memperoleh sejumlah 5 medali yang diantaranya berupa medali emas, perak dan perunggu.

1.4.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2011 s/d 2015 (%)

Untuk peranan ekonomi sektoral pada tahun 2010 s/d 2015 Kota Madiun atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 8.
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010 s/d 2015 (%)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,15	1,12	1,09	1,03	1,00	0,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
3	Industri Pengolahan	17,31	16,73	16,39	16,11	15,97	16,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22
6	Konstruksi	6,51	6,77	6,85	6,78	6,65	6,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	23,78	24,37	24,41	24,97	24,93	24,83
8	Transportasi dan Pergudangan	2,81	2,79	2,81	2,89	3,05	3,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	4,65	4,60	4,52	4,51	4,56
10	Informasi dan Komunikasi	14,48	14,19	14,08	13,89	13,73	13,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,35	8,66	9,40	9,87	10,23	10,37
12	Real Estate	2,51	2,58	2,57	2,59	2,57	2,69
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,02	3,82	3,55	3,32	3,23
15	Jasa Pendidikan	7,53	7,51	7,65	7,67	7,87	7,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,18	1,21	1,20	1,24	1,29
17	Jasa Lainnya	4,26	4,13	3,87	3,71	3,74	3,80
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

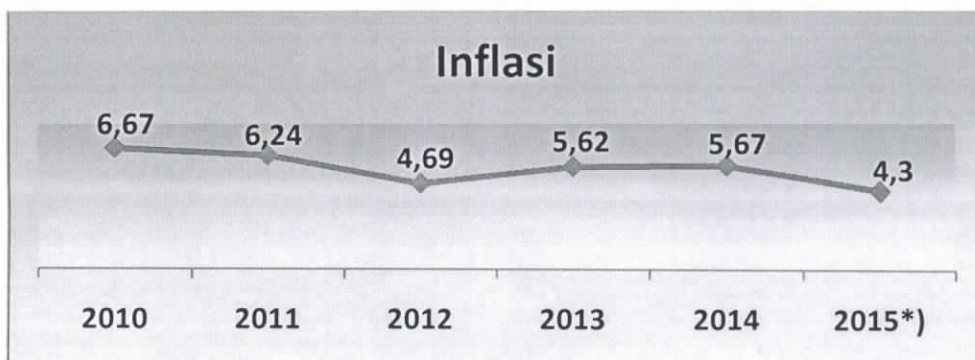
Tabel 1. 9.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.)
Tahun 2010 s/d 2014

NO	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,41	0,44	0,48	0,50	0,53
2	Pertambangan dan Penggalan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	6,16	6,63	7,17	7,76	8,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12
6	Konstruksi	2,32	2,68	3,00	3,27	3,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	8,46	9,66	10,67	12,03	13,17
8	Transportasi dan Pergudangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00	1,11	1,23	1,39	1,61
10	Informasi dan Komuniasi	1,65	1,84	2,01	2,18	2,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	5,62	6,15	6,69	7,25
12	Real Estate	2,97	3,43	4,11	4,75	5,40
13	Jasa Perusahaan	0,89	1,02	1,12	1,25	1,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35
15	Jasa Pendidikan	1,48	1,59	1,67	1,71	1,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	2,98	3,34	3,70	4,16
17	Jasa Lainnya	0,41	0,47	0,53	0,58	0,65
PDRB		35,57	39,63	43,71	48,19	52,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.



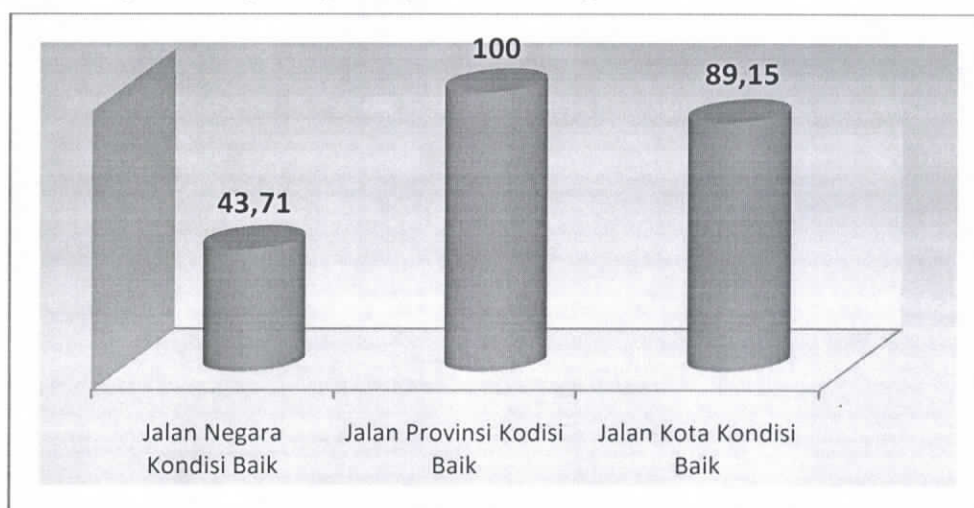
Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Gambar 1. 4.
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2015 (%)

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota.

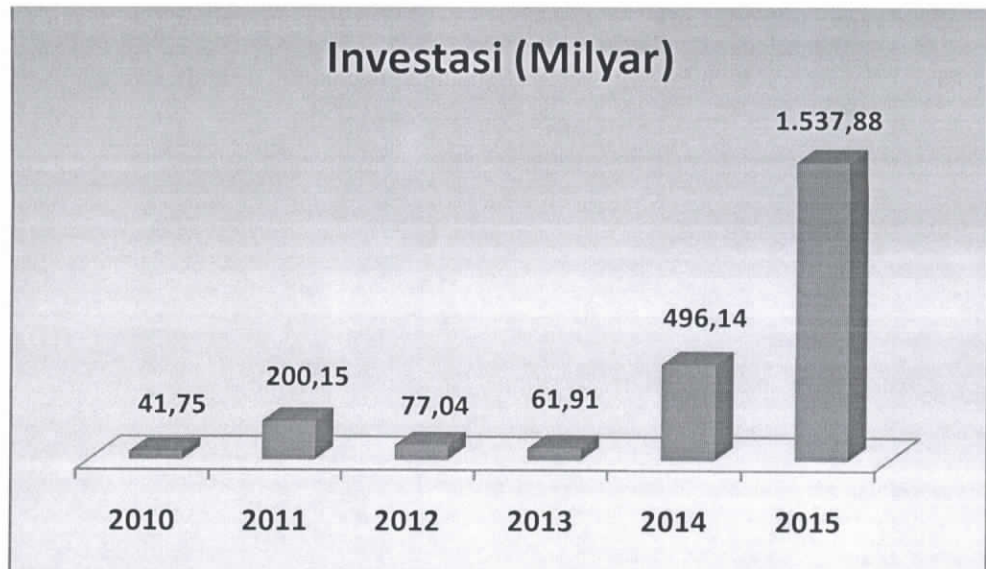


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 5.
Prosentase panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2015

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada dalam sub bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun dan belum memiliki unit kerja khusus di Pemerintah Kota Madiun.



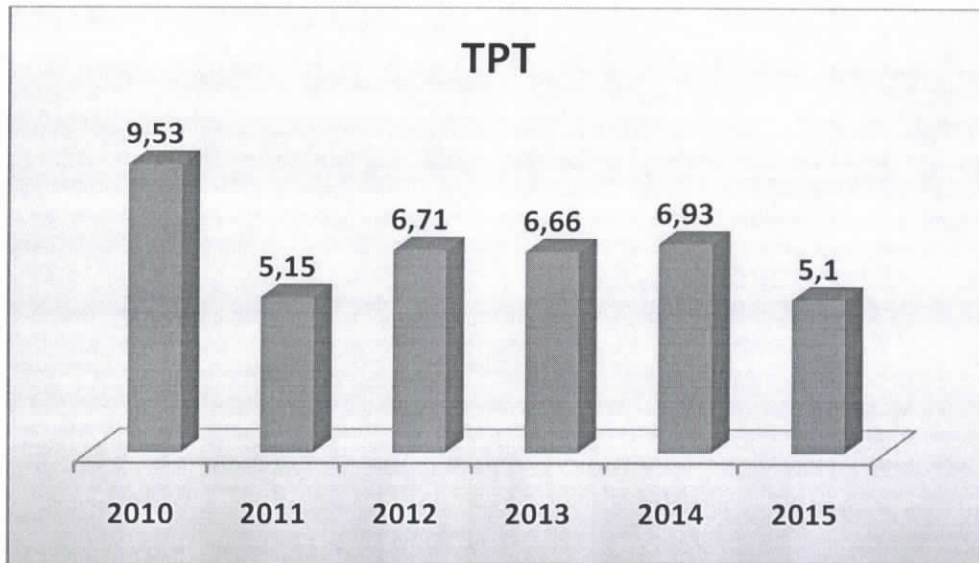
Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 6.

Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2010 – 2015

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Tingkat Kemiskinan.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 7.

Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2010 – 2015

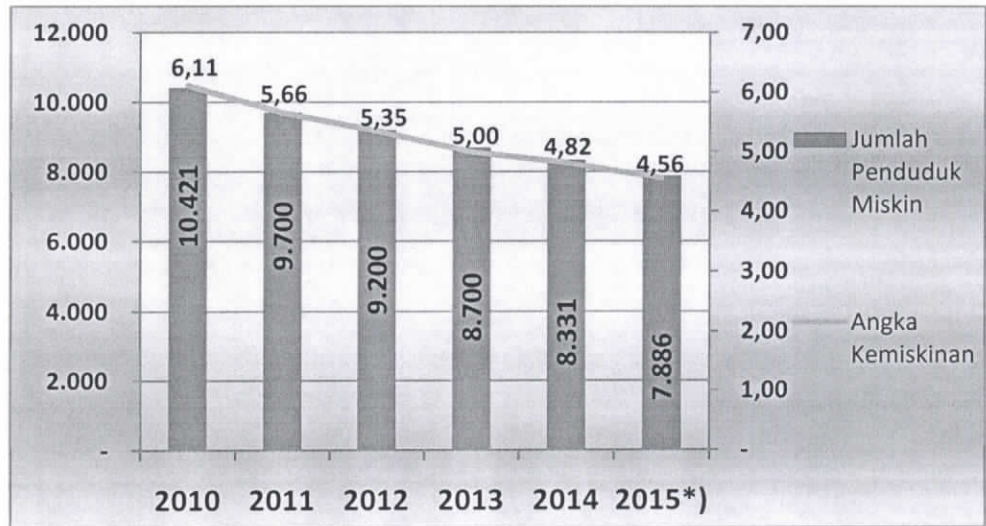
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 1. 10.
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2014

Indeks	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
IPM	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81
Indeks Kesehatan	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81
Angka Harapan Hidup	72,23	72,72	72,33	72,38	72,41
Indeks Pendidikan	0,69	0,70	0,70	0,73	0,74
Angka Harapan Lama Sekolah	12,42	12,44	12,56	13,33	13,64
Rata-rata Lama Sekolah	10,32	10,50	10,68	10,86	10,90
Indeks PPP	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82
Daya Beli (Rp)	13.455,16	13.799,03	14.317,08	14.603,96	14.634,42

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

IPM Kota Madiun pada Tahun 2014 mencapai 78,81 atau naik sebesar 0,40 poin dibanding tahun 2013 yang mencapai 78,41. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 1. 8.
Tren Penurunan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun
Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun tingkat kemiskinan di Kota Madiun mengalami penurunan, dengan menggunakan teknik penghitungan Trendline Linear tabel di atas menunjukkan Tahun 2015 berada pada angka 4,56% angka tersebut turun 0,26% dari Tahun 2014 yang mencapai angka 4,82%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Program Pembangunan Daerah Khususnya yang berhubungan dengan Penurunan Tingkat Kemiskinan telah berhasil diwujudkan dari Tahun ke Tahun.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

Sebagaimana dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, memberikan penjelasan bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program dan kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD, berdasarkan perubahan asumsi-asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD.

Perubahan RKPD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi RKPD Kota Madiun Tahun 2016 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah. Perkembangan tersebut disebabkan antara lain adanya perubahan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,3%, yang berarti tidak mengalami perubahan dari APBN 2016 yang ditetapkan sebesar 5,3%, juga mendasarkan adanya asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun Tahun 2016 yang diproyeksikan sebesar 7,45 %, mengalami perubahan karena adanya perubahan tahun dasar perhitungan yang sebelumnya tahun dasar 2000 sekarang tahun dasar 2010, dan sektornya juga mengalami perubahan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Madiun diproyeksikan 6,11% yang diharapkan akan mampu dipacu melalui peningkatan investasi dan adanya keserasian pengelolaan APBD.

Selain itu Perubahan RKPD tahun 2016 didasarkan pada upaya sinkronisasi program dan kegiatan, antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2016 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional maupun provinsi, dimana pada tahun 2016 masih diupayakan optimalisasi pencapaiannya. Perubahan ini juga didasarkan pada upaya percepatan pencapaian sasaran dan program dimana percepatan pencapaian program dan sasaran ini lebih ditujukan pada program prioritas yang menyangkut antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik;
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Upaya pencapaian program prioritas ini seiring dengan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga.

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2016

2.1.1. Perubahan Asumsi Dasar APBN-P 2016

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik pada tahun 2016 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia.

Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari APBN tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi dari 5,3 persen tetap menjadi 5,3 persen.

Tantangan dari perekonomian global yang diperkirakan masih cukup berat telah diantisipasi dengan terus berjalannya reformasi fiskal yang menitikberatkan pada realokasi belanja untuk mendorong pembangunan yang lebih produktif. Realokasi dana subsidi BBM dan program penghematan belanja pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja yang lebih produktif seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu mempertahankan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3 persen

2) Inflasi dari 4,7 persen menjadi 4,0 persen.

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

3) Nilai tukar dari Rp 13.900/US\$ menjadi Rp 13.500/US\$.

Pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terdepresiasi ke level rata-rata Rp 13.392 per dolar AS. Dari sisi eksternal, isu kebijakan kenaikan suku bunga the Fed serta devaluasi yuan oleh Pemerintah Tiongkok menjadi penyebab utama yang berpengaruh terhadap aliran modal yang masuk ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar menjadi semakin besar. Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan terhadap rupiah diantaranya terkait dengan upaya perbaikan kinerja dari transaksi berjalan, serta tren penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai imbas perlambatan ekonomi dunia turut memberi tekanan. Di awal tahun 2016, dinamika rupiah dipengaruhi oleh sentimen pasar terkait dengan suku bunga acuan the Fed, kebijakan suku bunga negatif ECB dan BoJ, relatif rendahnya tingkat inflasi, serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Sementara itu, faktor positif lain dari sisi domestik seperti penurunan suku bunga acuan BI, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah.

Namun demikian, pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2016 masih menghadapi beberapa risiko eksternal seperti potensi kenaikan suku bunga the Fed pada semester kedua, pelanggaran likuiditas di kawasan Eropa dan Jepang, serta pengaruh moderasi pasar keuangan Tiongkok. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 13.500 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi nilai tukar dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar Rp13.900 per dolar AS

4) Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen tetap menjadi 5,5 persen.

Di awal tahun 2016, pergerakan suku bunga SPN 3 bulan hingga April rata-rata mencapai 5,8 persen sedikit menurun dibandingkan rata-rata pada tahun 2015. Penurunan ini didorong oleh relatif stabilnya rupiah, rendahnya inflasi, penurunan suku bunga acuan BI serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Peningkatan minat investor ini tercermin dalam *net foreignbuying* SBN sampai dengan 31 Maret mencapai Rp 47,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp42,7 triliun. Sementara penurunan suku bunga acuan dimotori oleh kebijakan suku bunga negatif di kawasan Eropa dan Jepang serta mulai stabilnya rupiah di awal tahun. Ke depan, kinerja SPN 3 bulan masih akan dipengaruhi oleh dinamisnya perekonomian global yang berasal dari efek jangka panjang kebijakan suku bunga negatif yang dilakukan oleh Jepang, moderasi pasar keuangan Tiongkok, serta potensi kenaikan suku bunga the Fed yang diperkirakan terjadi di semester kedua tahun 2016. Sementara itu relatif stabilnya rupiah, penurunan suku bunga acuan BI, inflasi yang terjaga serta membaiknya perekonomian dari sisi domestik diharapkan mampu tetap menarik minat investor. Dengan berbagai faktor tersebut, intermediasi keuangan diharapkan akan semakin efisien, sehingga suku bunga SPN 3 bulan sepanjang tahun 2016 dipertahankan berada pada kisaran 5,5 persen, setara dengan angka dalam APBN tahun 2016.

5) Harga minyak Indonesia (ICP) US\$ 50,0 per barel menjadi US\$ 35,0 per barel .

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US\$ 35 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US\$ 50 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi

6) Lifting minyak dari 830 ribu barel per hari menjadi 810 ribu barel per hari.

Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 810 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari.

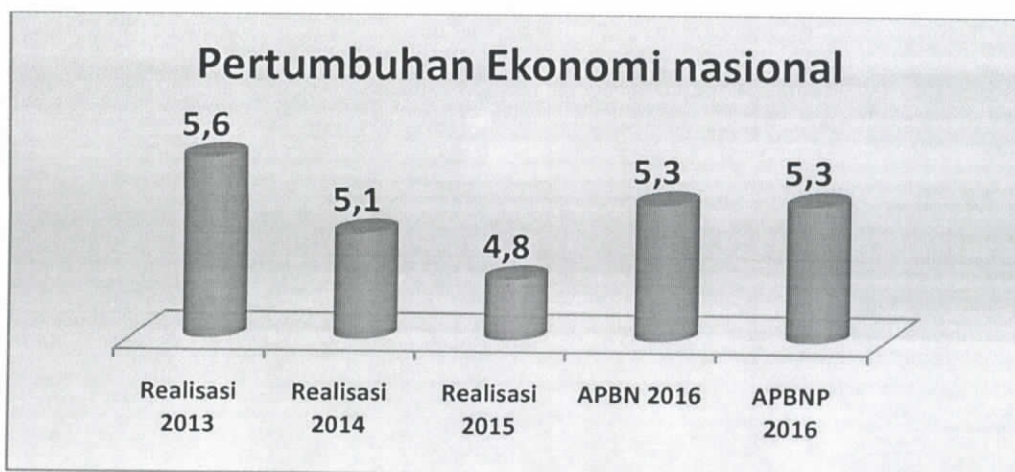
7) Lifting gas dari 1.155 ribu barel per hari menjadi 1.115 ribu barel per hari.

Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.115 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel. 2.1
Asumsi Indikator Makro Ekonomi APBNP 2015

Indikator	APBN	APBN-P
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
- Inflasi (%) y-o-y	4,7	4,0
- Nilai tukar (Rp/USD)	13.900	13.500
- Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,5
- Harga minyak Mentah (US\$/barrel)	50	35
- Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	830	810
- Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.155	1.115

Perekonomian domestik pada tahun 2016 diperkirakan meningkat seiring dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan dorongan dari konsumsi pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta relatif terjaganya konsumsi rumah tangga. Peningkatan belanja infrastruktur yang merupakan program lanjutan yang telah dimulai sejak tahun 2015, diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar dalam proses pembangunan. Dari sisi global, perdagangan dunia diperkirakan meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan aktivitas ekonomi global yang pada gilirannya juga dapat mendukung kinerja ekonomi domestik. Meskipun demikian, masih terdapat risiko-risiko ekonomi yang patut diwaspadai sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional seperti perekonomian Tiongkok yang diperkirakan tumbuh moderat dan perkiraan harga komoditas yang masih cukup rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,3 persen, sama dengan perkiraan dalam APBN tahun 2016.



Sumber : Kementerian Keuangan dan BPS 2016

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2013-2016

Pada tahun 2015, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,0 persen, sedikit lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 5,2 persen. Tingkat inflasi yang relatif terkendali di sepanjang tahun dan adanya Pemilukada pada akhir tahun 2015 di beberapa daerah mampu menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam RAPBNP tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,1 persen sama dengan perkiraan dalam APBN tahun 2016. Stabilitas harga, terutama harga bahan pokok menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Upaya untuk menjaga tingkat konsumsi dalam negeri juga dilaksanakan melalui beberapa program bantuan sosial secara berkesinambungan seperti program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Di samping itu, Pemerintah juga memperluas cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM) serta memberi Tunjangan Hari Raya kepada PNS, TNI, dan Polri, serta Pensiunan. Kebijakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimulai sejak Januari 2016 juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Penyesuaian batas PTKP merupakan salah satu bentuk stimulus pajak (*tax cut policy*) yang bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat ditengah pelemahan ekonomi.

Sepanjang tahun 2015 konsumsi Pemerintah tumbuh 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang hanya tumbuh sebesar 1,2 persen. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah yang relatif tinggi didorong oleh besarnya serapan belanja Pemerintah seiring berjalannya proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, percepatan proses lelang serta tingginya belanja modal dan barang menjadi faktor pendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah. Dalam RAPBNP tahun 2016, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,0 persen.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh kebijakan relaksasi pengadaan yang telah dimulai sejak akhir 2015, telah selesainya proses perubahan nomenklatur di berbagai Kementerian Negara/Lembaga, dan pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Disamping itu, proses pembangunan infrastruktur yang masih berjalan, peningkatan jumlah transfer ke daerah, serta pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah tahun 2016.

Kinerja PMTB tahun 2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik. PMTB mampu tumbuh 5,1 persen, lebih tinggi dari tahun 2014 yang mencapai 4,6 persen. Hal ini terutama ditopang oleh pembangunan proyek-proyek infrastruktur serta upaya berkesinambungan yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing industri. PMTB pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh sekitar 6,3 persen, lebih tinggi dibandingkan perkiraan APBN tahun 2016 yang sebesar 6,2 persen. Hal ini terutama didorong oleh akselerasi proyek-proyek infrastruktur dan sebagai dampak implementasi Paket-Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang mulai digulirkan sejak bulan September 2015 yang hasilnya mulai dirasakan di tahun 2016. Seperti diketahui, Paket-Paket Kebijakan Ekonomi menitikberatkan pada penguatan sektor industri manufaktur, percepatan dan penyederhanaan prosedur investasi, serta penguatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penguatan PMTB di tahun 2016 juga diperkirakan sebagai dampak positif semakin kondusifnya iklim investasi di Indonesia yang terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia di Survei Kemudahan Berusaha yang akan menciptakan sentimen positif bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia. Revisi regulasi terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) juga diharapkan menjadi faktor pendorong kinerja investasi.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor-impor tahun 2015 tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,0 persen dan -5,8 persen. Pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor-impor Indonesia. Dalam RAPBNP tahun 2016, ekspor dan impor masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 0,1 persen dan 0,4 persen. Perkiraan ekonomi global yang membaik dan volume permintaan dunia yang meningkat diharapkan akan mendorong kinerja ekspor impor. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik sehingga memperlancar arus perdagangan. Untuk itu, kebijakan ekspor nasional diarahkan untuk meningkatkan daya saing dengan peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Namun, risiko berupa rendahnya harga komoditas dan moderasi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama menjadi tantangan dalam mendorong kinerja ekspor dan impor.

Tabel. 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Tahun 2015 – 2016 (persen, y-o-y)

URAIAN	2015	2016	
	REALISASI	APBN	RAPBNP
Pengeluaran			
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,1	5,1
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)	-0,6	2,0	6,2
3. Konsumsi Pemerintah	5,4	5,7	6,0
4. PMTB	5,1	6,2	6,3
5. Ekspor	-2,0	2,2	0,1
6. Impor	-5,8	2,0	0,4
Produk Domestik Bruto	4,8	5,3	5,3

Sumber : Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPS

2.1.2 Perubahan Laju Inflasi

Pada Maret 2016 Kota Madiun mengalami inflasi 0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,77. Dari 8 kota penghitung inflasi nasional di Provinsi Jawa Timur 6 (enam) kota mengalami inflasi dan 2 (dua) kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 121,77. Inflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 123,69. Kota Probolinggo dan Kabupaten Sumenep mengalami deflasi masing masing sebesar -0,08 persen dan -0,27 persen dengan IHK masing masing 121,54 dan 120,80.

Inflasi Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh adanya perubahan indeks pada kelompok Bahan Makanan sebesar 0,35 persen, Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,21 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,24 persen, kelompok sandang sebesar 0,51 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,05 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Maret (Januari 2016-Maret 2016) dan inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 0,61 dan 3,67.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK.

Inflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh adanya perubahan indeks pada pada kelompok Bahan Makanan sebesar 0,35 persen; Makanan Jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,24 persen; kelompok sandang sebesar 0,51 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,05 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Inflasi bulan Maret 2016 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komoditas bawang merah, cabai rawit, bawang putih, papaya, dan cabai merah. Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain: daging ayam ras, telur ayam ras, beras, semen dan tarif listrik.

Berdasarkan kelompok komoditas, terdapat 5 kelompok yang memberikan andil positif terhadap inflasi yang terjadi pada bulan Maret diantaranya: Kelompok bahan makanan memberikan andil sebesar 0,0684 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,0392 persen, kelompok sandang sebesar 0,0293 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0064 persen dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,0050 persen. Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan menekan inflasi dengan andil masing-masing -0,0588 persen dan -0,0047 persen.

Tabel 2.3.

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Madiun Maret 2016, Tahun Kalender 2016, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran		IHK Februari 2015	IHK Desember 2015	IHK Maret 2016	Inflasi Maret 2016 (1)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2016 (2)	Inflasi Tahun ke Tahun (3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Umum (Headline)	120,04	116,49	120,77	0,08	0,61	3,67
1	Bahan Makanan	121,39	119,13	123,35	0,35	1,61	3,54
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	125,52	116,76	126,55	0,21	0,82	5,77
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	119,08	109,41	119,96	-0,24	0,74	2,74
4	Sandang	111,98	111,32	113,88	0,51	1,70	4,09
5	Kesehatan	114,64	113,84	115,29	0,11	0,57	3,57
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	117,17	115,47	113,47	0,025	0,26	3,6819
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	120,22		118,97	-0,03	-1,04	3,03

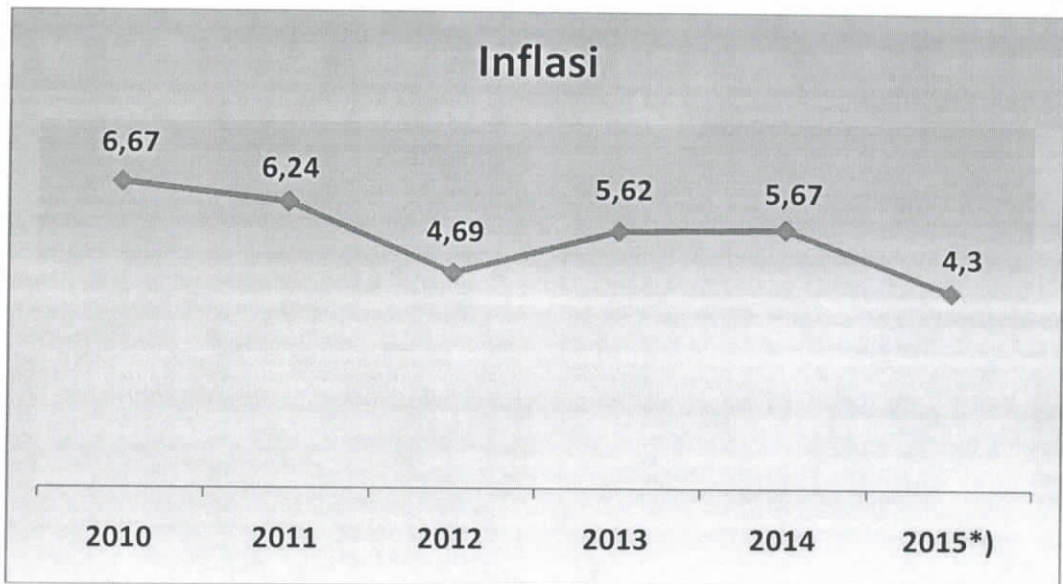
(1) Persentase perubahan IHK Maret 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya

(2) Persentase Perubahan IHK Maret 2016 terhadap IHK Januari 2016

(3) Persentase perubahan IHK Maret 2016 terhadap IHK Maret 2015

Sumber : BPS Kota Madiun, 2016

Berdasarkan PDRB Kota Madiun, tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,37 dibanding tahun 2014 yaitu dari 5,67% menjadi 4,630%. Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2010-2015 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun
) Angka Sementara

Gambar 2.2
Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2010-2015 (%)

2.1.3 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan sektor usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah/regional. Dengan demikian PDRB secara agregat dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan / balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Hal ini digunakan untuk melihat gejolak harga pada tahun berjalan dan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Di bawah ini nilai PDRB Kota Madiun dihitung atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2015 dengan tahun dasar 2010.

Tabel. 2.4
Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	ADHB*) (Milyar)	ADHK*) (Milyar)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	97,9	75,4
2	Pertambangan dan Penggalian	2,5	2,0
3	Industri Pengolahan	1.636,8	1.448,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,7	6,4
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,6	18,4
6	Konstruksi	664,1	539,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.530,3	1.981,7
8	Transportasi dan Pergudangan	321,2	242,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,8	407,8
10	Informasi dan Komuniasi	1.393,9	1.332,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56,6	780,7
12	Real Estate	274,0	217,7
13	Jasa Perusahaan	69,3	61,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329,4	281,4
15	Jasa Pendidikan	803,0	623,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,1	107,8
17	Jasa Lainnya	387,2	320,2
PDRB		10.191,7	8.447,4

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2015 mencapai 6,05% atau melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,62%, karena dipengaruhi berbagai faktor perekonomian. Pertumbuhan terjadi pada seluruh sektor usaha, di mana sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 9,35 persen. Posisi berikutnya, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,41%. Kemudian, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,13%. Dari kondisi tersebut ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Lainnya.

Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melambat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang memicu perlambatan tersebut. Secara garis besar, mengapa pertumbuhan melambat ada empat hal :

1. Konsumsi rumah tangga, pembelian masyarakat atas barang dan jasa menurun karena daya beli masyarakat juga menurun.
2. Investasi dalam negeri yang menurun dan dibanyak sektor bahkan berhenti.
3. Nilai ekspor komoditi dalam negeri menurun, meski ada sejumlah komoditas volume ekspornya masih tetap, tapi nilainya menurun karena sejumlah komoditas harganya jatuh. Misalnya minyak bumi, batu bara, kelapa sawit dan karet. Karena kita produsen utama atas komoditas-komoditas itu, maka perolehan negara dari ekspor kita menurun
4. pembelanjaan pemerintah belum optimal

Tabel. 2.5
Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	2,93	0,7	0,98	1,58
2	Pertambangan dan Penggalian	8,09	1,99	3,69	1,69	1,98
3	Industri Pengolahan	4,52	5,30	7,57	7,78	6,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	8,97	4,13	3,15	3,47
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,58	4,08	4,68	2,15	2,58
6	Konstruksi	8,93	6,59	7,69	4,98	3,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	6,79	7,84	7,91	5,46	4,56
8	Transportasi dan Pergudangan	7,83	6,05	7,18	8,45	6,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,61	6,63	7,77	7,28	7,28
10	Informasi dan Komunikasi	8,37	9,11	9,45	8,13	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,92	9,15	11,61	7,81	7,52
12	Real Estate	8,99	6,95	7,28	6,76	6,76
13	Jasa Perusahaan	4,24	5,43	7,48	8,41	8,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	1,38	1,00	0,78	3,88
15	Jasa Pendidikan	5,70	6,01	6,08	7,71	6,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,64	9,48	6,50	7,87	9,35
17	Jasa Lainnya	4,47	3,21	4,25	5,35	4,28
PDRB		6,79	6,83	7,68	6,62	6,05

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Tabel. 2.6
Prospek dan Prediksi Kinerja Pembangunan Kota Madiun

Indikator	Real 2012	Real 2013	Real 2014	Real 2015*)	Proyeksi 2016 M	Proyeksi 2016 P
Pertumbuhan Ekonomi	6,83	7,68	6,62	6,05	7,45	6,11
PDRB ADHB (Milyar Rp)	7.533,6	8.390,4	9.214,2	10.191,7	9.245,5	10.974,91
PDRB ADHK (Milyar Rp)	6.937,7	7.470,7	7.965,5	8.447,4	3.210,2	9.389,57
PDRB per Kapita (Juta Rp)	43,71	48,19	52,84	58,24	48,07	60,55
TPT (%)	6,71	6,66	6,93	5,1	6,5	4,8
IPM	77,50	78,17	78,64	79,15	79,20	79,66
Inflasi	4,69	5,62	5,67	4,3	5 ± 1%	5 ± 1%
Kemiskinan (%)	5,30	5,00	4,80	4,56	5,29	4,38

2.1.4.Lain-lain asumsi

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi dasar Perubahan RKPD Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

a. Yang menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut :

- Didapati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 339.135.179.352,77**.
- Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2016, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.
- Adanya Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/12.846/202/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar **Rp. 1.670.630.000,00**.
- Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan ke Tiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan penerima pensiun atau tunjangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tambahan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis pemberian Gaji ke Tiga Belas dan Tunjangan Hari Raya tahun 2016.

- Adanya Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-10 / MK.07/ 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri tahun anggaran 2016 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pagu alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar **Rp. 9.567.060.000,00.**
- Adanya surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk teknis penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD tahun anggaran 2016, ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 113.302.456.000,16.**
- Adanya surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 970/49379/120.23/2015 tentang informasi Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Target penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016.

b. Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja yaitu sebagai berikut :

- Penambahan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 (Gaji ke 14) pegawai.
- Pengurangan belanja Pembangunan Gedung DPRD dan belanja Pengadaan Sarpras DPRD sebesar **Rp. 20.575.000.000,00** dan **RP. 265.063.000,00**
- Dana Cadangan PILKADA **Rp. 10.000.000.000,00.**

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali.

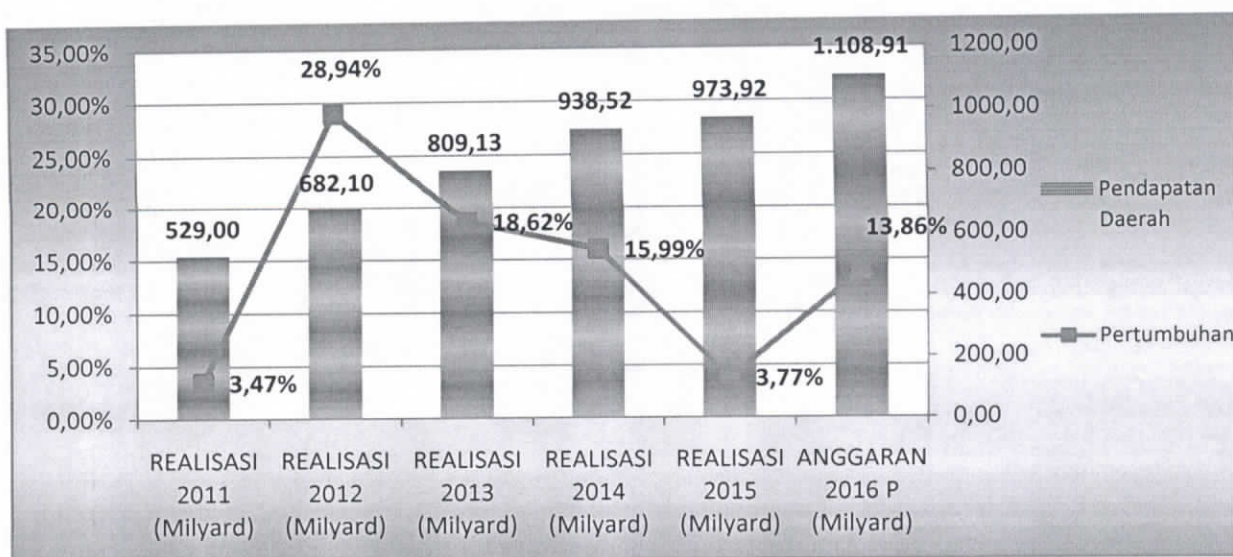
Tabel. 2.7
Pendapatan dan Perubahan Pendapatan

KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	132.435.377.000,00	150.755.282.000,00	18.319.905.000,00	13,83%
1.1.1.	Pajak Daerah	50.000.000.000,00	57.000.000.000,00	7.000.000.000,00	14,00%
1.1.2.	Retribusi Daerah	13.969.711.000,00	14.050.161.000,00	80.450.000,00	0,58%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.621.407.000,00	9.621.407.000,00	0,00	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	58.844.259.000,00	70.083.714.000,00	11.239.455.000,00	19,10%
1.2.	Dana Perimbangan	593.152.373.000,00	854.867.497.160,00	261.715.124.160,00	44,12%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak	24.768.358.000,00	62.097.702.000,00	37.329.344.000,00	150,71%
1.2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	27.751.042.000,00	70.278.735.000,00	42.527.693.000,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Umum	511.357.289.000,00	511.357.289.000,00	0,00	0,00%
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	95.640.600.000,00	199.378.994.160,00	103.738.394.160,00	108,47%
1.2.5.	Dana Bagi Hasil Cukai	11.754.777.000,00	11.754.777.000,00	0,00	0,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	234.097.330.000,00	103.285.273.000,00	(130.812.057.000,00)	-55,88%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.807.406.000,00	60.648.410.000,00	1.841.004.000,00	3,13%
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	173.438.474.000,00	40.996.233.000,00	(132.442.241.000,00)	-76,36%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.851.450.000,00	1.640.630.000,00	(210.820.000,00)	-11,39%
	Jumlah Pendapatan	1.037.804.773.000,00	1.108.908.052.160,00	71.103.279.160,00	6,85%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas nampak bahwa jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat, menurun dan tetap adalah:

- ❖ Jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat: Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak , Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, DBH pajak dari provinsi.
- ❖ jenis pendapatan yang diproyeksi menurun Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi.
- ❖ Jenis pendapatan yang diproyeksi tetap adalah Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, DAU, DBHCHT, Retribusi Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan



Gambar 2.3
Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Pertumbuhannya

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2016 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan. Potensi pendapatan daerah tersebut antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

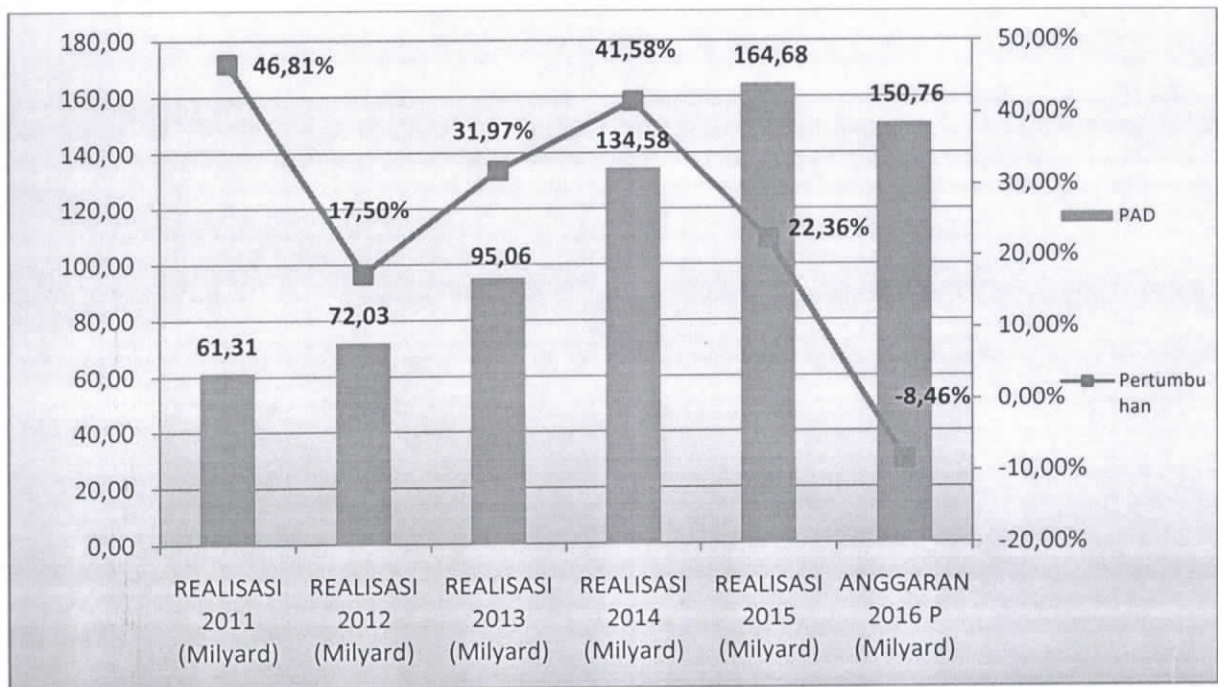
Disamping sumber-sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang menjadi hak daerah, maka Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan mulai Tahun 2014 pelaksanaan pemungutan PBB sudah diserahkan ke daerah.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun efektifitas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya pada sisi pendayagunaannya dikelola secara proporsional dan profesional,

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah, bahwa PAD sebagian didayagunakan untuk memenuhi Kedudukan Keuangan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD, dan selebihnya direncanakan untuk membiayai Belanja Langsung yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan PAD sampai akhir Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan mampu mencapai Rp. 150.755.282.000,00 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.241.260.000,00 atau naik sebesar 13,83 % dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 132.435.377.000,00.



Gambar 2.4
PAD dan Pertumbuhannya

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan yang terjadi dalam satu periode perencanaan dalam konstelasi perundangan dimungkinkan untuk diakomodasikan dalam sebuah dokumen perubahan. Kerangka berpikir yang digunakan adalah perubahan tersebut diupayakan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Selain itu perubahan tersebut dilaksanakan untuk harmonisasi terhadap target dan sasaran baik yang melampaui maupun yang belum sesuai capaian. Demikian juga guna melakukan integrasi terhadap RKPD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD). Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara dan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, perubahan RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016 untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2016. Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam Pasal 155 dijelaskan bahwa Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Dalam pelaksanaannya RKPD tahun 2016 yang disusun berdasarkan RPJMD Kota Madiun tahun 2014–2019, yang merupakan pelaksanaan tahun kedua dari RPJMD tersebut maka substansi penetapan prioritas memiliki nilai strategis dan penting dalam upaya pencapaian Visi, Misi dan Tujuan Pembangunan dalam RPJMD. Sesuai dengan RKPD 2016 Prioritas Pembangunan Kota Madiun adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik;
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Memperhatikan Prioritas Pembangunan Kota Madiun Tahun 2016 tersebut di atas dan evaluasi terhadap pencapaian program dan kegiatan, saat ini secara umum sudah dilaksanakan dengan baik namun masih diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah, utamanya dalam percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara prinsip 6 prioritas pembangunan yang telah ditetapkan tersebut tetap menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2016.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah antara lain :

- a. memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan RKPD yang ditetapkan sebelumnya.
- b. sebagai pedoman Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).
- c. adanya pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran dari asumsi RKPD.
- d. adanya sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun anggaran 2015 yang harus digunakan untuk tahun 2016.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2015 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Madiun Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
17. Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2016;

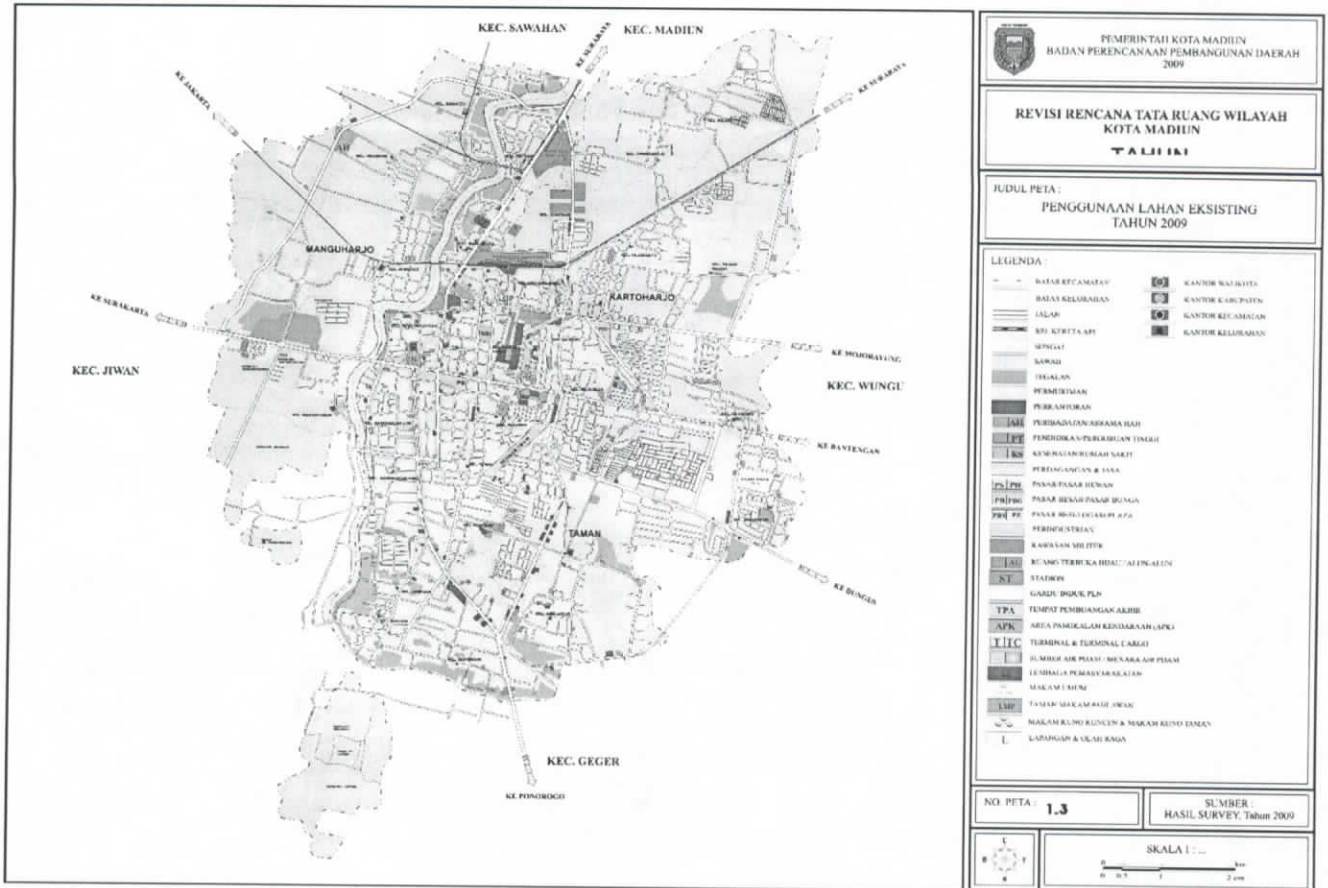
1.4. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran sejauh mana keberhasilan pembangunan di Kota Madiun dan mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan. Adapun Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang utama meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek pelayanan umum, lebih lanjut analisis dari masing-masing aspek dimaksud sebagaimana uraian berikut.

1.4.1. Aspek Geografi dan Demografi

Secara geografis, Kota Madiun terletak pada koordinat 111° BT – 112° BT dan 7° LS – 8° LS, berada pada daratan dengan ketinggian 63 hingga 67 meter dari permukaan laut. Daratan dengan ketinggian 63 meter dari permukaan air laut terletak di tengah, sedangkan daratan dengan ketinggian 67 meter dari permukaan air laut terletak di sebelah selatan. Rentang temperatur udara antara 20°C hingga 35°C . Rata-rata curah hujan tinggi terjadi pada bulan-bulan awal tahun dan akhir tahun, sedangkan rata-rata curah hujan rendah terjadi pada pertengahan tahun. Kota Madiun berada di tengah-tengah Kabupaten Madiun, sehingga wilayahnya berbatasan langsung dengan beberapa kecamatan di Kabupaten Madiun dan Magetan, diantaranya:

1. perbatasan sebelah utara : Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun,
2. perbatasan sebelah selatan : Kecamatan Geger Kabupaten Madiun,
3. perbatasan Sebelah timur : Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun,
4. perbatasan Sebelah barat : Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun, dan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.



Sumber: madiunkota.go.id

Gambar 1. 1.
Peta Administratif Kota Madiun

Kota Madiun mempunyai luas wilayah sebesar 33,23 km² yang terbagi dalam 3 (tiga) kecamatan, yaitu meliputi Kecamatan Manguharjo dengan luas 10,04 km², Kecamatan Taman dengan luas 12,46 km² dan Kecamatan Kartoharjo dengan luas 10,73 km². Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri dari 9 (sembilan) kelurahan, sehingga terdapat 27 Kelurahan.

Dari aspek demografi, berdasarkan hasil registrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir tahun 2015 sebanyak 208.248 jiwa, tersebar di tiga kecamatan diantaranya Kecamatan Kartoharjo 57.777 jiwa, Kecamatan Manguharjo 62.276 jiwa, dan Kecamatan Taman 88.195 jiwa. Rincian jumlah penduduk Kota Madiun per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 1.
Jumlah Penduduk Kota Madiun per Kecamatan Tahun 2011 s/d 2015

No.	Kecamatan	Tahun/Jiwa				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Kartoharjo	55.332	55.970	57.090	58.125	57.777
2	Manguharjo	60.804	60.712	62.086	63.007	62.276
3	Taman	85.951	86.575	88.205	89.867	88.195
	Total	202.087	203.257	207.381	210.999	208.248

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

Selain itu, menurut tingkat pendidikan sampai dengan akhir tahun 2015 menunjukkan bahwa penduduk terbesar Kota Madiun merupakan tamat SLTA, yaitu sebesar 69.799 jiwa. Tabel berikut juga memperlihatkan bahwa jumlah penduduk Kota Madiun yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dari SLTA lebih sedikit, diantaranya tamat D-I/II 440 jiwa; D-III 5.507 jiwa; S-1 18.608 jiwa; S-2 1.205 jiwa, dan S-3 20 jiwa. Secara lengkap, jumlah penduduk Kota Madiun menurut tingkat pendidikan tahun 2011 s/d 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011 s/d 2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Berdasarkan Pendidikan :					
Belum Sekolah;	30.321	29.751	30.586	31.218	30.989
Tidak Tamat SD;	12.503	15.062	16.883	18.383	18.575
Tamat SD;	34.825	33.571	33.704	33.767	32.950
Tamat SLTP;	29.605	29.660	29.932	30.247	30.155
Tamat SLTA;	69.317	69.515	70.414	71.142	69.799
Tamat D-I/II;	434	438	449	448	440
Tamat D-III;	5.359	5.447	5.544	5.624	5.507
Tamat S-1;	18.634	18.731	18.740	18.985	18.608
Tamat S-2;	1.070	1.067	1.112	1.169	1.205
Tamat S-3.	19	15	17	16	20

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

Sedangkan jumlah penduduk Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2015 menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 3.
Jumlah Penduduk Kota Madiun Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2011 s/d 2016

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan :					
Belum/Tidak	42.231	39.935	39.525	39.214	38.404
PRT	34.069	34.131	34.560	35.064	34.603
Pelajar/Mahasiswa	34.810	37.768	40.077	43.158	43.581
Pensiunan	6.865	6.692	6.655	6.509	6.374
PNS	7.848	7.709	7.708	7.623	7.379
TNI	1.895	1.901	1.938	1.952	1.850
POLRI	1.040	1.040	1.062	1.060	1.048
Jasa	7.155	8.918	7.723	5.058	8.608
Karyawan	40.100	40.920	41.871	42.745	42.126
Buruh	4.692	4.900	5.054	5.115	5.082
Wiraswasta	20.693	18.753	20.039	18.687	18.727
Lain-lain	689	590	562	4.814	466

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, Tahun 2016

1.4.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pembangunan ekonomi Kota Madiun terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya total PDRB setiap tahunnya baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Madiun pada Tahun 2010 s/d 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. 4.
Pertumbuhan PDRB Kota Madiun Tahun 2011 s/d 2015 (Rp. Milyar)

Tahun	PDRB (Rp)		Pertumbuhan (%)
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2011	6.813,4	6.494,4	6,79
2012	7.533,6	6.937,7	6,83
2013	8.390,4	7.470,7	7,68
2014	9.214,2	7.965,5	6,62
2015*)	10.191,7	8.442,4	6,05

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Tabel 1. 5.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70,2	76,1	82,0	86,5	92,2	97,9
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	2,0	2,0	2,2	2,3	2,5
3	Industri Pengolahan	1.068,1	1.156,5	1.252,0	1.369,7	1.490,9	1.636,8
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,1	5,4	5,4	5,6	6,7
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,5	16,5	18,0	19,8	21,1	22,6
6	Konstruksi	396,1	461,1	516,3	568,7	612,5	664,1
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.446,2	1.660,7	1.839,1	2.095,3	2.296,9	2.530,3
8	Transportasi dan Pergudangan	171,1	190,3	211,5	242,2	280,8	321,2
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,3	316,8	346,6	379,6	415,4	464,8
10	Informasi dan Komunikasi	880,5	967,1	1.060,7	1.165,2	1.264,9	1.393,9
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	507,6	590,3	708,4	827,9	942,4	1.056,6
12	Real Estate	152,7	176,0	193,4	217,1	237,3	274,0
13	Jasa Perusahaan	44,3	47,5	51,1	56,2	61,8	69,3

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,4	273,8	288,1	298,0	306,2	329,4
15	Jasa Pendidikan	458,1	511,6	576,3	643,8	725,3	803,0
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,2	80,6	90,9	101,1	114,2	131,1
17	Jasa Lainnya	259,3	281,3	291,9	311,5	344,4	387,2
PDRB		6.081,2	6.813,4	7.533,6	8.390,4	9.214,2	10.191,7

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Tabel 1. 6.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Kota Madiun Tahun 2011 s/d 2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	70,2	70,9	73,1	73,5	74,2	75,4
2	Pertambangan dan Penggalian	1,7	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0
3	Industri Pengolahan	1.068,1	1.115,9	1.174,3	1.262,6	1.360,4	1.448,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,8	5,2	5,7	6,0	6,1	6,4
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	15,5	16,1	16,8	17,5	17,9	18,4
6	Konstruksi	396,1	431,5	459,9	495,3	520,0	539,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	1.446,2	1.544,3	1.665,4	1.797,1	1.895,3	1.981,7
8	Transportasi dan Pergudangan	171,1	184,4	195,6	209,6	227,4	242,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	281,3	308,4	328,8	354,3	380,1	407,8
10	Informasi dan Komunikasi	880,5	954,2	1.041,2	1.139,6	1.232,3	1.332,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	507,6	552,9	603,5	673,6	726,2	780,7
12	Real Estate	152,7	166,5	178,0	191,0	203,9	217,7
13	Jasa Perusahaan	44,3	46,1	48,6	52,3	56,7	61,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	253,4	262,5	266,1	268,8	270,9	281,4
15	Jasa Pendidikan	458,1	484,3	513,4	544,6	586,6	623,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	70,2	784,0	85,8	91,4	98,6	107,8
17	Jasa Lainnya	259,3	270,9	279,6	291,5	307,1	320,2
PDRB		6.081,2	6.494,4	6.937,7	7.470,7	7.965,5	8.447,4

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan masyarakat diukur dengan persentase tahapan keluarga sejahtera. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan suatu keluarga berdasarkan pemenuhan kebutuhan keluarga. Semakin tinggi tingkat kesejahteraan suatu keluarga semakin tinggi pula tingkat kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi. Tingkat pemenuhan kebutuhan keluarga dibagi ke dalam 5 kategori tahapan yaitu : Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus.

Tabel 1. 7.
Total Pra KS, KS-I, KS-II, KS-III, dan KS III Plus Kota Madiun
Tahun 2011 – 2015

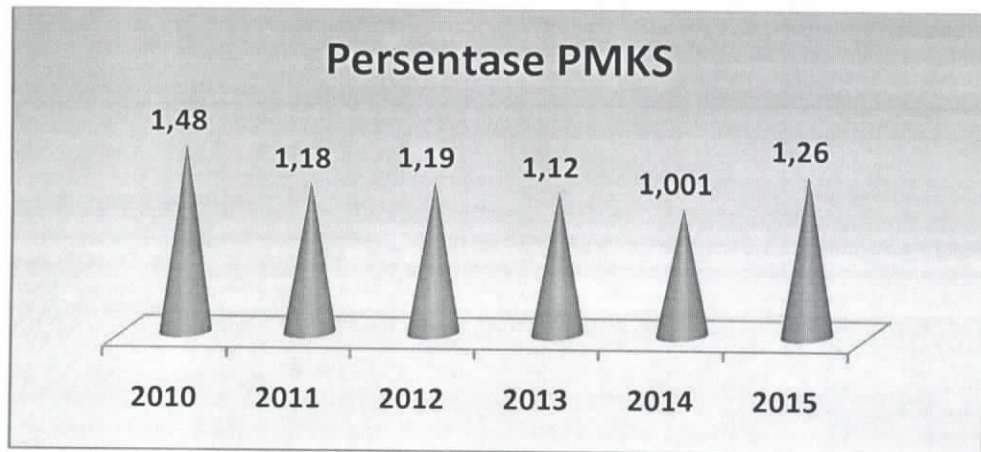
Kategori	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Pra KS	673	503	374	497	332
KS-I	7.759	7.805	7.896	7.402	7.643
KS-II	14.996	15.643	13.519	17.168	17.759
KS-III	23.047	24.244	25.724	24.372	23.815
KS-III Plus	2.392	2.662	4.560	2.991	3.096

Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan Kota Madiun Tahun 2016

Prosentase Pra KS dan KS-1 ada perubahan tahun 2014 jumlahnya 7.899 keluarga, sedangkan tahun 2015 jumlahnya 7.975 keluarga penambahan 76 keluarga atau 0,96% karena adanya dampak kondisi perekonomian baik regional, nasional maupun internasional. Prosentase Keluarga Sejahtera II , III dan III Plus mengalami kenaikan 0,31% (139 KK) yaitu tahun 2014 jumlahnya 44.531 menjadi 44.670 pada tahun 2015, yang artinya perbaikan ekonomi atau kesejahteraan keluarga mengalami kenaikan.

Kondisi kesejahteraan keluarga di Kota Madiun sampai dengan akhir Tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Keluarga di Kota Madiun secara umum termasuk kategori Keluarga Sejahtera II dan III serta III Plus sebanyak 44.670 keluarga atau 84,85% dari jumlah KK 52.645.

Selain indikator Pra-sejahtera, KS-I, KS-II, KS-III dan KS-III Plus, indikator kesejahteraan sosial juga dapat dilihat dengan persentase jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Indikator ini membandingkan jumlah masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan jumlah penduduk Kota Madiun. Indikator ini juga menunjukkan komitmen pemerintah Kota Madiun dalam upaya mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha.



Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2015

Gambar 1. 2.

**Persentase PMKS terhadap Jumlah Penduduk Kota Madiun
Tahun 2010 – 2015**

Pada tahun 2015, jumlah PMKS di Kota Madiun mencapai 1,26% atau 2.630 orang dari total penduduk yakni 208.248 jiwa. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,259% dibandingkan dengan PMKS di tahun 2014 yang berjumlah 2.113 orang. Dari jumlah PMKS yang ada pada tahun 2015, sejumlah 2.630 orang atau 100% telah mendapat penanganan dari pemerintah Kota Madiun. Penanganan PMKS di tahun 2015 meliputi pembinaan, pengiriman ke panti rehabilitasi sosial, dan pemulangan ke tempat asal/ keluarga jika PMKS berasal dari hasil sidak di jalanan. Selain itu, persentase PMKS terhadap jumlah penduduk setiap tahun memiliki tren penurunan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jumlah masyarakat Kota Madiun yang mengalami masalah kesejahteraan sosial menurun semenjak tahun 2010 yang lalu sampai 2014 tapi pada tahun 2015 mengalami kenaikan sedikit.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Indikator-indikator pengukur kemajuan seni, budaya dan olahraga diantaranya adalah keikutsertaan dan prestasi dalam event regional dan nasional, jumlah event/ kegiatan budaya, jumlah pembinaan generasi muda, dan jumlah prestasi olahraga. Keikutsertaan dan prestasi dalam event Regional dan Nasional tahun 2015 meningkat dibandingkan tahun 2014, yaitu 6 prestasi di bidang seni dan budaya sedangkan pada tahun 2014 prestasinya 5. Beberapa keikutsertaan dalam event regional maupun nasional diantaranya :

1. Festival Pedalangan,
2. Festival Karya Tari,
3. Lomba Bina Kreatifitas SDLB dalam rangka HAN dan Pekan Seni Pelajar (Ada 8 jenis lomba Tingkat SD/MI, 6 jenis lomba tingkat SMP, dan 4 jenis lomba tingkat SMA).

Di sisi lain, dalam mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kegiatan budaya sebagai pendorong kegiatan pariwisata, Pemerintah Kota Madiun telah melaksanakan even seni budaya dalam tahun 2015 sebanyak 11 even. Hal ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yang juga hanya 11 even, diantaranya :

1. Hari Anak Nasional (HAN) Tingkat Kota Madiun,
2. Grebeg Maulud Nabi Muhammad SAW,
3. Geguritan Pitutur Budi Pekerti bagi guru SD dan SMP,
4. Pembinaan Seniman,
5. Pentas Seni Secara Periodik,
6. Lomba Keroncong dan campursari Tingkat Kota,
7. Pentas Dalang Kecil, dan
8. Pagelaran Wayang Kulit.

Indikator ini menunjukkan jumlah even seni dan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah secara tahunan. Semakin banyak even wisata, seni dan budaya mengindikasikan semakin meningkatnya kehidupan seni budaya dan pariwisata di Kota Madiun, sekaligus menunjukkan kemampuan penyediaan kesempatan berkreatifitas di urusan seni budaya.

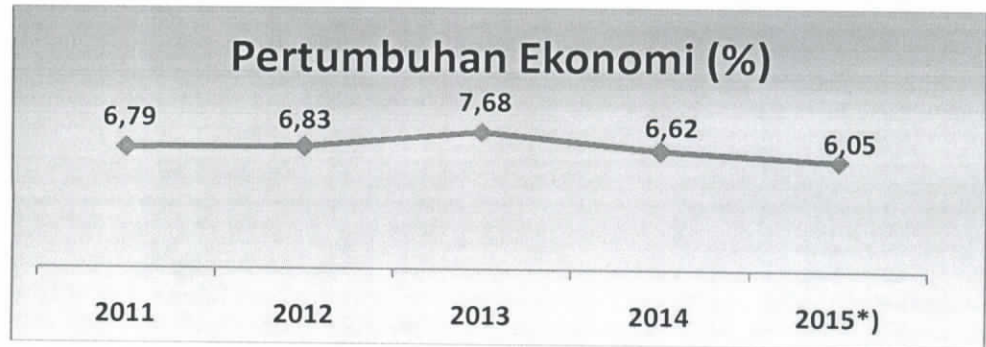
Sementara itu, pembinaan generasi muda di Kota Madiun pada tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan dalam 2 (dua) kegiatan. Perkembangan prestasi olahraga pelajar pada tahun 2015 di tingkat nasional ada satu, sedangkan prestasi olahraga pelajar untuk tingkat Nasional dan Provinsi Jawa Timur tahun 2015 Kota Madiun memperoleh sejumlah 5 medali yang diantaranya berupa medali emas, perak dan perunggu.

1.4.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Indikator aspek daya saing daerah adalah sebagai berikut.

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi daerah, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB (baik ADHB maupun ADHK).



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 3.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun
Tahun 2011 s/d 2015 (%)

Untuk peranan ekonomi sektoral pada tahun 2010 s/d 2015 Kota Madiun atas dasar harga berlaku adalah sebagai berikut.

Tabel 1. 8.
Peranan Ekonomi Sektoral PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Tahun 2010 s/d 2015 (%)

No	Uraian	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,15	1,12	1,09	1,03	1,00	0,96
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
3	Industri Pengolahan	17,31	16,73	16,39	16,11	15,97	16,06
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,07	0,06	0,06	0,07
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23	0,22
6	Konstruksi	6,51	6,77	6,85	6,78	6,65	6,52
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	23,78	24,37	24,41	24,97	24,93	24,83
8	Transportasi dan Pergudangan	2,81	2,79	2,81	2,89	3,05	3,15
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,63	4,65	4,60	4,52	4,51	4,56
10	Informasi dan Komunikasi	14,48	14,19	14,08	13,89	13,73	13,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,35	8,66	9,40	9,87	10,23	10,37
12	Real Estate	2,51	2,58	2,57	2,59	2,57	2,69
13	Jasa Perusahaan	0,73	0,70	0,68	0,67	0,67	0,68
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,17	4,02	3,82	3,55	3,32	3,23
15	Jasa Pendidikan	7,53	7,51	7,65	7,67	7,87	7,88
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,18	1,21	1,20	1,24	1,29
17	Jasa Lainnya	4,26	4,13	3,87	3,71	3,74	3,80
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

PDRB perkapita menurut lapangan usaha sebagai berikut :

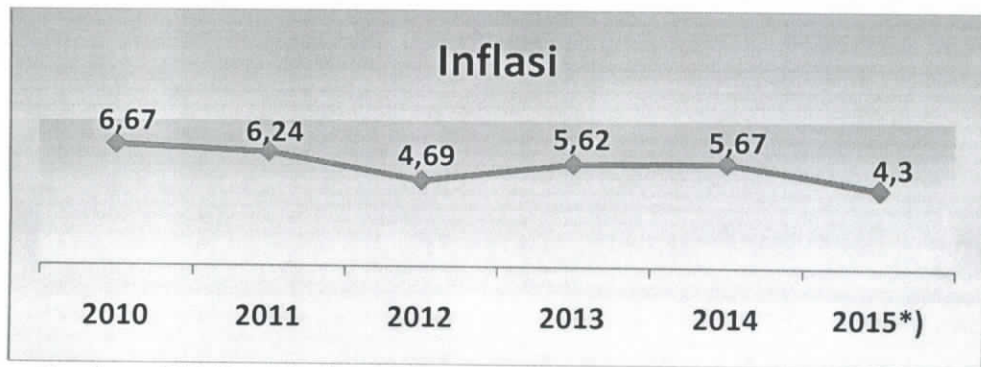
Tabel 1. 9.
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha (Juta Rp.)
Tahun 2010 s/d 2014

NO	URAIAN	TAHUN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,41	0,44	0,48	0,50	0,53
2	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Industri Pengolahan	6,16	6,63	7,17	7,76	8,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12
6	Konstruksi	2,32	2,68	3,00	3,27	3,51
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Sepeda Motor	8,46	9,66	10,67	12,03	13,17
8	Transportasi dan Pergudangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,00	1,11	1,23	1,39	1,61
10	Informasi dan Komuniasi	1,65	1,84	2,01	2,18	2,38
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,15	5,62	6,15	6,69	7,25
12	Real Estate	2,97	3,43	4,11	4,75	5,40
13	Jasa Perusahaan	0,89	1,02	1,12	1,25	1,36
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,26	0,28	0,30	0,32	0,35
15	Jasa Pendidikan	1,48	1,59	1,67	1,71	1,76
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,68	2,98	3,34	3,70	4,16
17	Jasa Lainnya	0,41	0,47	0,53	0,58	0,65
PDRB		35,57	39,63	43,71	48,19	52,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Inflasi merupakan salah satu indikator makro yang mengukur perkembangan kenaikan harga secara umum dalam periode tertentu serta dapat berimplikasi pada kemampuan daya beli masyarakat. Deviasi antara pertumbuhan pendapatan dan tingkat inflasi memberikan gambaran umum mengenai kekuatan daya beli masyarakat. Lebih detail, inflasi di Kota Madiun dapat dilihat dalam gambar berikut.

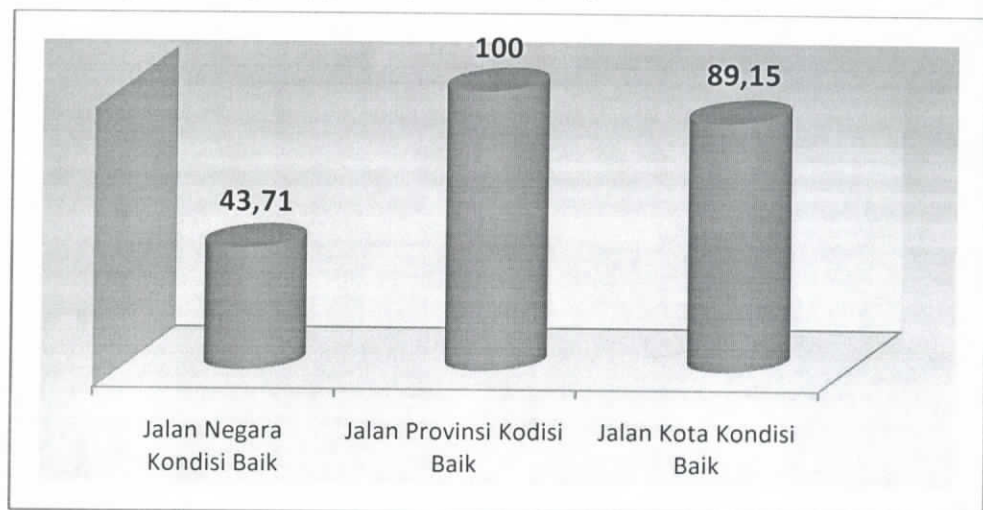


Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016
*) angka sementara

Gambar 1. 4.
Tingkat Inflasi Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2015 (%)

b. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Perkembangan fasilitas wilayah/infrastruktur daerah salah satunya dapat dilihat dari ketersediaan jalan. Jalan yang ada di Kota Madiun terdiri dari jalan negara, jalan provinsi dan jalan kota.

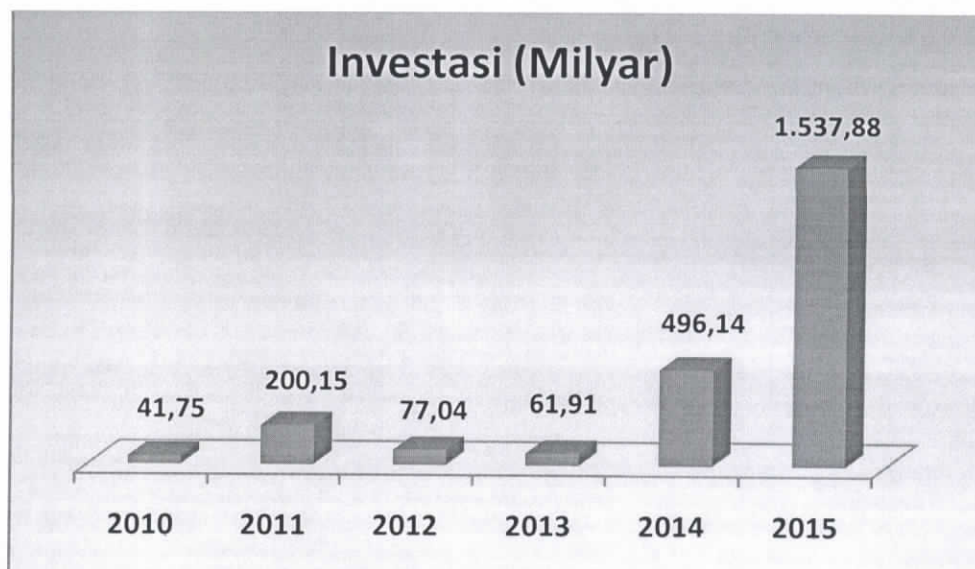


Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 5.
Prosentase panjang Jalan Negara, Provinsi dan Kota Madiun Tahun 2015

c. Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, maka penyelenggaraan urusan Penanaman Modal di Kota Madiun diarahkan untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal yang mendukung potensi perdagangan dalam rangka menunjang sasaran meningkatnya kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kota Madiun. Penyelenggaraan kegiatan urusan penanaman modal (investasi) di Kota Madiun saat ini masih berada dalam sub bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah Kota Madiun dan belum memiliki unit kerja khusus di Pemerintah Kota Madiun.



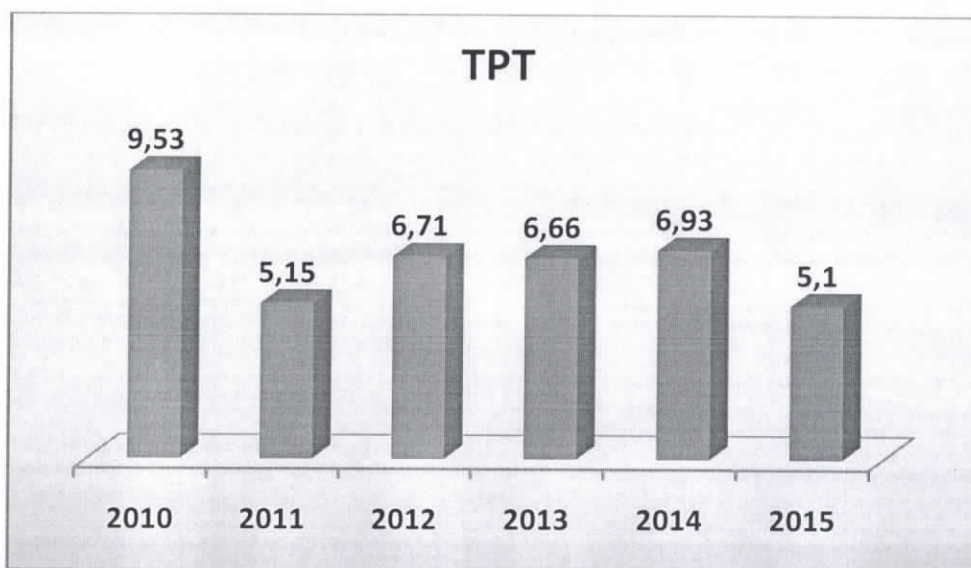
Sumber: Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 6.

Perkembangan Jumlah Investasi Kota Madiun Tahun 2010 – 2015

d. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari capaian tingkat pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Menurunnya Tingkat Kemiskinan.



Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2016

Gambar 1. 7.

Tren Tingkat pengangguran Terbuka Kota Madiun Tahun 2010 – 2015

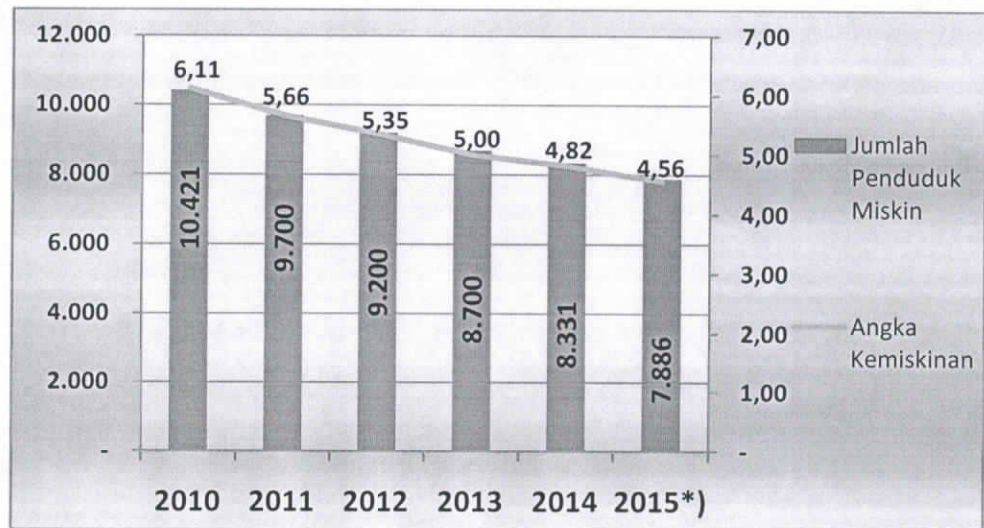
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Madiun dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kemajuan tersebut terlihat dari peningkatan semua komponen penyusun IPM yaitu Angka Harapan Hidup, Tingkat Pendidikan dan Kemampuan Daya Beli. Kemajuan pembangunan manusia di Kota Madiun tersebut mengindikasikan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan sudah cukup baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa mendatang.

Tabel 1. 10.
Perkembangan IPM Kota Madiun Tahun 2010 s/d 2014

Indeks	Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014
IPM	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81
Indeks Kesehatan	0,80	0,80	0,81	0,81	0,81
Angka Harapan Hidup	72,23	72,72	72,33	72,38	72,41
Indeks Pendidikan	0,69	0,70	0,70	0,73	0,74
Angka Harapan Lama Sekolah	12,42	12,44	12,56	13,33	13,64
Rata-rata Lama Sekolah	10,32	10,50	10,68	10,86	10,90
Indeks PPP	0,79	0,80	0,81	0,82	0,82
Daya Beli (Rp)	13.455,16	13.799,03	14.317,08	14.603,96	14.634,42

Sumber : BPS Kota Madiun, Tahun 2016

IPM Kota Madiun pada Tahun 2014 mencapai 78,81 atau naik sebesar 0,40 poin dibanding tahun 2013 yang mencapai 78,41. Secara umum dapat dikatakan bahwa angka IPM yang naik menandakan pembangunan manusia di Kota Madiun mengalami kemajuan menuju ke arah yang lebih baik.



Sumber : BPS, diolah

Gambar 1. 8.
Tren Penurunan Tingkat Kemiskinan Kota Madiun Tahun 2010 – 2015

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun tingkat kemiskinan di Kota Madiun mengalami penurunan, dengan menggunakan teknik penghitungan Trendline Linear tabel di atas menunjukkan Tahun 2015 berada pada angka 4,56% angka tersebut turun 0,26% dari Tahun 2014 yang mencapai angka 4,82%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Program Pembangunan Daerah Khususnya yang berhubungan dengan Penurunan Tingkat Kemiskinan telah berhasil diwujudkan dari Tahun ke Tahun.

BAB II

EVALUASI HASIL RKPD

Sebagaimana dituangkan dalam bab sebelumnya bahwa sebagai upaya untuk melakukan sinkronisasi terhadap perkembangan yang terjadi maka dalam dokumen perencanaan penganggaran dimungkinkan untuk dilakukannya perubahan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011, memberikan penjelasan bahwa Kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD kedalam Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD untuk menjaga konsistensi maka RKPD juga perlu dilakukan perubahan. Perubahan ini dimaksudkan agar tercapai integrasi program dan kegiatan mulai RKPD, KUA dan PPAS serta APBD, berdasarkan perubahan asumsi-asumsi seperti pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam RKPD.

Perubahan RKPD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah menuntut daerah untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien. Untuk menyikapi hal tersebut maka diperlukan perubahan-perubahan asumsi-asumsi RKPD Kota Madiun Tahun 2016 didasarkan pada beberapa perkembangan kondisi nasional, regional maupun kondisi daerah. Perkembangan tersebut disebabkan antara lain adanya perubahan pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan sebesar 5,3%, yang berarti tidak mengalami perubahan dari APBN 2016 yang ditetapkan sebesar 5,3%, juga mendasarkan adanya asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun Tahun 2016 yang diproyeksikan sebesar 7,45 %, mengalami perubahan karena adanya perubahan tahun dasar perhitungan yang sebelumnya tahun dasar 2000 sekarang tahun dasar 2010, dan sektornya juga mengalami perubahan, maka pertumbuhan ekonomi Kota Madiun diproyeksikan 6,11% yang diharapkan akan mampu dipacu melalui peningkatan investasi dan adanya keserasian pengelolaan APBD.

Selain itu Perubahan RKPD tahun 2016 didasarkan pada upaya sinkronisasi program dan kegiatan, antara program dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RKPD tahun 2016 dengan program dan sasaran baik di tingkat nasional maupun provinsi, dimana pada tahun 2016 masih diupayakan optimalisasi pencapaiannya. Perubahan ini juga didasarkan pada upaya percepatan pencapaian sasaran dan program dimana percepatan pencapaian program dan sasaran ini lebih ditujukan pada program prioritas yang menyangkut antara lain :

- a. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan;
- b. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan;
- c. Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah;
- d. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- e. Peningkatan Pelayanan Publik;
- f. Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup.

Upaya pencapaian program prioritas ini seiring dengan tuntutan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian dan Lembaga.

2.1 Perubahan Asumsi Dasar Perubahan RKPD Tahun 2016

2.1.1. Perubahan Asumsi Dasar APBN-P 2016

Tantangan eksternal yang dihadapi oleh perekonomian domestik pada tahun 2016 adalah belum stabilnya perekonomian dunia, termasuk negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok yang diperkirakan akan kembali mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Kondisi tersebut yang disertai dengan penurunan harga komoditas global terutama harga minyak mentah dunia berpotensi memberikan tekanan pada perekonomian Indonesia.

Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya mendukung perbaikan defisit neraca berjalan.

Berdasarkan perkembangan terkini dari perekonomian global, domestik, dan berbagai kebijakan yang telah diambil Pemerintah, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian terhadap beberapa asumsi dasar ekonomi makro dari APBN tahun 2016. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah mengusulkan perubahan atas asumsi dasar ekonomi makro tahun 2016, sebagai berikut :

1) Pertumbuhan ekonomi dari 5,3 persen tetap menjadi 5,3 persen.

Tantangan dari perekonomian global yang diperkirakan masih cukup berat telah diantisipasi dengan terus berjalannya reformasi fiskal yang menitikberatkan pada realokasi belanja untuk mendorong pembangunan yang lebih produktif. Realokasi dana subsidi BBM dan program penghematan belanja pemerintah yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan belanja yang lebih produktif seperti pendidikan dan kesehatan diharapkan mampu mempertahankan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,3 persen

2) Inflasi dari 4,7 persen menjadi 4,0 persen.

Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat.

3) Nilai tukar dari Rp 13.900/US\$ menjadi Rp 13.500/US\$.

Pada tahun 2015 nilai tukar rupiah terdepresiasi ke level rata-rata Rp 13.392 per dolar AS. Dari sisi eksternal, isu kebijakan kenaikan suku bunga the Fed serta devaluasi yuan oleh Pemerintah Tiongkok menjadi penyebab utama yang berpengaruh terhadap aliran modal yang masuk ke negara-negara *emerging market* termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan tekanan terhadap nilai tukar menjadi semakin besar. Dari sisi domestik, beberapa faktor yang mempengaruhi tekanan terhadap rupiah diantaranya terkait dengan upaya perbaikan kinerja dari transaksi berjalan, serta tren penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai imbas perlambatan ekonomi dunia turut memberi tekanan. Di awal tahun 2016, dinamika rupiah dipengaruhi oleh sentimen pasar terkait dengan suku bunga acuan the Fed, kebijakan suku bunga negatif ECB dan BoJ, relatif rendahnya tingkat inflasi, serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Sementara itu, faktor positif lain dari sisi domestik seperti penurunan suku bunga acuan BI, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah.

Namun demikian, pergerakan nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2016 masih menghadapi beberapa risiko eksternal seperti potensi kenaikan suku bunga the Fed pada semester kedua, pelonggaran likuiditas di kawasan Eropa dan Jepang, serta pengaruh moderasi pasar keuangan Tiongkok. Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp 13.500 per dolar AS, lebih rendah dibandingkan asumsi nilai tukar dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar Rp13.900 per dolar AS

4) Tingkat suku bunga surat perbendaharaan negara (SPN) 3 bulan sebesar 5,5 persen tetap menjadi 5,5 persen.

Di awal tahun 2016, pergerakan suku bunga SPN 3 bulan hingga April rata-rata mencapai 5,8 persen sedikit menurun dibandingkan rata-rata pada tahun 2015. Penurunan ini didorong oleh relatif stabilnya rupiah, rendahnya inflasi, penurunan suku bunga acuan BI serta meningkatnya minat investor seiring dengan membaiknya proyeksi perekonomian domestik. Peningkatan minat investor ini tercermin dalam *net foreignbuying* SBN sampai dengan 31 Maret mencapai Rp 47,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp42,7 triliun. Sementara penurunan suku bunga acuan dimotori oleh kebijakan suku bunga negatif di kawasan Eropa dan Jepang serta mulai stabilnya rupiah di awal tahun. Ke depan, kinerja SPN 3 bulan masih akan dipengaruhi oleh dinamisnya perekonomian global yang berasal dari efek jangka panjang kebijakan suku bunga negatif yang dilakukan oleh Jepang, moderasi pasar keuangan Tiongkok, serta potensi kenaikan suku bunga the Fed yang diperkirakan terjadi di semester kedua tahun 2016. Sementara itu relatif stabilnya rupiah, penurunan suku bunga acuan BI, inflasi yang terjaga serta membaiknya perekonomian dari sisi domestik diharapkan mampu tetap menarik minat investor. Dengan berbagai faktor tersebut, intermediasi keuangan diharapkan akan semakin efisien, sehingga suku bunga SPN 3 bulan sepanjang tahun 2016 dipertahankan berada pada kisaran 5,5 persen, setara dengan angka dalam APBN tahun 2016.

5) Harga minyak Indonesia (ICP) US\$ 50,0 per barel menjadi US\$ 35,0 per barel .

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US\$ 35 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US\$ 50 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi

6) Lifting minyak dari 830 ribu barel per hari menjadi 810 ribu barel per hari.

Lifting minyak diperkirakan akan terealisasi sebesar 810 ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari.

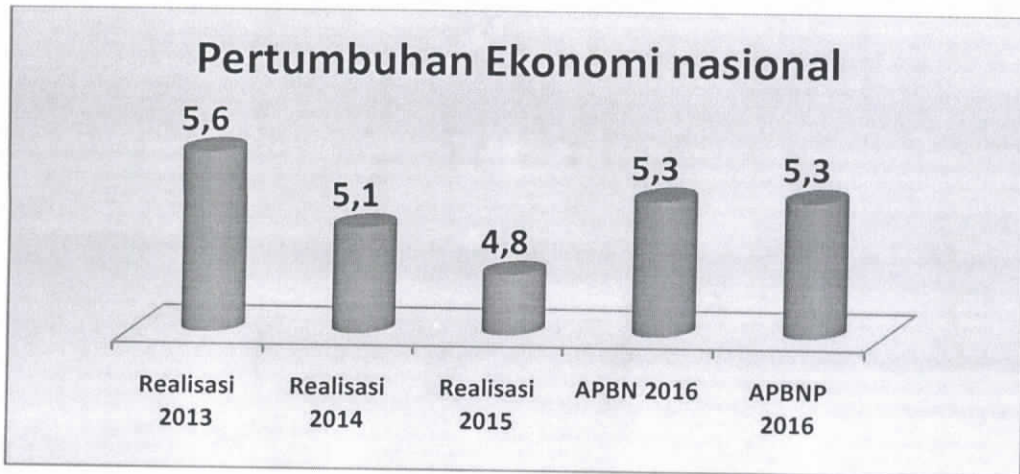
7) Lifting gas dari 1.155 ribu barel per hari menjadi 1.115 ribu barel per hari.

Lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.115 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 1.155 ribu barel setara minyak per hari.

Tabel. 2.1
Asumsi Indikator Makro Ekonomi APBNP 2015

Indikator	APBN	APBN-P
- Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3	5,3
- Inflasi (%) y-o-y	4,7	4,0
- Nilai tukar (Rp/USD)	13.900	13.500
- Suku bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,5
- Harga minyak Mentah (US\$/barrel)	50	35
- Lifting Minyak (ribu barrel/hari)	830	810
- Lifting Gas (ribu barel setara minyak/hari)	1.155	1.115

Perekonomian domestik pada tahun 2016 diperkirakan meningkat seiring dengan realisasi pembangunan infrastruktur dan dorongan dari konsumsi pemerintah yang lebih efektif dan efisien serta relatif terjaganya konsumsi rumah tangga. Peningkatan belanja infrastruktur yang merupakan program lanjutan yang telah dimulai sejak tahun 2015, diharapkan dapat memberi manfaat yang lebih besar dalam proses pembangunan. Dari sisi global, perdagangan dunia diperkirakan meningkat meskipun tidak terlalu signifikan. Kondisi ini diharapkan dapat memberikan dorongan aktivitas ekonomi global yang pada gilirannya juga dapat mendukung kinerja ekonomi domestik. Meskipun demikian, masih terdapat risiko-risiko ekonomi yang patut diwaspadai sehingga mampu memberikan pengaruh terhadap kinerja perekonomian nasional seperti perekonomian Tiongkok yang diperkirakan tumbuh moderat dan perkiraan harga komoditas yang masih cukup rendah. Berdasarkan kondisi tersebut, pertumbuhan ekonomi dalam RAPBNP tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,3 persen, sama dengan perkiraan dalam APBN tahun 2016.



Sumber : Kementerian Keuangan dan BPS 2016

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional 2013-2016

Pada tahun 2015, konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,0 persen, sedikit lebih rendah dari realisasi tahun 2014 yang mencapai 5,2 persen. Tingkat inflasi yang relatif terkendali di sepanjang tahun dan adanya Pemilukada pada akhir tahun 2015 di beberapa daerah mampu menjaga kinerja pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam RAPBNP tahun 2016 diperkirakan sebesar 5,1 persen sama dengan perkiraan dalam APBN tahun 2016. Stabilitas harga, terutama harga bahan pokok menjadi kunci utama dalam menjaga daya beli masyarakat. Upaya untuk menjaga tingkat konsumsi dalam negeri juga dilaksanakan melalui beberapa program bantuan sosial secara berkesinambungan seperti program Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Di samping itu, Pemerintah juga memperluas cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta Keluarga Sangat Miskin (KSM) serta memberi Tunjangan Hari Raya kepada PNS, TNI, dan Polri, serta Pensiunan. Kebijakan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dimulai sejak Januari 2016 juga diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Penyesuaian batas PTKP merupakan salah satu bentuk stimulus pajak (*tax cut policy*) yang bertujuan untuk mendorong konsumsi masyarakat ditengah pelemahan ekonomi.

Sepanjang tahun 2015 konsumsi Pemerintah tumbuh 5,4 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang hanya tumbuh sebesar 1,2 persen. Pertumbuhan konsumsi Pemerintah yang relatif tinggi didorong oleh besarnya serapan belanja Pemerintah seiring berjalannya proyek pembangunan infrastruktur. Selain itu, percepatan proses lelang serta tingginya belanja modal dan barang menjadi faktor pendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah. Dalam RAPBNP tahun 2016, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sebesar 6,0 persen.

Pertumbuhan tersebut didukung oleh kebijakan relaksasi pengadaan yang telah dimulai sejak akhir 2015, telah selesainya proses perubahan nomenklatur di berbagai Kementerian Negara/Lembaga, dan pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPRA) untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Disamping itu, proses pembangunan infrastruktur yang masih berjalan, peningkatan jumlah transfer ke daerah, serta pemenuhan anggaran pendidikan dan kesehatan diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan konsumsi pemerintah tahun 2016.

Kinerja PMTB tahun 2015 menunjukkan kondisi yang cukup baik. PMTB mampu tumbuh 5,1 persen, lebih tinggi dari tahun 2014 yang mencapai 4,6 persen. Hal ini terutama ditopang oleh pembangunan proyek-proyek infrastruktur serta upaya berkesinambungan yang dilakukan Pemerintah dalam memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing industri. PMTB pada tahun 2016 diperkirakan tumbuh sekitar 6,3 persen, lebih tinggi dibandingkan perkiraan APBN tahun 2016 yang sebesar 6,2 persen. Hal ini terutama didorong oleh akselerasi proyek-proyek infrastruktur dan sebagai dampak implementasi Paket-Paket Kebijakan Ekonomi Pemerintah yang mulai digulirkan sejak bulan September 2015 yang hasilnya mulai dirasakan di tahun 2016. Seperti diketahui, Paket-Paket Kebijakan Ekonomi menitikberatkan pada penguatan sektor industri manufaktur, percepatan dan penyederhanaan prosedur investasi, serta penguatan pembangunan infrastruktur. Selain itu, penguatan PMTB di tahun 2016 juga diperkirakan sebagai dampak positif semakin kondusifnya iklim investasi di Indonesia yang terlihat dari perbaikan peringkat Indonesia di Survei Kemudahan Berusaha yang akan menciptakan sentimen positif bagi dunia usaha dan investasi di Indonesia. Revisi regulasi terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) juga diharapkan menjadi faktor pendorong kinerja investasi.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor-impor tahun 2015 tercatat mengalami pertumbuhan negatif sebesar -2,0 persen dan -5,8 persen. Pelemahan ekonomi global dan penurunan harga komoditas menjadi faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor-impor Indonesia. Dalam RAPBNP tahun 2016, ekspor dan impor masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 0,1 persen dan 0,4 persen. Perkiraan ekonomi global yang membaik dan volume permintaan dunia yang meningkat diharapkan akan mendorong kinerja ekspor impor. Pembangunan infrastruktur juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik sehingga memperlancar arus perdagangan. Untuk itu, kebijakan ekspor nasional diarahkan untuk meningkatkan daya saing dengan peningkatan ekspor produk bernilai tambah tinggi. Namun, risiko berupa rendahnya harga komoditas dan moderasi pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama menjadi tantangan dalam mendorong kinerja ekspor dan impor.

Tabel. 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Penggunaan
Tahun 2015 – 2016 (persen, y-o-y)

URAIAN	2015	2016	
	REALISASI	APBN	RAPBNP
Pengeluaran			
1. Konsumsi Rumah Tangga	5,0	5,1	5,1
2. Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT)	-0,6	2,0	6,2
3. Konsumsi Pemerintah	5,4	5,7	6,0
4. PMTB	5,1	6,2	6,3
5. Ekspor	-2,0	2,2	0,1
6. Impor	-5,8	2,0	0,4
Produk Domestik Bruto	4,8	5,3	5,3

Sumber : Kementerian Keuangan, Bappenas dan BPS

2.1.2 Perubahan Laju Inflasi

Pada Maret 2016 Kota Madiun mengalami inflasi 0,08 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 120,77. Dari 8 kota penghitung inflasi nasional di Provinsi Jawa Timur 6 (enam) kota mengalami inflasi dan 2 (dua) kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Kediri sebesar 0,09 persen dengan IHK sebesar 121,77. Inflasi terendah terjadi di Kota Malang sebesar 0,02 persen dengan IHK sebesar 123,69. Kota Probolinggo dan Kabupaten Sumenep mengalami deflasi masing masing sebesar -0,08 persen dan -0,27 persen dengan IHK masing masing 121,54 dan 120,80.

Inflasi Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh adanya perubahan indeks pada kelompok Bahan Makanan sebesar 0,35 persen, Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,21 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,24 persen, kelompok sandang sebesar 0,51 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen, kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,05 persen dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Tingkat inflasi tahun kalender Maret (Januari 2016-Maret 2016) dan inflasi tahun ke tahun (Maret 2016 terhadap Maret 2015) sebesar 0,61 dan 3,67.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perubahan harga (inflasi/deflasi) di tingkat konsumen, khususnya di daerah perkotaan. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket komoditas yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Di Indonesia, tingkat inflasi diukur dari persentase perubahan IHK.

Inflasi di Kota Madiun terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh adanya perubahan indeks pada pada kelompok Bahan Makanan sebesar 0,35 persen; Makanan Jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar -0,24 persen; kelompok sandang sebesar 0,51 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,11 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 0,05 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar -0,03 persen.

Inflasi bulan Maret 2016 dipengaruhi oleh kenaikan harga pada komoditas bawang merah, cabai rawit, bawang putih, papaya, dan cabai merah. Komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain: daging ayam ras, telur ayam ras, beras, semen dan tarif listrik.

Berdasarkan kelompok komoditas, terdapat 5 kelompok yang memberikan andil positif terhadap inflasi yang terjadi pada bulan Maret diantaranya: Kelompok bahan makanan memberikan andil sebesar 0,0684 persen, kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau sebesar 0,0392 persen, kelompok sandang sebesar 0,0293 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,0064 persen dan kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga sebesar 0,0050 persen. Sedangkan kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan bakar dan kelompok Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan menekan inflasi dengan andil masing-masing -0,0588 persen dan -0,0047 persen.

Tabel 2.3.

IHK dan Tingkat Inflasi Kota Madiun Maret 2016, Tahun Kalender 2016, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran		IHK Februari 2015	IHK Desember 2015	IHK Maret 2016	Inflasi Maret 2016 (1)	Laju Inflasi Tahun Kalender 2016 (2)	Inflasi Tahun ke Tahun (3)
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Umum (Headline)	120,04	116,49	120,77	0,08	0,61	3,67
1	Bahan Makanan	121,39	119,13	123,35	0,35	1,61	3,54
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	125,52	116,76	126,55	0,21	0,82	5,77
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	119,08	109,41	119,96	-0,24	0,74	2,74
4	Sandang	111,98	111,32	113,88	0,51	1,70	4,09
5	Kesehatan	114,64	113,84	115,29	0,11	0,57	3,57
6	Pendidikan, Rekreasi dan Olah Raga	117,17	115,47	113,74	0,025	0,26	3,6819
7	Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	120,22		118,97	-0,03	-1,04	3,03

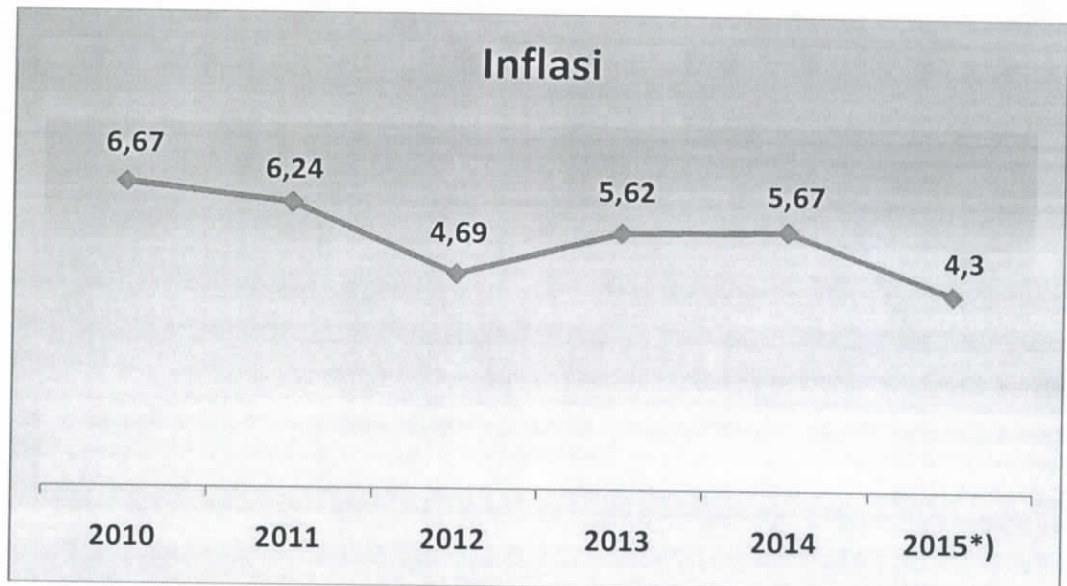
(1) Persentase perubahan IHK Maret 2016 terhadap IHK bulan sebelumnya

(2) Persentase Perubahan IHK Maret 2016 terhadap IHK Januari 2016

(3) Persentase perubahan IHK Maret 2016 terhadap IHK Maret 2015

Sumber : BPS Kota Madiun, 2016

Berdasarkan PDRB Kota Madiun, tingkat inflasi Kota Madiun tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,37 dibanding tahun 2014 yaitu dari 5,67% menjadi 4,630%. Tingkat inflasi di Kota Madiun pada tahun 2010-2015 digambarkan sebagaimana pada tabel berikut.



Sumber: BPS Kota Madiun
*) Angka Sementara

Gambar 2.2
Tingkat Inflasi Berdasarkan PDRB Kota Madiun Tahun 2010-2015 (%)

2.1.3 Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai yang dihasilkan sektor usaha yang melakukan usahanya di suatu wilayah/regional. Dengan demikian PDRB secara agregat dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan / balas jasa terhadap faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tersebut.

PDRB dapat dihitung berdasarkan harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Hal ini digunakan untuk melihat gejolak harga pada tahun berjalan dan perkembangan ekonomi dari tahun ke tahun. Di bawah ini nilai PDRB Kota Madiun dihitung atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan tahun 2015 dengan tahun dasar 2010.

Tabel. 2.4
Perbandingan Nilai PDRB Tahun 2015 (Milyar Rupiah)

No	Uraian	ADHB*) (Milyar)	ADHK*) (Milyar)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	97,9	75,4
2	Pertambangan dan Penggalian	2,5	2,0
3	Industri Pengolahan	1.636,8	1.448,6
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6,7	6,4
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	22,6	18,4
6	Konstruksi	664,1	539,0
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	2.530,3	1.981,7
8	Transportasi dan Pergudangan	321,2	242,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	464,8	407,8
10	Informasi dan Komuniasi	1.393,9	1.332,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56,6	780,7
12	Real Estate	274,0	217,7
13	Jasa Perusahaan	69,3	61,4
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	329,4	281,4
15	Jasa Pendidikan	803,0	623,5
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	131,1	107,8
17	Jasa Lainnya	387,2	320,2
PDRB		10.191,7	8.447,4

Sumber : BPS Kota Madiun

*) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kota Madiun pada tahun 2015 mencapai 6,05% atau melambat dibandingkan tahun 2014 sebesar 6,62%, karena dipengaruhi berbagai faktor perekonomian. Pertumbuhan terjadi pada seluruh sektor usaha, di mana sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial merupakan sektor yang mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 9,35 persen. Posisi berikutnya, diikuti Jasa Perusahaan sebesar 8,41%. Kemudian, sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,13%. Dari kondisi tersebut ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan jika dibandingkan dengan Tahun 2014 yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Lainnya.

Selain itu pertumbuhan ekonomi Indonesia juga melambat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang memicu perlambatan tersebut. Secara garis besar, mengapa pertumbuhan melambat ada empat hal :

1. Konsumsi rumah tangga, pembelian masyarakat atas barang dan jasa menurun karena daya beli masyarakat juga menurun.
2. Investasi dalam negeri yang menurun dan dibanyak sektor bahkan berhenti.
3. Nilai ekspor komoditi dalam negeri menurun, meski ada sejumlah komoditas volume ekspornya masih tetap, tapi nilainya menurun karena sejumlah komoditas harganya jatuh. Misalnya minyak bumi, batu bara, kelapa sawit dan karet. Karena kita produsen utama atas komoditas-komoditas itu, maka perolehan negara dari ekspor kita menurun
4. pembelanjaan pemerintah belum optimal

Tabel. 2.5
Nilai Laju Pertumbuhan Ekonomi

NO	URAIAN	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015*)
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,96	2,93	0,7	0,98	1,58
2	Pertambangan dan Penggalian	8,09	1,99	3,69	1,69	1,98
3	Industri Pengolahan	4,52	5,30	7,57	7,78	6,49
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,54	8,97	4,13	3,15	3,47
5	Pengadaan Air dan Pengolahan Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,58	4,08	4,68	2,15	2,58
6	Konstruksi	8,93	6,59	7,69	4,98	3,66
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Persewaan Mobil dan Motor	6,79	7,84	7,91	5,46	4,56
8	Transportasi dan Pergudangan	7,83	6,05	7,18	8,45	6,78
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,61	6,63	7,77	7,28	7,28
10	Informasi dan Komunikasi	8,37	9,11	9,45	8,13	8,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,92	9,15	11,61	7,81	7,52
12	Real Estate	8,99	6,95	7,28	6,76	6,76
13	Jasa Perusahaan	4,24	5,43	7,48	8,41	8,41
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,60	1,38	1,00	0,78	3,88
15	Jasa Pendidikan	5,70	6,01	6,08	7,71	6,30
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,64	9,48	6,50	7,87	9,35
17	Jasa Lainnya	4,47	3,21	4,25	5,35	4,28
PDRB		6,79	6,83	7,68	6,62	6,05

Sumber: BPS Kota Madiun, Tahun 2016

*) angka sementara

Tabel. 2.6
Prospek dan Prediksi Kinerja Pembangunan Kota Madiun

Indikator	Real 2012	Real 2013	Real 2014	Real 2015*)	Proyeksi 2016 M	Proyeksi 2016 P
Pertumbuhan Ekonomi	6,83	7,68	6,62	6,05	7,45	6,11
PDRB ADHB (Milyar Rp)	7.533,6	8.390,4	9.214,2	10.191,7	9.245,5	10.974,91
PDRB ADHK (Milyar Rp)	6.937,7	7.470,7	7.965,5	8.447,4	3.210,2	9.389,57
PDRB per Kapita (Juta Rp)	43,71	48,19	52,84	58,24	48,07	60,55
TPT (%)	6,71	6,66	6,93	5,1	6,5	4,8
IPM	77,50	78,17	78,64	79,15	79,20	79,66
Inflasi	4,69	5,62	5,67	4,3	5 ± 1%	5 ± 1%
Kemiskinan (%)	5,30	5,00	4,80	4,56	5,29	4,38

2.1.4.Lain-lain asumsi

Beberapa hal yang menyebabkan Perubahan Asumsi dasar Perubahan RKPD Tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

a. Yang menyebabkan perubahan pada sisi pendapatan yaitu sebagai berikut :

- Didapati adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2015 sebesar **Rp 339.135.179.352,77.**
- Besaran Pendapatan Daerah yang telah tertuang dalam APBD tahun anggaran 2016, disusun berdasarkan prakiraan terhadap asumsi besaran pendapatan pada tahun anggaran sebelumnya. Sehingga diperlukan penyempurnaan untuk lebih merasionalisasi potensi pendapatan daerah yang sebenarnya, dengan berdasarkan realisasi yang telah berjalan beberapa bulan, yang pada akhirnya diharapkan akan dapat diperoleh besaran Pendapatan Daerah yang lebih riil sesuai dengan potensi yang ada.
- Adanya Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 903/12.846/202/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi Jawa Timur tahun 2016 sebesar **Rp. 1.670.630.000,00.**
- Dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan ke Tiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit tentara Nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan penerima pensiun atau tunjangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tambahan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian negara Republik Indonesia,

Pejabat Negara. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis pemberian Gaji ke Tiga Belas dan Tunjangan Hari Raya tahun 2016.

- Adanya Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-10 / MK.07/ 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara Mandiri tahun anggaran 2016 sebesar 10% (sepuluh persen) dari total Pagu alokasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, yaitu sebesar **Rp. 9.567.060.000,00**.
- Adanya surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tentang Petunjuk teknis penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada APBD tahun anggaran 2016, ditindaklanjuti dengan Perubahan Peraturan Walikota Nomor 2 tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD tahun anggaran 2016 sebesar **Rp. 113.302.456.000,16**.
- Adanya surat dari Gubernur Jawa Timur Nomor 970/49379/120.23/2015 tentang informasi Alokasi Sementara Bagi Hasil Pajak untuk Kabupaten/Kota berdasarkan Target penerimaan Kas Tahun Anggaran 2016.

b. Yang menyebabkan perubahan pada sisi belanja yaitu sebagai berikut :

- Penambahan Tunjangan Hari Raya Tahun 2016 (Gaji ke 14) pegawai.
- Pengurangan belanja Pembangunan Gedung DPRD dan belanja Pengadaan Sarpras DPRD sebesar **Rp. 20.575.000.000,00** dan **RP. 265.063.000,00**
- Dana Cadangan PILKADA **Rp. 10.000.000.000,00**.

2.2 Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran serta tidak perlu dibayar kembali.

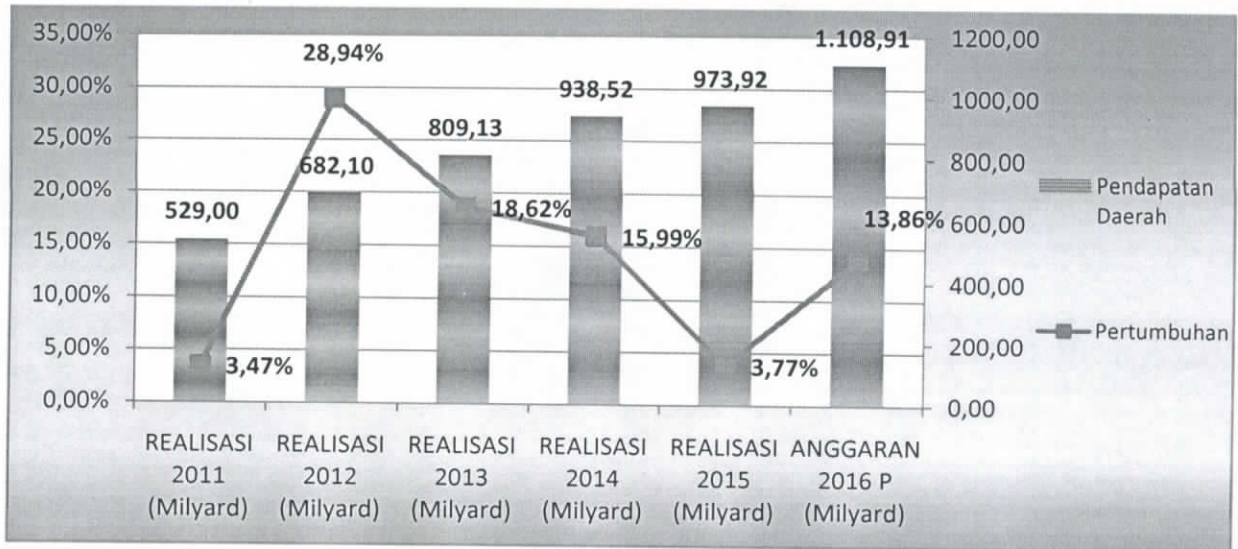
Tabel. 2.7
Pendapatan dan Perubahan Pendapatan

KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	132.435.377.000,00	150.755.282.000,00	18.319.905.000,00	13,83%
1.1.1.	Pajak Daerah	50.000.000.000,00	57.000.000.000,00	7.000.000.000,00	14,00%
1.1.2.	Retribusi Daerah	13.969.711.000,00	14.050.161.000,00	80.450.000,00	0,58%
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.621.407.000,00	9.621.407.000,00	0,00	
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	58.844.259.000,00	70.083.714.000,00	11.239.455.000,00	19,10%
1.2.	Dana Perimbangan	593.152.373.000,00	854.867.497.160,00	261.715.124.160,00	44,12%
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak	24.768.358.000,00	62.097.702.000,00	37.329.344.000,00	150,71%
1.2.2.	Bagi Hasil Bukan Pajak	27.751.042.000,00	70.278.735.000,00	42.527.693.000,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Umum	511.357.289.000,00	511.357.289.000,00	0,00	0,00%
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	95.640.600.000,00	199.378.994.160,00	103.738.394.160,00	108,47%
1.2.5.	Dana Bagi Hasil Cukai	11.754.777.000,00	11.754.777.000,00	0,00	0,00%
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	234.097.330.000,00	103.285.273.000,00	(130.812.057.000,00)	-55,88%
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.807.406.000,00	60.648.410.000,00	1.841.004.000,00	3,13%
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	173.438.474.000,00	40.996.233.000,00	(132.442.241.000,00)	-76,36%
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.851.450.000,00	1.640.630.000,00	(210.820.000,00)	-11,39%
	Jumlah Pendapatan	1.037.804.773.000,00	1.108.908.052.160,00	71.103.279.160,00	6,85%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

Dari tabel diatas nampak bahwa jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat, menurun dan tetap adalah:

- ❖ Jenis pendapatan yang diproyeksi meningkat: Pajak Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak , Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Khusus, DBH pajak dari provinsi.
- ❖ jenis pendapatan yang diproyeksi menurun Dana Penyesuaian Otonomi khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi.
- ❖ Jenis pendapatan yang diproyeksi tetap adalah Retribusi Daerah, Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, DAU, DBHCHT, Retribusi Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan



Gambar 2.3
Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Pertumbuhannya

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah terletak pada potensi pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah pada tahun 2016 beserta dinamika yang terjadi didalam tahun berjalan. Potensi pendapatan daerah tersebut antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

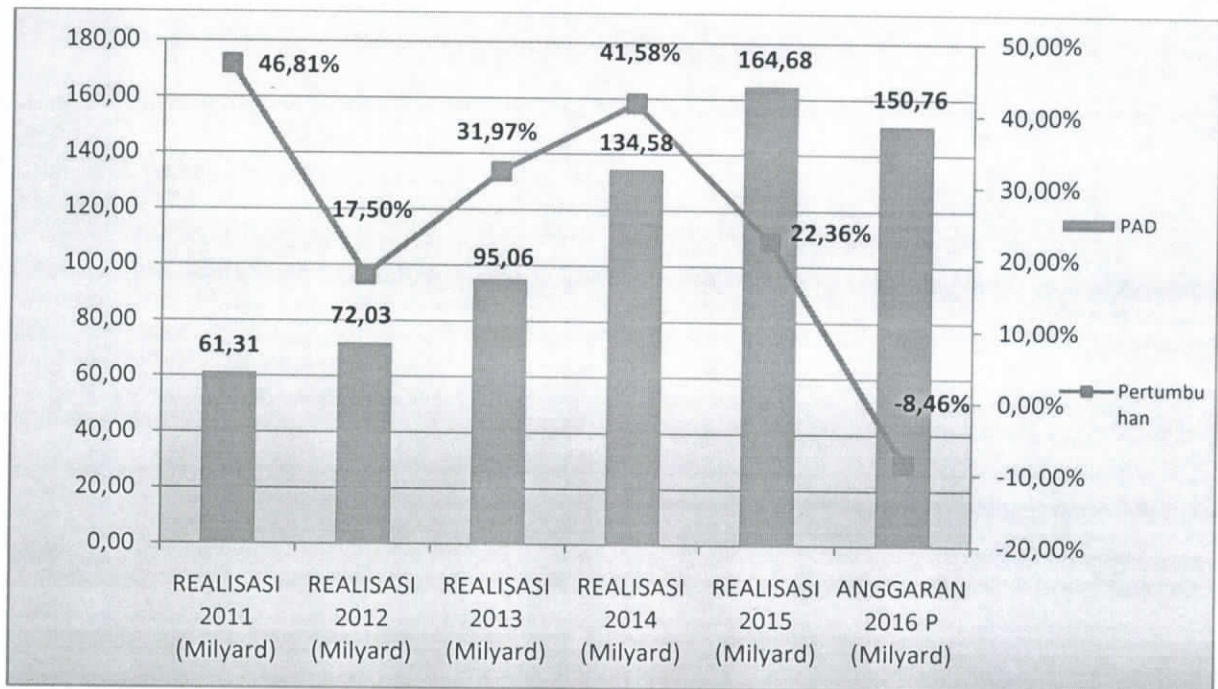
Disamping sumber-sumber penerimaan pendapatan yang bersumber dari Dana Perimbangan yang menjadi hak daerah, maka Kota Madiun juga mampu secara bertahap mengoptimalkan penerimaan pendapatan yang bersumber dari PAD sesuai dengan potensi riil yang ada, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan yang diberlakukan, serta tidak menjadi beban berat bagi wajib pajak ataupun wajib retribusi di Daerah.

Dengan adanya ketetapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang salah satu tujuannya adalah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan obyek pajak daerah dan retribusi daerah, serta kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. Pemerintah Kota Madiun telah berupaya melaksanakannya dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah, dan mulai Tahun 2014 pelaksanaan pemungutan PBB sudah diserahkan ke daerah.

Upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD maupun efektifitas pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dari Dana Perimbangan yang terus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya pada sisi pendayagunaannya dikelola secara proporsional dan profesional,

Adapun kebijakan yang dilaksanakan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah adalah, bahwa PAD sebagian didayagunakan untuk memenuhi Kedudukan Keuangan Walikota, Wakil Walikota dan DPRD, dan selebihnya direncanakan untuk membiayai Belanja Langsung yakni kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan PAD sampai akhir Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan mampu mencapai Rp. 150.755.282.000,00 yang artinya mengalami kenaikan sebesar Rp. 17.241.260.000,00 atau naik sebesar 13,83 % dari target pendapatan pada APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 132.435.377.000,00.

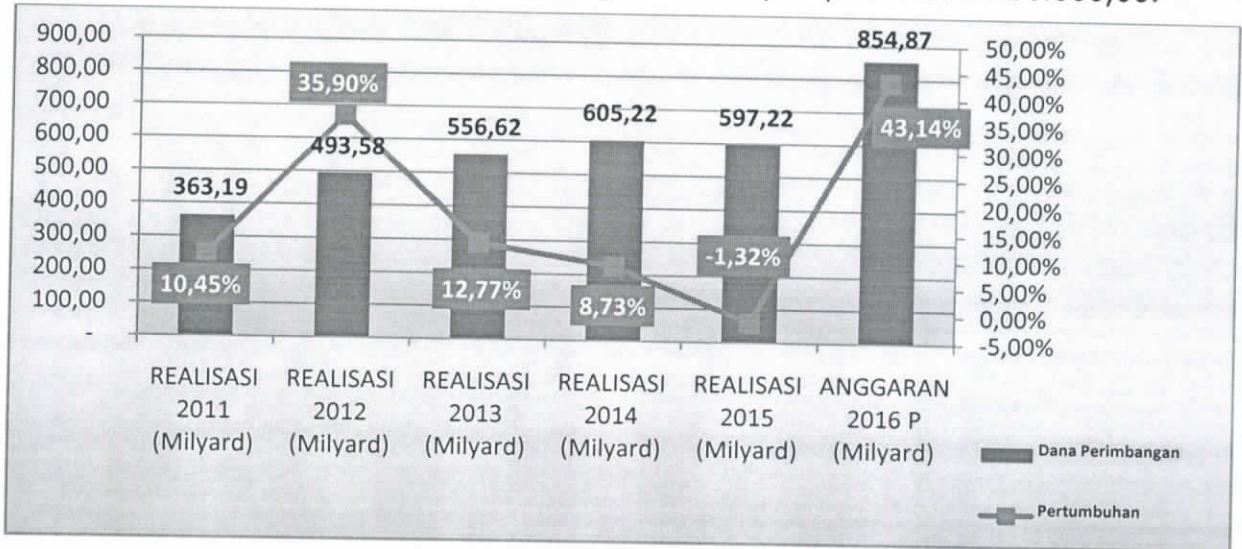


Gambar 2.4
PAD dan Pertumbuhannya

2. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antara pemerintah daerah, yang dialokasikan berupa Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Jumlah dana perimbangan yang dialokasikan untuk Kota Madiun dan telah ditetapkan dalam APBD 2016 sampai dengan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran ini mengalami kenaikan sebesar 27,35 % yaitu sebesar Rp. 854.867.000.000,00 yang sebelumnya Rp. 671.272.066.000,00.

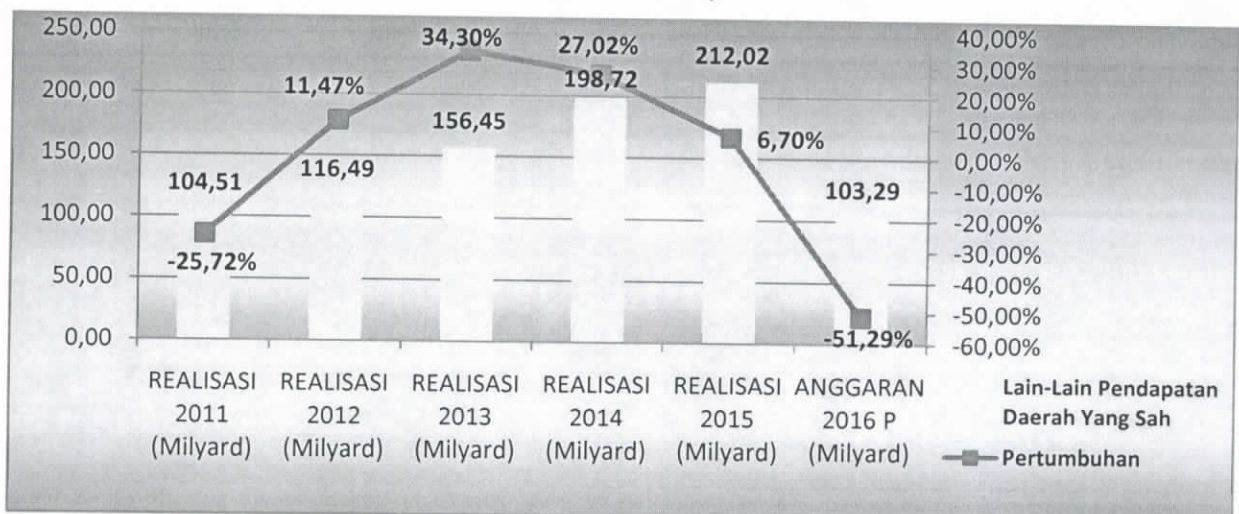


Gambar 2.5
Dana Perimbangan dan Pertumbuhannya

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

Perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu adanya penurunan sebesar Rp. 130.812.057.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 55,88% dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 234.097.330.000,00 menjadi Rp. 103.285.273.000,00, penurunan ini berasal dari Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.



Gambar 2.6
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Pertumbuhannya

2.3 Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Sebagai konsekuensi penerapan prinsip keadilan anggaran, maka rencana perubahan dilakukan dengan melakukan penambahan, pengurangan dan penggeseran kredit anggaran belanja daerah dengan tetap mengedepankan sistem belanja yang berbasis anggaran kinerja yakni suatu sistem anggaran belanja yang mengedepankan capaian hasil dari dana yang tersedia. Selanjutnya harus mampu mencerminkan pengeluaran-pengeluaran yang adil dan proporsional serta hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat.

Penetapan rencana perubahan belanja daerah, pada umumnya diarahkan untuk menyempurnakan rencana kerja yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2016. Karena adanya faktor keterbatasan data, waktu serta alokasi dana yang ada, Rencana Kerja dimaksud belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya.

Tabel. 2.8
Belanja dan Perubahan Belanja

KOD E	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622.593.244.000,00	714.874.496.402,77	92.281.252.402,77	14,82%
2.1.1.	Belanja Pegawai	563.894.055.000,00	585.304.902.000,00	21.410.847.000,00	3,80%
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.	Belanja Hibah	19.076.688.000,00	19.076.688.000,00	0,00	0,00%
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.695.900.000,00	7.695.900.000,00	0,00	0,00%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	0,00	
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	627.851.000,00	627.851.000,00	0,00	0,00%
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	31.298.750.000,00	102.169.155.402,77	70.870.405.402,77	226,43%
2.2.	BELANJA LANGSUNG	682.625.503.000,00	723.168.735.110,00	40.543.232.110,00	5,94%
2.2.1.	Belanja Pegawai	59.197.127.000,00	62.713.026.786,00	3.515.899.786,00	5,94%
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.578.211.000,00	303.598.974.032,00	17.020.763.032,00	5,94%
2.2.3.	Belanja Modal	336.850.165.000,00	356.856.734.292,00	20.006.569.292,00	5,94%
	JUMLAH BELANJA	1.305.218.747.000,00	1.438.043.231.512,77	132.824.484.512,77	10,18%
	SURPLUS / (DEFISIT)	(267.413.974.000,00)	(329.135.179.352,77)	(61.721.205.352,77)	23,08%

Sumber : BPKAD Kota Madiun

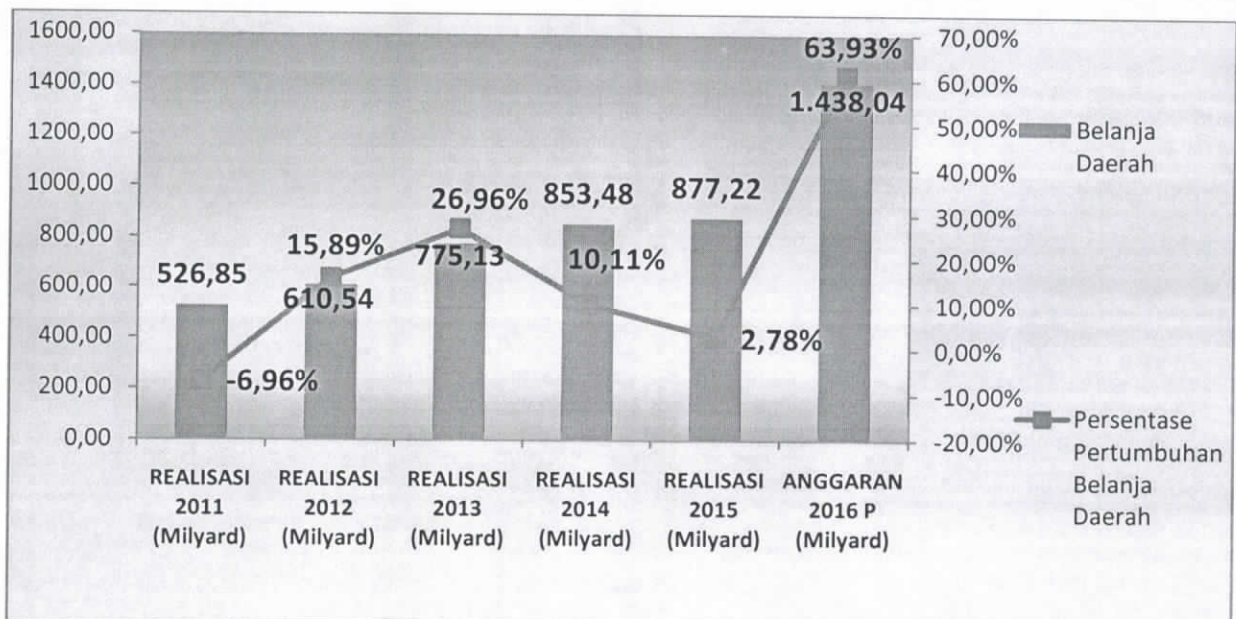
Perubahan kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terjadi pada Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung bertambah sebesar Rp. 92.281.252.402,77 atau naik sebesar 14,82% dari anggaran sebelumnya sebesar Rp. 622.593.244.000,00 menjadi Rp. 714.874.496.402,77. Tambahan Belanja Tidak Langsung paling besar digunakan untuk mencukupi kebutuhan Belanja Pegawai.

Belanja Langsung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar Rp. 40.543.232.110,00 yang berarti kenaikannya mencapai 5,94% dari APBD Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 682.625.503.000,00 menjadi Rp. 723.168.735.110,00. Kenaikan anggaran tersebut digunakan sebagai tambahan Belanja Program dan Kegiatan pada setiap SKPD sebagai upaya mengoptimalkan pencapaian hasil prioritas pembangunan dan merealisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah.

Tabel program prioritas yang akan didanai dalam APBD perubahan beserta target kinerjanya berdasarkan RPJMD, RKPD tahun 2016 dan RKPD perubahan 2016 sebagai dasar perubahan anggaran, sebagai berikut.

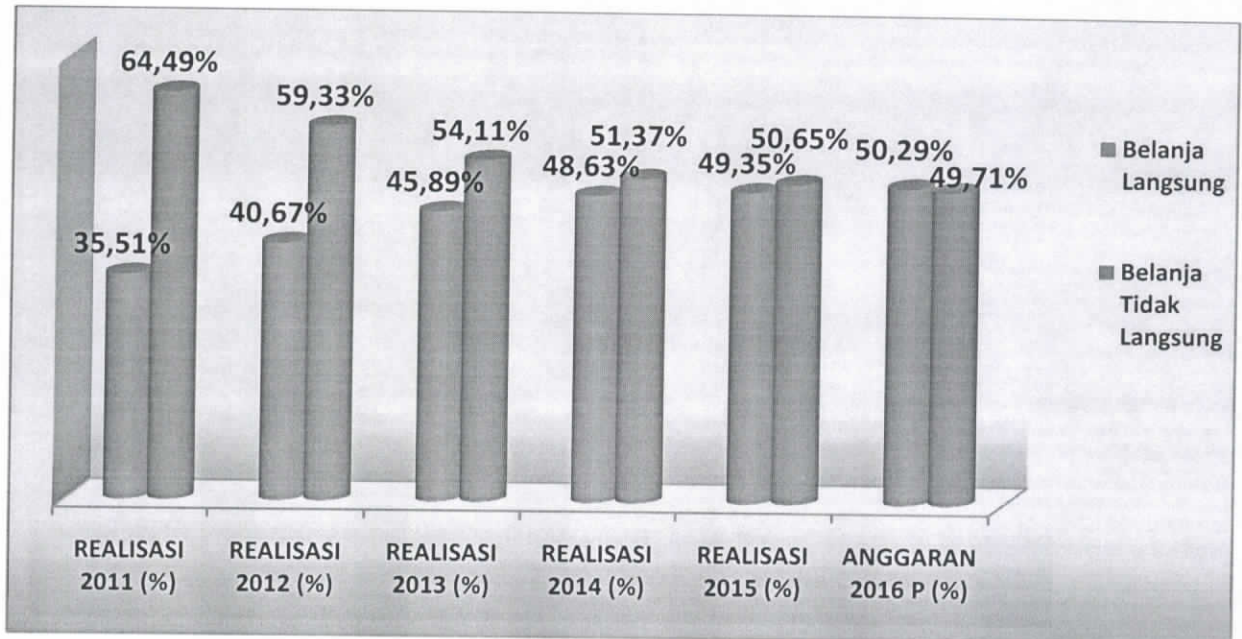
Tabel. 2.9
Program Prioritas RPJMD, RKPD 2015 dan RKPD Perubahan 2015

NO	PROGRAM PRIORITAS (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH THN 2016 (RKPD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH THN 2016 (PERUBAHAN RKPD)
1	Meningkatnya Kuaitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kesehatan	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Kesehatan
3	Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Peningkatan Ekonomi Masyarakat (iklim investasi, penguatan lembga ekonomi serta pemberdayaan masyarakat)	Peningkatan Ekonomi Masyarakat (iklim investasi, penguatan lembga ekonomi serta pemberdayaan masyarakat)
4	Meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan memperluas cakupan keluarga berencana	Penurunan Angka Kemiskinan	Penurunan Angka Kemiskinan
5	Maningkatkan Kualitas Pelayanan dasar Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
6	Meningkatnya penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan infrastruktur kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya saing daerah	Peningkatan infrastruktur kota untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan daya saing daerah



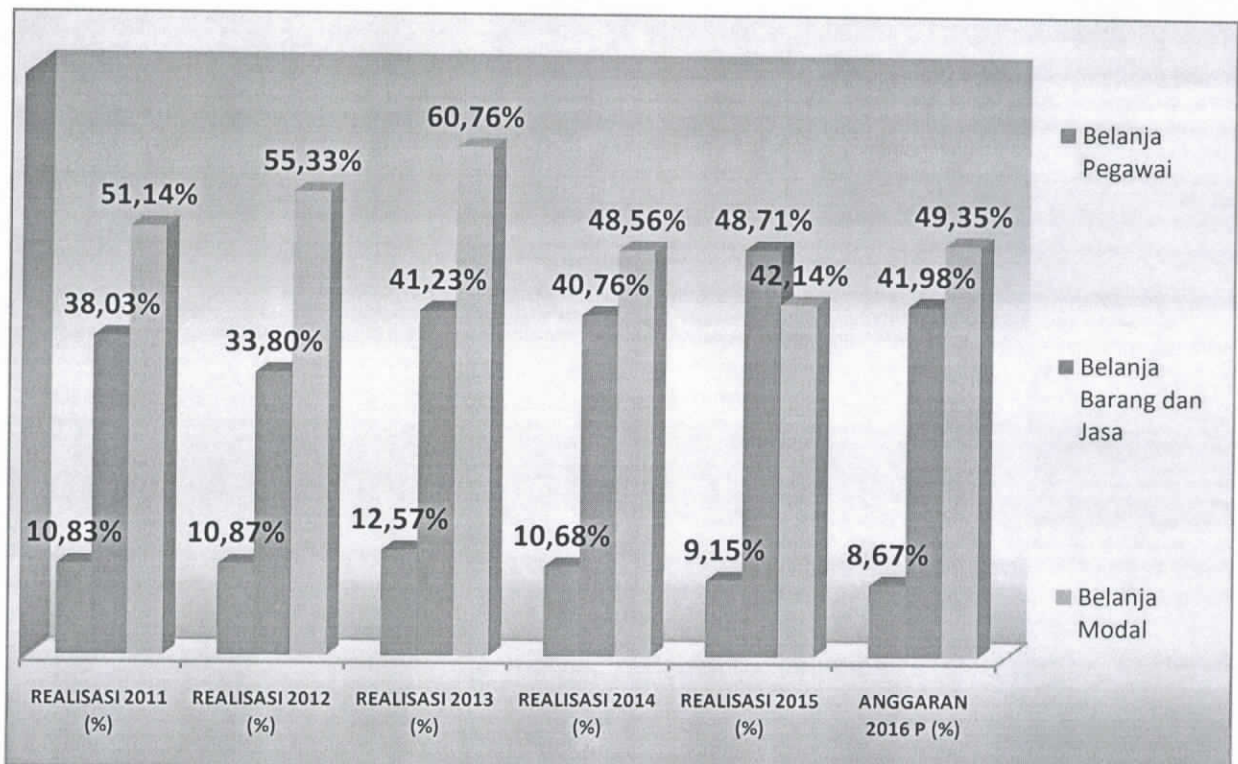
Gambar 2.7
Belanja Daerah dan Pertumbuhannya

Tren belanja daerah tahun 2016 dalam KUPA dan PPAS-P cukup progresif dimana belanja daerah dialokasikan tumbuh 63,93%, pertumbuhan yang cukup tinggi tersebut menunjukkan perencanaan anggaran yang konsisten dengan tahun pemantapan pembangunan sesuai RPJMD 2014-2019.



Gambar 2.8
Komposisi Belanja Daerah

Komposisi belanja daerah antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung juga menunjukkan tren yang semakin baik, dimana tahun 2016 setelah perubahan komposisinya Belanja Tidak Langsung 49,71% dan Belanja Langsung 50,29%.



Gambar 2.9
Komposisi Belanja Langsung

2.4 Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah

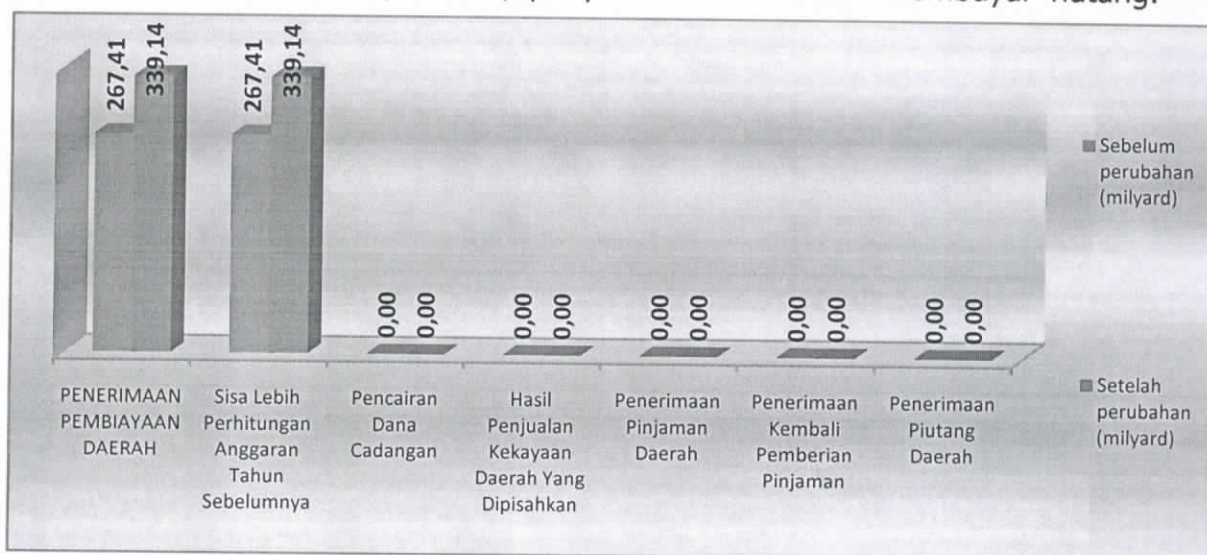
Pembiayaan, merupakan bagian anggaran yang dipergunakan untuk mengadministrasikan Standar Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), yaitu untuk menampung "Transaksi Keuangan" guna menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, apabila terjadi defisit anggaran, maka ditutup dengan pembiayaan yang bersumber dari obyek Penerimaan Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Penerimaan Pembiayaan dengan nomenklatur : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi Surplus Anggaran, maka pemanfaatannya dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagaimana Obyek Pengeluaran Pembiayaan yang dialokasikan pada sisi Pengeluaran Pembiayaan dengan nomenklatur : Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.

Tabel. 2.10
Pembiayaan dan Perubahan Pembiayaan

KODE	URAIAN	JUMLAH		Bertambah/ Berkurang	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	267.413.974.000,00	339.135.179.352,77	71.721.205.352,77	26,82%
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	267.413.974.000,00	339.135.179.352,77	71.721.205.352,77	26,82%
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00	0,00	
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAHPEMBIAYAAN NETO	267.413.974.000,00	329.135.179.352,77	61.721.205.352,77	23,08%
	SILPA	0,00	0,00	0,00	

Untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan Keuangan Daerah yang tertuang dalam APBD beserta perubahannya, maka dari sisi Kebijakan Pembiayaan akan diarahkan untuk menutup defisit anggaran antara Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal serta pembayaran hutang. Dari sisi Penerimaan Pembiayaan, diarahkan untuk mendayagunakan sepenuhnya SiLPA tahun anggaran 2016 untuk menutup defisit anggaran. Kebijakan yang dilakukan diupayakan untuk menjaga stabilitas dan keseimbangan keuangan daerah dengan kemampuan keuangan daerah yang ada dan tidak mencari dana dari luar, seperti pinjaman atau yang lainnya.

Pengeluaran Pembiayaan tahun anggaran 2016 yang diperoleh dari SiLPA tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 267.413.974.000,00 setelah dilakukan perhitungan maka terdapat SiLPA Rp. 339.135.179.352,77 yang akan digunakan untuk menutup defisit, penyertaan modal dan membayar hutang.



Gambar 2.10
Penerimaan Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan



Gambar 2.11
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sebelum Perubahan dan Sesudah Perubahan

2.5 Realisasi Anggaran APBD Tahun 2016 Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi Anggaran pelaksanaan APBD tahun 2016 sampai dengan triwulan kedua adalah sebagai berikut :

Tabel 2.11
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2016
Sampai Dengan 10 Juni 2016

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	LEBIH/KURANG	
				%	Rp
1	2	3	4	5	6
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	132.435.377.000,00	68.437.913.254,40	51,68%	(63.997.463.745,60)
1.1.1.	Pajak Daerah	50.000.000.000,00	23.523.599.381,28	47,05%	(26.476.400.618,72)
1.1.2.	Retribusi Daerah	13.969.711.000,00	4.815.400.743,00	34,47%	(9.154.310.257,00)
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.621.407.000,00	11.894.693.877,40	123,63%	2.273.286.877,40
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	58.844.259.000,00	28.204.219.252,72	47,93%	(30.640.039.747,28)
1.2.	Dana Perimbangan	671.272.066.000,00	345.717.582.789,00	51,50%	(325.554.483.211,00)
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak	52.519.400.000,00	22.272.640.389,00	42,41%	(30.246.759.611,00)
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	511.357.289.000,00	255.687.636.000,00	50,00%	(255.669.653.000,00)
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	95.640.600.000,00	64.132.917.000,00	67,06%	(31.507.683.000,00)
1.2.4.	Dana Bagi Hasil Cukai	11.754.777.000,00	3.624.389.400,00	30,83%	(8.130.387.600,00)
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	234.097.330.000,00	32.548.930.704,00	13,90%	(201.548.399.296,00)
1.3.1.	Pendapatan Hibah	0,00	0,00		0,00
1.3.2.	Pendapatan Darurat	0,00	0,00		0,00
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya	58.807.406.000,00	11.213.433.704,00	19,07%	(47.593.972.296,00)
1.3.4.	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	173.438.474.000,00	20.498.117.000,00	11,82%	(152.940.357.000,00)
1.3.5.	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.851.450.000,00	837.380.000,00	45,23%	(1.014.070.000,00)
	Jumlah Pendapatan	1.037.804.773.000,00	446.704.426.747,40	43,04%	(591.100.346.252,60)
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	622.593.244.000,00	185.218.831.952,00	29,75%	(437.374.412.048,00)
2.1.1.	Belanja Pegawai	563.894.055.000,00	185.218.831.952,00	32,85%	(378.675.223.048,00)
2.1.2.	Belanja Bunga	0,00	0,00		0,00
2.1.3.	Belanja Subsidi	0,00	0,00		0,00
2.1.4.	Belanja Hibah	19.076.688.000,00	0,00	0,00%	(19.076.688.000,00)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	7.695.900.000,00	0,00	0,00%	(7.695.900.000,00)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00		0,00
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Partai Politik	627.851.000,00	0,00	0,00%	(627.851.000,00)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	31.298.750.000,00	0,00	0,00%	(31.298.750.000,00)
2.2.	BELANJA LANGSUNG	682.625.503.000,00	102.092.486.718,00	14,96%	(580.533.016.282,00)
2.2.1.	Belanja Pegawai	59.197.127.000,00	14.101.281.140,00	23,82%	(45.095.845.860,00)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	286.578.211.000,00	77.089.149.515,00	26,90%	(209.489.061.485,00)
2.2.3.	Belanja Modal	336.850.165.000,00	10.902.056.063,00	3,24%	(325.948.108.937,00)

KODE	URAIAN	ANGGARAN 2016	REALISASI 2016	LEBIH/KURANG	
				%	Rp
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	1.305.218.747.000,00	287.311.318.670,00	22,01%	(1.017.907.428.330,00)
	SURPLUS / (DEFISIT)	(267.413.974.000,00)	159.393.108.077,40	-59,61%	426.807.082.077,40
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	267.413.974.000,00	0,00	0,00%	(267.413.974.000,00)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	267.413.974.000,00	0,00	0,00%	(267.413.974.000,00)
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00		0,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	0,00	0,00		0,00
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00		0,00
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00		0,00
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00		0,00
3.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	0,00		0,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00		0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00		0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Hutang	0,00	0,00		0,00
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00		0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	267.413.974.000,00	0,00	0,00%	(267.413.974.000,00)
3	SilPA Tahun Berjalan	0,00	159.393.108.077,40		159.393.108.077,40

Tabel 2.12
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2016 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016 (Tahun n-1)	Target Kinerja RKPD Tahun 2016 (Tahun n)	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2016 (Tahun n)		Capaian Target RPJMD s/d Triwulan II Tahun 2017 (tahun n)		SKPD Penganggung Jawab			
						Realisasi Kinerja RKPD	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)				
1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11			
1	URUSAN WAJIB												
1	1	1	1	0	1	0	1						
			1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lembaga	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	495	99	99	70	71%	169	34%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	0	1	0	1						
			2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Lembaga	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Unit	615	128	123	10	8%	138	22%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Lembaga	5	4	1	0	0%	4	80%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	0	1	0	1						
			3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	40	8	8	4	50%	12	30%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	1	1 0 1 0 1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket	5	0	1	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Paket	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1			Pendidikan									
1	1	1 0 1 0 1	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK								
			1	Kegiatan Entri Data Peserta Didik, PTK dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah	Jumlah Lembaga	141	141	141	0	0%	141	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN)	Jumlah Lembaga	49	49	49	0	0%	49	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru	Jumlah Lembaga	142	142	142	0	0%	142	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Kegiatan Asistensi Pelatihan Web/updating data pendidikan	Jumlah Dokumen	25	5	5	0	0%	5	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			5	Kegiatan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Bidang Kesenian	Jumlah Dokumen	10	2	2	0	0%	2	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Operasional BOS Tingkat Kota	Jumlah Lembaga	142	141	142	141	99%	282	199%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			7	Pelaksanaan Ujian Nasional	Jumlah Lembaga	62	167	162	162	100%	329	531%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			8	Pembinaan Komite Sekolah dalam Pengelolaan Sumber Daya Pendidikan	Jumlah Orang	1580	316	316	0	0%	316	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			9	Pengembangan dan Implementasi Informasi Pendidikan Berbasis IT	Jumlah Lembaga	142	141	142	0	0%	141	99%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			10	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendidikan	Jumlah Lembaga	253	236	253	125	49%	361	143%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			11	Pelaksanaan USBN Pendidikan Agama	Jumlah Lembaga	168	141	168	168	100%	309	184%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			12	Kegiatan Pendampingan Psikolog Siswa Jenjang PAUD, SD, SMP, SM	Jumlah Siswa	7943	7341	7943	7900	99%	15241	192%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			13	Kegiatan Operasional BOS Madrasah Diniyah (BOSDA MADIN) BK Prov	Jumlah Lembaga	49	49	49	0	0%	49	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	10101	6	Program Pendidikan Menengah	Angka Partisipasi Murni SMA/SMK								
			1	Olimpiade Sain	Jumlah Siswa	2500	400	400	400	100%	800	32%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Lomba Karya Ilmiah	Jumlah Siswa	1350	200	270	0	0%	200	15%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Olimpiade Olah Raga Siswa	Jumlah Lembaga	60	12	12	0	0%	12	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Lomba Debat Bahasa Inggris	Jumlah Lembaga	210	42	42	0	0%	42	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			5	Operasional Wajar Dikmen 12 Tahun	Jumlah Siswa	52070	31	10414	0	0%	31	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Lomba Kopetensi Siswa SMK	Jumlah Lembaga	150	30	30	0	0%	30	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			7	Peningkatan Kerjasama Dunia Usaha Dunia Industri	Jumlah Lembaga	150	30	30	0	0%	30	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			8	Try Out Unas SMA/SMK	Jumlah Lembaga	210	42	42	42	100%	84	40%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			9	Festival Lomba Seni Nasional	Jumlah Lembaga	60	12	12	0	0%	12	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1 0	Lomba Cerdas Cermat PKN, Pancasila, UUD 45, Tap MPR, Bhineka Tunggal Ika SMA/SMK	Jumlah Lembaga	210	42	42	0	0%	42	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 1	Beasiswa Bakat dan Prestasi Siswa TK, SD, SMP, SMA	Jumlah Lembaga	1300	260	260	0	0%	260	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 2	Jawara SMK	Jumlah Lembaga	150	30	30	0	0%	30	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 3	Lomba Siswa Teladan Tingkat SMA	Jumlah Lembaga	60	12	12	0	0%	12	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 5	Pembinaan KKG MGMP Mapel UN SMA dan SMK	Jumlah Guru	2005	401	401	100	25%	501	25%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 6	Kegiatan Sosialisasi dan Seleksi Bantuan Beasiswa Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	500	100	100	0	0%	100	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 1	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 1	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 2	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 2	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 3	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 3	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 4	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 4	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 5	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 5	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 6	Kegiatan Penyelenggaraan SMAN 6	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 7	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 1	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2 8	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 2	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 3	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 4	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMKN 5	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Workshop Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum SMA/SMK	Jumlah Guru	1500	0	300	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Pengembangan Sarana dan Prasarana SMK (DAK)	Jumlah Paket	60	1	4	0	0%	1	2%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Pengembangan Sarana dan Prasaran SMA (DAK)	Jumlah Paket	20	12	12	0	0%	12	60%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan LKS (BK Provinsi)			0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (BK Prov.)	Jumlah Lembaga		0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf								
			1	Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI)	Jumlah Lembaga	400	80	80	0	0%	80	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C	Jumlah Wajib Belajar	600	120	120	0	0%	120	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Gebyar PNF dalam Rangka Hari Aksara Internasional (HAI) BK Prov	Jumlah Lembaga	400	0	80	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional								

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Kegiatan Sertifikasi Guru	jumlah guru	1500	300	300	135	45%	435	29%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah Berprestasi dan OSN	jumlah orang	625	60	125	75	60%	135	22%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Pelatihan SDM Guru PAUD di Kota Madiun	jumlah guru	500	100	100	100	100%	200	40%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Kegiatan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah	jumlah kepala sekolah	780	156	156	0	0%	156	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			5	Bantuan Pendidikan S1/S2/S3 PGSD	jumlah guru	325	65	65	0	0%	65	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Pembinaan Tenaga Pendidik	Jumlah Guru	5000	1000	1000	100	10%	1100	22%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			7	Pelatihan Kompetensi Guru Kelas	Jumlah Guru	500	100	100	0	0%	100	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			9	Workshop Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)	Jumlah Guru	1275	255	255	255	100%	510	40%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 6	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru	Jumlah Guru	2500	500	500	210	42%	710	28%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1 7	Kegiatan Seleksi Guru Berprestasi Tingkat Kecamatan (BK Prov)	Jumlah Guru	0	0	9	9	100%	9	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1 0 1 0 1	1 9	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP								
			2	Penyelenggaraan SDN Kecamatan Taman	Jumlah Lembaga	19	20	19	0	0%	20	105%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Lomba Cerdas Cermat SD dan SMP	Jumlah Siswa	450	90	90	0	0%	90	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Sosialisasi Akreditasi Sekolah	Jumlah Lembaga	40	40	40	0	0%	40	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			5	Penyelenggaraan SMP Terbuka	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Uji Coba Ujian Nasional SD dan SMP	Jumlah Siswa	37106	7106	7500	7500	100%	14606	39%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			7	Pembinaan dan Pengelolaan Kantin Kejujuran SD dan SMP	Jumlah Lembaga	25	107	5	0	0%	107	428%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			8	Pembinaan Pengembangan Gugus TK, SD	Jumlah Gugus	34	33	34	0	0%	33	97%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			9	Best Practise Pendidikan Karakter	Jumlah Lembaga	460	92	92	0	0%	92	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			10	Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional	Jumlah Siswa	960	810	192	192	100%	1002	104%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			11	Komunitas Pembelajaran	Jumlah Peserta	1200	240	240	0	0%	240	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			12	Olimpiade Sains SD, SMP	Jumlah Peserta	1240	416	248	248	100%	664	54%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			13	Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Jumlah Lembaga	62	6	14	5	36%	11	18%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			14	Penjaminan Mutu	Jumlah Lembaga	460	92	92	0	0%	92	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			15	Pemberdayaan Tim Pengembang Kurikulum 2013 SD, SMP SMA/SMK Tahap I	Jumlah orang	941	134	0	0	#DIV/0!	134	14%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			16	Kegiatan Workshop Peningkatan Kualitas Pendidikan MGMP dan KKG	Jumlah Lembaga	485	97	97	0	0%	97	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			17	Hari Anak Nasional	Jumlah Siswa	325	65	65	0	0%	65	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			18	Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional	Jumlah Siswa	585	98	117	117	100%	215	37%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			19	Penyelenggaraan SDN Kecamatan Kartoharjo	Jumlah Lembaga	90	18	18	0	0%	18	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			20	Penyelenggaraan SDN Kecamatan Manguharjo	Jumlah Lembaga	100	20	20	0	0%	20	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			5	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			7	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			8	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			9	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			30	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			31	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			32	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			33	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			34	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Lembaga	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
				2	Lomba Vokal Keroncong dan Campur Sari	Jumlah paket	10	2	2	0	0%	2	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				3	Pekan Seni Pelajar Tingkat Propinsi Jawa Timur	Jumlah paket	5	19	1	1	100%	20	400%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				4	Festival Pedalangan dan Pembinaan Dalang Anak Tingkat Kota Madiun	Jumlah paket	10	2	2	1	50%	3	30%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	6	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan, Sarana penyelenggaraan seni dan budaya								
				1	Grebeg Maulud dan Pameran Seni Budaya	Jumlah paket	10	1	2	0	0%	1	10%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				2	Pentas Seni Secara Periodik, Car Free Day dan Car Free Night	Jumlah group	60	12	12	6	50%	18	30%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				3	Pegelaran Wayang Kulit	Jumlah paket	10	2	2	1	50%	3	30%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				4	Pelatihan Bahasa Jawa	Jumlah Peserta	500	132	100	0	0%	132	26%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				5	Festival Seni	Jumlah paket	10	2	2	1	50%	3	30%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				6	Festival Pedalangan Tingkat Provonsi	Jumlah paket	10	2	2	0	0%	2	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				7	Festival Seni Karawitan Anak Tingkat Kota dan Provinsi	Jumlah paket	10	250	2	0	0%	250	2500%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	7	Program Pengembangan Nilai Budaya	Seni Budaya Lokal yang dikompertisikan								
				1	Lomba Dongeng Kesejarahan Bagi Guru	Jumlah paket	5	1	1	100	10000%	101	2020%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
				2	Lomba Geguritan Pitutur Luhur	Jumlah Paket	5	1	1	100	10000%	101	2020%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Lomba Penulisan Naskah Macapat dan Tetembangan Tembang Macapat	Jumlah paket	5	1	1	100	10000%	101	2020%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Pagelaran HAN Tingkat Kota	Jumlah Paket	5	2000	1	0	0%	2000	40000%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			5	Pagelaran Tari Masal	Jumlah paket	5	1000	1	0	0%	1000	20000%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Sarasehan Budaya	Jumlah paket	5	150	1	0	0%	150	3000%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			7	Kegiatan Sosialisasi UU RI tentang Benda Cagar Budaya	Jumlah Orang	100	0	100	100	100%	100	100%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			8	Kegiatan Revitalisasi Benda Cagar Budaya	Jumlah Paket	4	0	1	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1			Pemuda dan Olah Raga									
1	1	1	1	Program Pembinaan Pemuda dan Olah Raga	Jumlah Prestasi Olah Raga Tingkat Regional dan Nasional								
			1	Lomba/Pertandingan dan Pembinaan Prestasi Olah Raga Antar Pelajar SD,SMP,SM Tingkat Kota	Jumlah cabang olah raga	70	14	14	14	100%	28	40%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Lomba Lingkungan Sekolah Sehat (LLSS)	Jumlah Lembaga	70	260	260	0	0%	260	371%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			4	Liga Pendidikan Sepak Bola (Tingkat SMP dan SMA/SMK)	Jumlah Lembaga	360	72	72	0	0%	72	20%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			5	Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Paskibraka	Jumlah Lembaga	360	72	72	72	100%	144	40%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			6	Hari Olah Raga Nasional	Jumlah orang	2500	300	500	0	0%	300	12%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			8	Gerakan Disiplin Siswa	jumlah lembaga	1310	0	262	0	0%	0	0%	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
			1	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	< 50/100.000 penduduk	122,29/100.000 penduduk	75/100.000 penduduk	59,22/100.000 penduduk	204%	59,22/100.000 penduduk	204%	Dinas Kesehatan	
			2	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	Prosentase Case Notification Rate pada TB	5%	13%	3%	-2%	-67%	-2%	-40%	Dinas Kesehatan	
			3	Kegiatan Pengendalian Penyakit Kusta dan Frambusia	Prosentase RFT Rate	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
			4	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Prosentase penemuan Kasus HIV	4%	2,24%	3,2%	0,77%	24%	0,77%	19%	Dinas Kesehatan	
			5	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)	Prosentase cakupan penyakit menular langsung yang ditemukan dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
			7	Kegiatan Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	Prosentase respon Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) kurang dari 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
			8	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2)	Prosentase cakupan penyakit bersumber binatang yang ditemukan dan ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya.	Prosentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya									
		0	1	1	Pengadaan Alat Kesehatan	Persentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas, laboratorium kesehatan dan jaringannya	97%	93%	93%	93%	100%	93%	96%	Dinas Kesehatan
				2	Pengelolaan Alat Kesehatan	Jumlah kunjungan monitoring, perbaikan dan pemeliharaan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
			1	0	Kegiatan Pembangunan Puskesmas Oro-oro Ombo	Jumlah Gedung	1 buah	0	1 buah	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

1				2		3		4		5		6		7		(8) = (7/6)		(9) = (5+7)		(10) = (9/4)		11	
				1	Rehabilitasi Puskesmas Tawangrejo	Persentase Bangunan Kesehatan sesuai standar	1 buah	0	1 buah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan				
				1	Pengadaan Kendaraan Distribusi Gudang Farmasi (DAK)	Jumlah Kendaraan	6 unit	0	6 unit	0	0%	0	0%	0	0	0%	0	Dinas Kesehatan					
1	2	1 0 2 0 1	2		Program Kesehatan Ibu	Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart																	
				1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan				
				2	Kegiatan Penanggulangan Masalah Gizi pada Ibu Hamil	Prosentase Ibu Hamil KEK tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan				
				3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Ibu Hamil	Prosentase Imunisasi TT pada Ibu Hamil	37%	33%	34%	9,38%	27,59%	9,38%	25,35%					Dinas Kesehatan					
1	2	1 0 2 0 1	2		Program Upaya Penyehatan Lingkungan	Prosentase TTU dan TPM sehat																	
				1	Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Prosentase TTU dan TPM Sehat	85%	81%	81%	58,21%	71,86%	58,21%	68,48%					Dinas Kesehatan					
				2	Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Prosentase Kelurahan Kawasan Sehat Mandiri	100%	29,63%	29,63%	22,22%	74,99%	22,22%	22,22%					Dinas Kesehatan					
				3	Kegiatan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman (PPSP)	Jumlah dokumen EHRA yang disusun	1 dokumen	0	1 dokumen	0	0	0	0					Dinas Kesehatan					
1	2	1 0 2 0 1	2		Program Kesehatan Bayi dan Balita	Prosentase Balita Gizi Kurang																	
				1	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Balita	Prosentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Dinas Kesehatan					
				2	Kegiatan Penanggulangan masalah gizi pada balita	Prosentase balita gizi kurang	10,90%	12,82%	12,22%	11,98%	98,0%	11,98%	109,91%					Dinas Kesehatan					
				3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Prosentase kelurahan yang mencapai UCI Kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					Dinas Kesehatan					

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	2	1	2	05	Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman	Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat								
				1	Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman	Prosentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	85%	75%	78%	38,26%	49,05%	38,26%	45,01%	Dinas Kesehatan
1	2	1	2	06	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI								
				1	Kegiatan Pengembangan media Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat	Prosentase Puskesmas dan Jaringannya memberikan promosi kesehatan minimal 12 kali	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	7 Jenis	50,00%	7 Jenis	50,00%	Dinas Kesehatan
				2	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Sekolah	Persentase Cakupan peningkatan upaya kesehatan sekolah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
				3	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan minimal satu kali dalam satu Tahun	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
				4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI	75%	60%	59%	40,74%	69,05%	40,74%	54,32%	Dinas Kesehatan
1	2	1	2	07	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun								
				1	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan data bidang kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
				2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun sesuai ketentuan	6 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	0	0	0	0	Dinas Kesehatan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Perda	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Manguharjo	Prosentase capaian kinerja mencapai target	84	80,04	80	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			5	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Patihan	Prosentase capaian kinerja mencapai target	82	79,05	79,5	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			6	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Demangan	Prosentase capaian kinerja mencapai target	81,51	81,11	81,39	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			7	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Banjarejo	Prosentase capaian kinerja mencapai target	80,8	80,6	80,6	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			8	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Oro-oro Ombo	Prosentase capaian kinerja mencapai target	85	81,75	82	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			9	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Masyarakat di puskesmas Tawangrejo	Prosentase capaian kinerja mencapai target	85	80,05	81	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			10	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan pada Gudang Perbekalan Kesehatan	Tersedianya biaya operasional gedung perbekalan	100%	100%	100%	50	50	50	50	Dinas Kesehatan
			11	Peningkatan Puskesmas Rawat Inap Menjadi Puskesmas Rawat Inap Standar (BK-Prov)	Jumlah Tenaga Dokter	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	Dinas Kesehatan
1	2	1	2	09	Program Upaya Pencegahan Masalah Kesehatan	Persentase Penduduk yang diskriminasi faktor resiko PTM							
			1	Kegiatan Skrining Kesehatan Anak Usia Sekolah	Prosentase jumlah siswa kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
			3	Kegiatan Upaya Kesehatan Khusus	Prosentase SD/MI yg melakukan Test Kebugaran pada Siswa Kelas IV	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Kesehatan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
			4	Kegiatan Upaya Kesehatan Reproduksi	Prosentase Skrining penduduk dewasa sesuai standar	100%	0	100%	2,68%	2,68%	2,68%	2,68%	Dinas Kesehatan	
			5	Kegiatan Upaya Kesehatan Lansia	Prosentase pengunjung berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan	65%	0	45%	6%	13,33%	6%	9,23%	Dinas Kesehatan	
			6	Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan	Prosentase penyediaan tenaga P3K sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan	
			7	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Prosentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	100%	0	64%	35,79%	55,92%	35,79%	35,79%	Dinas Kesehatan	
			8	Kegiatan Deteksi Dini Pencegahan Penyakit Tidak Menular (Pajak Rokok)	Prosentase jumlah penduduk usia > 20 th diskrlning faktor resiko PTM	30%	0	20%	6,92%	34,60%	6,92%	23,07%	Dinas Kesehatan	
1	2	1	3	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan									
		0	0	1	Kegiatan Peningkatan Profesionalisme dan Pengembangan Karir Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan profesional/berkompeten	532	352	440	332	75,45%	332	62,41%	Dinas Kesehatan
		2		2	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang mempunyai ijin	600	400	415	512	123,37%	512	85,33%	Dinas Kesehatan
		0		3	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase Puskesmas dan Klinik terakreditasi	85%	0	10%	0	0	0	0	Dinas Kesehatan
		1		4	Kegiatan Pembinaan dan Registrasi Sarana Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan	200	124	124	139	112,10%	139	69,50%	Dinas Kesehatan
				5	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan	Jumlah sarana pelayanan kesehatan rujukan yang dibina	8 RS/RSK	8 RS/RSK	8 RS/RSK	8 RS/RSK	100%	8 RS/RSK	100%	Dinas Kesehatan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11		
1	2	1	3	0	1	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah								
				1		Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	95%	75%	79%	10%	12,66%	10%	10,53%	Dinas Kesehatan
				2		Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Patihan	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	84%	74%	74%	9,86%	13,32%	9,86%	11,74%	Dinas Kesehatan
				3		Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Demangan	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	78%	60%	61%	11,79%	19,33%	11,79%	15,12%	Dinas Kesehatan
				4		Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Banjarejo	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	80%	70%	70%	3,94%	5,63%	3,94%	4,93%	Dinas Kesehatan
				5		Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Oro-oro Ombo	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	95%	75%	79%	76%	96,20%	76%	80,00%	Dinas Kesehatan
				6		Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Tawangrejo	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	95%	74%	75%	21,27%	28,36%	21,27%	22,39%	Dinas Kesehatan
2						URUSAN PILIHAN									
1						URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	0	2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
				1		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	257	49	49	53	108.16 %	102	39.69 %	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	2	1	3										
		0 2 0 2		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	60	12	13	6	46.15 %	18	30%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	0 2 0 2	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	9	5	5	0	0%	5	55.56 %	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
1	2			Kesehatan									
1	2	0 2 0 2	1	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar								
			1	Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	Jumlah bangunan rumah sakit yang direhab	4	1	1	0	0%	1	25%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	113	13	1	0	0%	13	11.5 %	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			9	Pembangunan Instalasi Oksigen Sentral	Jumlah instalasi oksigen sentral yang dibangun	1	0	1	0	0%	0	0%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			1	Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit (DAK)	Jumlah instalasi pengolahan air limbah rumah sakit yang dibangun	1	0	1	0	0%	0	0%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rokok)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	0	18	14	0	0%	18	0%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Kegiatan Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit (DBH-CHT)	Jenis Obat yang diadakan	48	16	16	16	100%	32	66.67 %	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DBH-CHT)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	0	17	6	0	0%	17	0%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diselesaikan	0	0	1	0	0%	0	0%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
			2	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	0	0	22	0	0%	0	0%	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	3	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah								
			7	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD RSUD	Jenis barang dan jasa yang disediakan	209	35	43	31	72.09 %	66	31.58 %	Kantor Rumah Sakit Umum Daerah
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	10	10	10	10	100%	20	200%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang dilaksanakan	125	21	108	21	19%	42	34%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	4	4	4	4	100%	8	200%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	22	3	22	3	14%	6	27%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	5	5	5	5	100%	10	200%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	2	1	3		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	7	7	7	4	57%	11	157%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1				Pemberdayaan Perempuan									
1	1	1	1		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Partisipasi angkatan kerja perempuan								
				2	Kegiatan Sosialisasi Kesetaraan Gender, dan KOnvensi Hak Anak	jumlah peserta sosialisasi	2500	500	500	500	100%	1000	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	partisipasi perempuan di lembaga swasta								
				1	Kegiatan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan	175	35	35	18	51%	53	30%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
				2	Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Perempuan	Jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan jumlah penerima BOP	4	6	6	6	100%	12	300%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
				3	Kegiatan Pemantapan Focal Point dan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender	jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan dokumen laporan	4	2	4	2	50%	4	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			5	Kegiatan Penyusunan Laporan Standart (SPM) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	Jumlah dokumen laporan SPM	5	1	1	0	0%	1	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			6	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah pertemuan gugus tugas dan forum anak serta dokumen laporan pengembangan KLA	4	3	4	1	25%	4	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan								
1	2	2	0			1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah tenaga relawan dan jumlah pertemuan pleno	5	0	5	2	40%	2	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			3	Kegiatan Monitoring Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL)	Jumlah kelompok yang dimonitoring	6	6	6	6	100%	12	200%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			4	Kegiatan Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu	Jumlah peserta sosialisasi	1250	250	250	250	100%	500	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan								
1	2	2	0			1	1	1	1	1	1	1	1
			1	Kegiatan Evaluasi 10 Program Pokok PKK	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	35	7	7	0	0%	7	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			2	Kegiatan Evaluasi Program Terpadu P2WKSS	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba	5	1	1	0	0%	1	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			3	Kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Hari Ibu	Jumlah peserta kegiatan	3000	600	600	300	50%	900	30%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			6	Kegiatan Pelatihan Produk Daur Ulang Sampah (PPSP)	Jumlah peserta pelatihan	560	100	100	100	100%	200	36%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			7	Kegiatan Penyuluhan Tentang Pengelolaan Sampah Kepada Masyarakat (PPSP)	Jumlah peserta penyuluhan	3000	600	600	600	100%	1200	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			8	Kegiatan Pelatihan dan Pameran Karya Perempuan di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan	5	3	5	4	80%	7	140%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1			Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
1	1	1	1	Program Keluarga Berencana	Capaian Peserta KB Baru								
2	2	2	5										
				0									
				1									
			2	Kegiatan Pelayanan KIE	Jumlah media informasi KB	22	5368	22	1	5%	5369	24405%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			3	Kegiatan Perlindungan Hak Reproduksi	Jumlah pemeriksaan papsmear, kasus komplikasi berat KB MKJP, kasus kegagalan KB MKJP	117	100	117	103	88%	203	174%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			5	Kegiatan Pembinaan KB	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan jumlah peserta	50	10	10	10	100%	20	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			7	Evaluasi Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan	Jumlah kelurahan yang mengikuti evaluasi	5	1	1	1	100%	2	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			8	Pemantapan Pelayanan KB dalam Kegiatan Terpadu Guna Momentum Tingkat Kota	Jumlah pertemuan yang dilaksanakan dan jumlah peserta	10	2	2	0	0%	2	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Program KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	15	2	3	0	0%	2	13%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PKB	Jumlah PKB yang dupaknya dinilai	26	26	26	23	88%	49	188%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Kesehatan Reproduksi Remaja (Genre)	Jumlah kelompok								
	2	2	6										
			3	Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	85	17	17	17	100%	34	40%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			4	Kegiatan Sosialisasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	2	1	2	0	0%	1	50%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio akseptor KB								
	2	2	7										
			5	Kegiatan Pelayanan KB MKJP dan Konseling	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan	2775	0	2725	681	25%	681	25%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KS dengan Mandiri	Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I								
	2	2	8										
			1	Kegiatan Fasilitasi Pembentukan Kelompok KB	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	35	0	7	4	57%	4	11%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Jumlah pembinaan								
	2	2	9										
			1	Kegiatan Pembinaan Operasional PPKBBK, Sub.PPKBK dan KKBS-RT	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	20	2	4	2	50%	4	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pameran Produk UPPKS	Jumlah pameran yang diikuti	10	3	2	0	0%	3	30%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			4	Kegiatan Penyusunan Laporan SPM KB dan KS	Jumlah dokumen laporan SPM	5	1	1	0	0%	1	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			5	Kegiatan Pembinaan dan Orientasi Bagi Pramuka Saka Kencana	Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	20	2	4	3	75%	5	25%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			7	Kegiatan Lomba Kelompok Tribina, UPPKS dan IMP	Jumlah lomba yang dilaksanakan	25	6	5	5	100%	11	44%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			10	Kegiatan Pemutakhiran data Keluarga dan Rakerda Koalisi Kependudukan	Jumlah rakor yang dilaksanakan dan dokumen hasil pendataan	4	0	4	2	50%	2	50%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			11	Kegiatan Pembinaan dan Revitalisasi Kelompok Keluarga Sejahtera	Jumlah keluarga dan sektep pusing gatra	90	90	90	0	0%	90	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	2	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja	Jumlah kegiatan								
			1	Kegiatan Orientasi dan Pembinaan PKBR	Jumlah peserta pembinaan	2450	450	450	450	100%	900	37%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
			5	Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	17	4	17	13	76%	17	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	2	Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Rata Rata Jumlah Anak per Keluarga								
			1	Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan, KB dan Ketahanan Keluarga	Jumlah Dokumen profil	4	0	1	0	0%	0	0%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
			9	Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah peserta lomba karya penanggulangan kemiskinan	15	0	3	0	0%	0	0%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			10	Kegiatan Pameran BBGRM dan HKG PKK TK. Provinsi Jawa Timur dan TK. Nasional	Jumlah pameran yang diikuti	10	2	2	1	50%	3	30%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			11	Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pencanangan	4	0	4	4	100%	4	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			14	Sosialisasi Pembangunan MCK dan Penyusunan PEDUM, JUKLAK PMDPK	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi dan dokumen PEDUM, JUKLAK PMDPK	300	0	300	300	100%	300	100%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			8	Kegiatan Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan	Jumlah peserta bintek	150	30	30	350	1167%	380	253%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			20	Kegiatan Evaluasi Kelurahan Berhasil.	Jumlah Kelurahan yang mengikuti evaluasi kelurahan berhasil	20	4	4	27	675%	31	155%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
1	2	1	1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat	Jumlah Alat yang dipromosikan									
				1	Kegiatan Lomba Cipta Inovasi Teknologi Tepat Guna dan Gelar TTG Tingkat Nasional	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10	2	2	0	0%	2	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	2	1	1	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kecil Kelurahan	Jumlah LKK Sehat									
				1	Kegiatan Temu Kerja dan Pendampingan Lembaga Keuangan Kelurahan (LKK)	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10	2	2	1	50%	3	30%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
				3	Kegiatan Penguatan Lembaga Ekonomi Kelurahan Berbasis Komunitas	Jumlah lembaga yang mengikuti kegiatan	150	30	30	0	0%	30	20%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	2	1	1	Program Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Posyandu Balita									
2	2	2	8											
				1	Kegiatan Revitalisasi Posyandu Balita	Jumlah Posyandu yang memenuhi UKBM yang berkualitas	270	270	270	270	100%	540	200%	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
2				URUSAN PILIHAN										
1				URUSAN WAJIB										
2	6	2	1	0	6	0	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran		
				1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang dan jasa yang tersedia	10	2	2	1	50%	3	30%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
				2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	284	38	42	20	47.62 %	58	20.42 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	6	2	2	0	6	0	1	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah				Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik		
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	5	1	1	1	100%	2	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	129	22	22	8	36.36 %	30	23.26 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	% sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	100	75	85	27	31.76 %	102	102%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	6	2	3	0	6	0	1	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu		

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang disusun	25	5	5	5	100%	10	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	6	2	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	33	11	5	7	140%	18	54.55 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
1	1			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
1	1	2	1	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi KUMKM	Jumlah Promosi KUMKM								
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM dalam rangka HARKOPNAS	Jumlah promosi produk/pameran yang diikuti	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			3	Kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan	5	1	1	1	100%	2	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			4	Kegiatan Pameran Produk Unggulan UMKM dalam Rangka HARKOP dan SMESCO	Jumlah promosi produk/pameran yang diikuti	13	2	2	0	0%	2	15.38 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			5	Kegiatan Pameran Produk UMKM di Tingkat Nasional	Jumlah promosi produk/pameran yang diikuti	13	2	2	1	50%	3	23.08 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			6	Kegiatan Sosialisasi dukungan penyediaan permodalan bagi KUMKM	Jumlah peserta sosialisasi	500	100	100	100	100%	200	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
1	1	2	1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif								
			1	Kegiatan Pemeringkatan Koperasi	Jumlah koperasi yang diikutkan pemeringkatan	140	40	25	0	0%	40	28.57 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan koperasi berprestasi serta penilaian kesehatan koperasi	Jumlah koperasi yang dinilai	6	2	1	0	0%	2	33.33 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			4	Kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan Pelatihan perkoperasian (Jambore Koperasi Sekolah)	Jumlah jambore kopsek yang dilaksanakan	15	3	3	2	66.67 %	5	33.33 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			5	Kegiatan Monev Penyelenggaraan KUMKM	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6	2	1	0	0%	2	33.33 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			6	Kegiatan Pelatihan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Jumlah pelatihan peserta SKKNI	200	50	50	0	0%	50	25%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			9	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Bagi Pengawas Koperasi	Jumlah pengawas koperasi yang mengikuti pembinaan	210	50	40	40	100%	90	42.86 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			10	Kegiatan Pelatihan Manajemen Partisipasi Anggota Koperasi	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan	450	50	100	100	100%	150	33.33 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			11	Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian	Jumlah peserta pelatihan dan sosialisasi	400	0	100	100	100%	100	25%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
1	1	2	1	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan bina UKM								
			1	Kegiatan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi / KUD	Jumlah pengelola koperasi/KUD yang mengikuti pelatihan	250	50	50	50	100%	100	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			2	Kegiatan Pengembangan Unit Pelayanan Klinik Bisnis untuk WUB	jumlah WUB yang mengikuti pelatihan	1300	260	260	260	100%	520	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			3	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda	Jumlah pameran yang diikuti	15	3	3	2	66.67 %	5	33.33 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			4	Kegiatan Pendataan dan Pemberdayaan UMKM di Kota Madiun	Jumlah data dan jenis pemberdayaan yang dilaksanakan	20	4	3	1	33.33 %	5	25%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			5	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	1500	300	300	50	16.67 %	350	23.33 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
2	3			Energi dan Sumberdaya Mineral									
2	3	2 0 6 0 1	1 5	Program Pembinaan dan Pengawasan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Laporan Pengawasan Bidang ESDM								
			1	Kegiatan Pengelolaan Energi Migas dan kegeologian	Jumlah dokumen yang dihasilkan	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	4			Pariwisata									
2	4	2 0 6 0 1	1 5	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Promosi Pariwisata								
			1	Kegiatan Pemberdayaan Generasi Muda Bidang Kepariwisata	Jumlah pelaksanaan	500	100	100	100	100%	200	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			2	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri (hari Jadi Propinsi)	jumlah promosi/pameran yang diikuti	9	1	2	0	0%	1	11.11 %	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			3	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Majapahit Travel Fair)	jumlah promosi/pameran yang diikuti	5	1	1	1	100%	2	40%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			4	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)	jumlah promosi/pameran yang diikuti	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	4	2 0 6 0 1	1 7	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah Event Kepariwisata								
			1	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pariwisata	Jumlah dokumen monev yang dihasilkan	10	2	2	0	0%	2	20%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			3	Kegiatan Gebyar Batik dan Fashion Show Batik 2016	jumlah peserta yang mengikuti lomba	200	0	100	0	0%	0	0%	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana prasarana kantor	3	0	3	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/ bangunan	1	0	1	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
2	1			Pertanian									
2	1	2 0 1 0 1	1 5	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rata-rata Pendapatan Petani per hektar								
			1	Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN penerima PUAP	6	6	6	0	0%	6	100%	Dinas Pertanian
			2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani	Jumlah Lokasi percontohan SRI	3	3	3	0	0%	3	100%	Dinas Pertanian
			3	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	Jumlah GAPOKTAN yang mendapat penyuluhan	15	15	15	0	0%	15	100%	Dinas Pertanian
2	1	2 0 1 0 1	1 6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Kelompok Petani								
			1	Kegiatan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	Jumlah Kelompok Petani yang mendapat bimbingan SLPTT	3	2	3	0	0%	2	66.67 %	Dinas Pertanian
2	1	2 0 1 0 1	1 7	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Padi Per Hektar								
			1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah sarana prasarana pertanian kepada petani	3	0	3	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
			2	Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah lokasi pembuatan pupuk organik	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
			3	Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian (DAK 2016)	Jumlah lokasi pembangunan infrastruktur pertanian	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
			4	Pembangunan Rehabilitasi Infrastruktr Pertanian (DAK	Jumlah Lokasi pembangunan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
				Tambahan 2015)	infrastruktur pertanian									
2	1	2	1	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Produk Pertanian dan Olahan yang dipasarkan									
		0	8											
		1												
		0												
		1												
				1	Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	Jumlah pameran/ gelar olahan	2	2	2	0	0%	2	100%	Dinas Pertanian
2	1	2	1	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Hewan Ternak yang dipotong per Tahun									
		0	9											
		1												
		0												
		1												
				1	Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak	Jumlah penyuluhan (bimbingan teknis)	3	3	3	2	66.67 %	5	166.67 %	Dinas Pertanian
2	1	2	2	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah Daging Ternak									
		0	0											
		1												
		0												
		1												
				1	Penyuluhan Pemasaran Produksi Peternakan	jumlah bimtek	3	2	3	3	100%	5	166.67 %	Dinas Pertanian
2	1	2	2	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah SDM Peternakan (Peternak, Pedagang Daging & Susu)									
		0	1											
		1												
		0												
		1												
				1	Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	jumlah penyuluhan dan jumlah demplot	4	2	4	4	100%	6	150%	Dinas Pertanian
2	1	2	2	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah Populasi Ternak Kota Madiun yang Mendapatkan Pengobatan									
		0	2											
		1												
		0												
		1												
				1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	Jumlah ternak yang mendapat pengobatan&pemeriksaan kesehatan	700	3380	700	1332	190.29 %	4712	673.14 %	Dinas Pertanian
				2	Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pemeriksaan daging	366	365	365	161	44.11 %	526	143.72 %	Dinas Pertanian

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
2	2			Kehutanan										
2	2	2	1	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Areal Lahan Penghijauan									
		0	5											
		1												
		0												
		1		1	Pemeliharaan Kawasan Hutan Kota	luas areal kawasan hutan kota yang terpelihara	0.5	0.5	0.5	0.5	100%	1	200%	Dinas Pertanian
				2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan	luas areal yang ditanami pohon	5	0	5	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
				3	Kegiatan Pembangunan Kawasan Hutan Kota	luas kawasan hutan kota	1.5	0	1.5	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
2	2	2	1	Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan	Jumlah Industri yang dibina									
		0	6											
		1												
		0												
		1		1	Sosialisasi Kebijakan Peraturan Industri Hasil Hutan	Jumlah Sosialisasi	1	0	1	1	100%	1	100%	Dinas Pertanian
				2	Kegiatan Pengawasan dan Penertiban Pelaksanaan Peraturan Perundangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan	Jumlah dokumen	1	0	1	0	0%	0	0%	Dinas Pertanian
2	5			Kelautan dan Perikanan										
2	5	2	1	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Jumlah SDM (Petani Ikan), Produksi perikanan, Konsumsi Ikan									
		0	5											
		1												
		0												
		1		1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul	jumlah benih ikan	175000	165000	175000	74170	42.38 %	239170	136.67 %	Dinas Pertanian
				2	Pendampingan Pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan	jumlah penyuluhan budidaya& pengolahan ikan	4	2	4	1	25%	3	75%	Dinas Pertanian
				3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	jumlah penyuluhan pemasaran hasil olahan perikanan	2	0	2	1	50%	1	50%	Dinas Pertanian

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persediaan Peralatan Bahan Penunjang : ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan	5	6	6	2	33%	8	160%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	5	11	1	1	100%	12	240%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
	4	1											
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/ Bangunan	15	7	6	1	17%	8	53%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional	15	21	23	2	9%	23	153%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Kantor	1	32	24	11	46%	43	4300%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
	4	1											
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja	8	10	6	5	83%	15	188%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	4	1											
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Rehab Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1	1	2	0	0%	1	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	1	3		Sosial									
1	1	1	1	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi								
		3	1	4	0	1							
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan TMP	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya	Jumlah Penerima Bantuan								
		3	1	4	0	1							
			1	Pemberdayaan Fakir Miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Berfungsinya kompetensi sosial dan penanganan PMKS	1117	1117	1600	218	14%	1335	120%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan								
		3	1	4	0	1							
			1	Kegiatan Pembinaan atau Pelatihan PSM	Terwujudnya pemberdayaan kelembagaan masyarakat dibidang sosial	114	135	135	20	15%	155	136%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			2	Kegiatan Pemantapan TAGANA	Terwujudnya kesiapsiagaan penanganan bencana	135	23	23	9	39%	32	24%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			3	Kegiatan Pembinaan Pelatihan Karang Taruna	Bimbingan kewirausahaan bagi UEP karang taruna dan motivasi UKS	27	27	120	1	1%	28	104%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			4	Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Terwujudnya kesejahteraan lanjut usia dan tertib administrasi karang werdha dan lanjut usia	27	27	27	13	48%	40	148%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	1	1	2	Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja									
4	1	0	1		Pameran Bursa Kerja (Job Market Fair)	Terwujudnya Pameran Bursa Kerja	1	1	1	1	100%	2	200%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			2		Optimalisasi Informasi antar Kerja Melalui Peningkatan Efektifitas Informasi Pasar Kerja (IPK)	Tersedianya dokumen IPK sesuai kebutuhan kerja	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	1	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rasio ketergantungan									
4	1	4	5		1	Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktifitas dan Pelaksanaan Kewirausahaan	Tersedianya wirausaha yang produktif	30	40	40	0	40	133%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
					2	Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Penyuluhan motivasi kerja	8	8	9	9	100%	17	213%
1	1	1	1	Program Peningkatannya Pengiriman Tenaga Kerja Dengan Tertib	Jumlah Kegiatan									
4	1	4	6		1	Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Terlaksananya pengiriman tenaga kerja siap pakai	120	120	120	0	120	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
					1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pencari kerja yang ditempatkan							
				1	Kegiatan Pendidikan Pelatihan dan Ketrampilan bagi masyarakat sekitar Pabrik Rokok (DBH-CHT)	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan	180	140	190	140	74%	280	156%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
				2	Pendidikan dan Pelatihan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan	20	32	36	0	0%	32	160%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Updating Data Pengangguran Tenaga Kerja	Tersedianya Data Ketenagakerjaan atau Pengangguran	1	1	1	0	0%	1	100%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	1	Program Penguatan Ekonomi Masyarakat dan Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Jumlah Kegiatan								
4	1	4	8										
			1	Bantuan Sarana Produksi Bagi masyarakat Sekitar Pabrik Rokok (DBH-CHT)	Terlaksananya Pelatihan Ketrampilan	14	0	4	0	0%	0	0%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	1	1	1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Rasio lulusan S1/S2/S3								
4	1	4	9										
			1	Kegiatan Pemberian Pembinaan Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Terciptanya pembinaan hubungan industrial dan jamsostek	5	1	1	0	0%	1	20%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			2	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Terfasilitasinya penyelesaian kasus hubungan industrial	80	12	8	5	63%	17	21%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			3	Kegiatan Sosialisasi Peraturan Ketenagakerjaan dan Pembahasan UMK	Terlaksananya pemahaman peraturan ketenagakerjaan dan pembahasan UMK	5	2	2	2	100%	4	80%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			4	Peningkatan Peran Lembaga Kerjasama Tripartit	Terlaksananya penyelesaian masalah ketenagakerjaan	5	2	2	1	50%	3	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			5	Pengendalian dan Pembinaan Lembaga Penyalur Tenaga Kerja	Terlaksananya pembinaan norma penempatan tenaga kerja	25	31	20	11	55%	42	168%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			6	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja	120	20	40	0	0%	20	17%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			7	Pendataan Wajib Lap Perusahaan dan Bimbingan Teknis Norma Kerja	Pendataan wajib lapo ketenagakerjaan dan peningkatan kesadaran masyarakat akan ketentuan ketenagakerjaan	100	20	100	25	25%	45	45%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
			8	Kegiatan sosialisasi Upah Minimum Kota (UMK)	Terlaksananya pembinaan pengupahan bagi pengusaha dan karyawan	5	1	1	1	100%	2	40%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
2	8			Transmigrasi									
2	8	1 1 4 0 1	1 5	Program Ketransmigrasian	Terwujudnya Peningkatan Kesempatan Kerja								
			1	Kegiatan Penyelenggaraan Ketransmigrasian	Terlaksananya Program Ketransmigrasian	4	4	3	3	100%	7	175%	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1 0 2 0 7 6	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial
1	2	1 0 2 0 7 6	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang terpelihara	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
				2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen	100	40	100	25	25%	65	65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				4	Kegiatan Pemutakhiran Data Tata Guna Lahan Kota Madiun	Jumlah Dokumen	100	40	100	25	25%	65	65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				5	Kegiatan Pembuatan Sistem Informasi tata Ruang	Jumlah sistem	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6				Perencanaan Pembangunan									
1	6	1	1		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun								
				2	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen	100	40	2	2	100%	42	42%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				4	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				5	Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				6	Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Evaluasi Evaluasi	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				7	Verifikasi Pra RKA dan Pra RKPA	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				8	Penyusunan KUA-P dan PPAS-P	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				9	Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran	Jumlah kegiatan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				10	Kegiatan Koordinasi Bidang Perencanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Perjalanan Dinas	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1 6	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Monitoring Evaluasi Capaian Kinerja	Jumlah sistem	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1 8	Kegiatan Verifikasi Renja dan Renja Perubahan SKPD	Jumlah Dokumen Renja	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2 2	Kegiatan Review RPJMD dan Renstra SKPD	Jumlah dokumen	100	40	35	0	0%	40	40%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1 0 6 0 1	1 6	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah								
			1	Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Koordinasi	100	40	42	4	9.52 %	44	44%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			6	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1 0	Kegiatan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (Ris-Pam)	Jumlah dokumen	100	40	100	25	25%	65	65%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1 0 6 0 1	1 8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi								
			1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Frekwensi FGD bidang Ekonomi	100	40	35	9	25.71 %	49	49%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			2	Penyusunan Ekonomi Dalam Angka	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility	Jumlah Rakor	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			4	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi MDGs	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			5	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Jumlah Dokumen	100	40	1	0	0%	40	40%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	6	1	1	Program perencanaan Pembangunan Bidang Sosial budaya	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya									
0	6	0	9											
				1	Kegiatan Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah kordinasi	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Portal TKPK	Jumlah sistem	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				4	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	Jumlah Rakor	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				5	Kegiatan Monev Percepatan Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				6	Kegiatan Pengembangan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				7	Penyusunan Sosial Budaya dalam Angka	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				8	Kegiatan Penyusunan Data Kemiskinan Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1	2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia									
0	6	0	0											
				1	Survey Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				2	Kegiatan Penyusunan Data dan Potensi Kota Madiun	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				3	Kegiatan Penyusunan Profil Kota Madiun	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				4	Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen	100	60	1	0	0%	60	60%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/bangunan yang terpelihara	100	100	1	1	100%	101	101%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	100	100	16	1	6.25 %	101	101%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang dipelihara	100	100	7	3	42.86 %	103	103%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	1	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jenis dokumen perencanaan dan laporan yang disusun	100	100	5	5	100%	105	105%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	1			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
1	1	1	1	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Konflik Horizontal di dalam masyarakat								
			1	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara	Jumlah peserta pembinaan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			2	Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah peserta sarasehan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Kegiatan Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi dan lomba	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			5	Kegiatan Pemantapan Idiologi dan HAM	Jumlah peserta sosialisasi	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	1	1	1	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Kemitraan dengan Elemen Masyarakat								
			1	Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah pertemuan FKUB	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Kegiatan Pembinaan, Verifikasi dan Evaluasi Organisasi Kemasyarakatan/LSM dan Pemuda	Jumlah pengurus Ormas/LSM yang memperoleh pembinaan	100	100	100	100	100%	200	200%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			4	Kegiatan Fasilitas Komunikasi dan Koordinasi Ormas/LSM	Jumlah peserta sarasehan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			5	Kegiatan Pelestarian Budaya Bangsa	Jumlah peserta pembinaan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			7	Kegiatan Optimalisasi Pembinaan dan Fasilitas Seni Budaya Bangsa yang Berwawasan Kebangsaan	Jumlah peserta workshop	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			8	Kegiatan Fasilitas Forum Pembauran Kebangsaan	Jumlah peserta sarasehan	150	150	150	150	100%	300	200%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			10	Kegiatan Pembinaan Generasi Muda dan Pemilihan duta anti narkoba	Jumlah peserta	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			11	Kegiatan Peningkatan Pembinaan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME	Jumlah peserta sarasehan	150	150	150	150	100%	300	200%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	1	1	1	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Parpol yang memahami regulasi								
			1	Kegiatan Pemutakhiran Data, Verifikasi dan BinteK Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah Parpol penerima bantuan	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
1	1	1	1	Program Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal dalam Masyarakat								
			1	Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah demo yang dipantau	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	15	5	5	3	60%	8	53.33 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana	6	4	4	1	25%	5	83.33 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3	Pembangunan Gedung	Jumlah Pekerjaan	2	1	1	0	0%	1	50%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1	0		Kependudukan dan Catatan Sipil									
1	1	1	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan regulasi								
			1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan	Jumlah aparat Kependudukan dan petugas registrasi	55	55	55	10	18.18 %	65	118.18 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			2	Pengadaan Blanko Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Formulir KTP dan Akta-akta Catatan Sipil	Jumlah blanko security dan non security	166	166	166	36	21.69 %	202	121.69 %	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			3	Evaluasi Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Pencatatan Sipil Kel./Kec.	Jumlah Kelurahan dan Kecamatan yang dilakukan evaluasi	27	27	27	0	0%	27	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4	Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen yang ditata dan dirawat	65	13	14	13	92.86 %	26	40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			7	Peningkatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM),KK,KTP,AKTA2 Pencatatan Sipil	Jumlah Cakupan SPM yang ditingkatkan	10	2	2	1	50%	3	30%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			9	Kegiatan Pengolahan dalam Penyusunan Laporan data Kependudukan	Jumlah Pelaporan data adminduk	500	100	100	100	100%	200	40%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			7	Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemerintah	Jumlah aparatur pemerintah yang mengikuti pembinaan	450	150	100	100	100%	250	55.56 %	Inspektorat
1	2	1	2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entits yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik								
	0	0	6										
			1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			2	Kegiatan Penanganan Pengaduan/tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Prosentase kasus pengaduan yang dapat diselesaikan	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			3	Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Prosentase temuan pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			4	Kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan	Jumlah Dokumen LHP Reguler dan Riksus	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			5	Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan	Prosentase temuan pemeriksaan eksternal (BPK RI) yang telah ditindaklanjuti	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			6	Kegiatan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Reviu atas LKPD	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			7	Kegiatan Evaluasi Laporan Kinerja SKPD	Prosentase SKPD yang akuntabilitas kinerjanya baik	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
			9	Kegiatan Probitry Audit Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kegiatan yang di Probitry Audit	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
		1	0	Kegiatan Review Laporan Kinerja Kota Madiun	Jumlah dokumen hasil Review SAKIP Kota Madiun	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
		1	2	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi	Jumlah dokumen laporan hasil movev	0	0	0	0	0%	0	0%	Inspektorat
		1	3	Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Jumlah dokumen hasil penilaian PMPRB Kota Madiun	5	1	1	0	0%	1	20%	Inspektorat

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung Yang Dipelihara	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	100	98.5	100	30.69	30.69 %	129.19	129.19 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Dan Prasarana Kantor	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	1	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan / Pelaporan	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Baik	100	94	100	0	0%	94	94%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	100	99.71	100	99.58	99.58 %	199.29	199.29 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	2	0		Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	2	1	4	Program Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota								
			1	Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda dan Perwal	100	98.36	100	25	25%	123.36	123.36 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			2	Kegiatan Penyusunan Raperda PPNS	Jumlah dokumen	100	0	100	0	0%	0	0%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	2	1	4	Program Pemberdayaan Satpol dalam Pelaksanaan Tugas	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk								
0	1	9	2										
				1 Kegiatan Bimtek Anggota Satpol PP	Jumlah Peserta Diklat / Bimtek Yang Diikuti	39	66	46	0	0%	66	169.23 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				2 Kegiatan Pelatihan Outbond	Jumlah Peserta Pelatihan Outbond	25	25	25	0	0%	25	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				3 Kegiatan Peringatan HUT Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta HUT Satpol PP se Jawa Timur	72	34	6123	3369	55.02 %	3403	4726.39 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				4 Kegiatan Jambore Satuan Polisi Pamong Praja se Jawa Timur	Jumlah Peserta Jambore Satpol PP	24	24	24	0	0%	24	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	2	1	4	Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Cakupan Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kota								
0	1	9	3										
				2 Kegiatan Penguohan Organisasi Masyarakat Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota Satuan Linmas Yang Dikukuhkan	0	0	0	0	0%	0	0%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				4 Kegiatan Penerbitan Identitas Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Anggota Perlindungan Masyarakat	1300	0	1300	0	0%	0	0%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				5 Kegiatan Peningkatan Peran dan Partisipasi Satlinmas dalam Memperingati hari-hari Besar Nasional dan Lainnya	Jumlah Personil Sat Linmas Yang Ikut Dalam Upacara Hari-hari Besar Nasional	868	489	868	30	3.46 %	519	59.79 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	2	1	4	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Perhari								
0	1	9	4										
				1 Kegiatan Penertiban Tibum Trmmas	Jumlah Pelanggaran K3 Yang terselesaikan	1410	1768	1198	601	50.17 %	2369	168.01 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
				2 Kegiatan Pembinaan Tibum Trmmas	Jumlah Peserta Pembinaan	1208	1080	1198	495	41.32 %	1575	130.38 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Pelanggar Perda di Daerah dan Persamaan Persepsi ke Luar Daerah	150	630	150	450	300%	1080	720%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			4	Kegiatan Patroli Wilayah Satpol PP	Jumlah Patroli per Hari	6	6	6	6	100%	12	200%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			5	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Jumlah Pengamanan	120	304	240	202	84.17 %	506	421.67 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
1	2	1	4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan								
	0	1	5										
			2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Masyarakat Yang Diperdayakan Dalam Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lngkungan	801	801	801	0	0%	801	100%	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
			3	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pos Kamling	815	812	815	0	0%	812	99.63 %	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
	0	2											
		0											
		1											
		3											
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	9 unit	12 unit	11 unit	8 unit	73 %	19 unit	24 %	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	10 kali	25 kali	10 kali	10 kali	100%	35 kali	35%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11		
1	2	1	4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam										
0	2	6													
0	1		1			Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	1.095	1.095	1.095	364 shift	33 %	1.459	1,33%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	3		2			Kegiatan Hari Ulang Tahun DAMKAR, Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Apel Siaga HUT Damkar, Rakornas, dan Rakorda Penanggulangan Bencana	67	14	67	36	54%	50	75%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			4			Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	Jumlah Peserta Gerakan Bhakti Sosial Sadar Bencana	450	370	450	450	100%	820	1,8%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			5			Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	150	150	150	0	0	150	1%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			7			Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	1	0	1	0	0%	0	0%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			8			Mitigasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Latihan SAR	150	90	150	150	100%	240	2,56%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2						URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB											
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran										
0	2		1			Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	60	7	7	6	85.71 %	13	21.67 %	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
7	4		2			Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	kali	60	24	22	9	40.91 %	33	55%	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa kantor	6	6	6	6	100%	12	200%	Bagian Administrasi Pembangunan
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1	1	1	0.25	25%	1.25	125%	Bagian Administrasi Pembangunan
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
	0	2											
		0											
		7											
		5											
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	1	1	1	0	0%	1	100%	Bagian Administrasi Pembangunan
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	1	1	1	1	100%	2	200%	Bagian Administrasi Pembangunan
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	30	30	30	30	100%	60	200%	Bagian Administrasi Pembangunan
1	2	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
	0	2											
		0											
		7											
		5											
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen	5	5	5	5	100%	10	200%	Bagian Administrasi Pembangunan
1	2	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	0	2											
		0											
		7											
		5											
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana dan prasarana kantor	217	217	217	217	100%	434	200%	Bagian Administrasi Pembangunan
1	2			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
	0												
1	2	1	3	Program Pengembangan Sistem Pertanggungjawaban Keuangan dan Kinerja Daerah	Jumlah Dokumen								
	0	2	4										
		0											
		7											
		5											
			4	Kegiatan Penyusunan Buku Petunjuk Operasional	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Pembangunan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			5	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah personil SKPD yang memiliki pengetahuan dengan benar dan aktif terlibat proses pengadaan barang/jasa	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Pembangunan
			6	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Pembangunan
			7	Kegiatan Penyusunan Standar Harga Barang Kebutuhan dan Standart Kegiatan Konstruksi	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Administrasi Pembangunan
			8	Kegiatan Operasional ULP	Jumlah paket pengadaan barang/jasa yang dilelang	1	1	1	0.33	33%	1.33	133%	Bagian Administrasi Pembangunan
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Penunjang	7	7	7	6	85.71 %	13	185.71 %	Bagian Organisasi
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	42	36	38	13	34.21 %	49	116.67 %	Bagian Organisasi
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1	0	1	1	100%	1	100%	Bagian Organisasi
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan	7	7	7	3	42.86 %	10	142.86 %	Bagian Organisasi
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	6	6	6	3	50%	9	150%	Bagian Organisasi

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11		
1	2	1	3	Program Peningkatan Kualitas Pendayagunaan Aparatur Negara	Prosentase Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Sesuai Road Map RB										
0	2	6	1			Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang dibina, jumlah gelar KBK Tingkat Kota dan jumlah keikutsertaan Gelar KBK Tingkat Propinsi	269	31	203	202	99.51 %	233	86.62 %	Bagian Organisasi
			2			Kegiatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Reformasi Birokrasi	5	1	1	0	0%	1	20%	Bagian Organisasi
1	2	1	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Prosentase Capaian SPM										
0	2	7	1			Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Percepatan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah laporan penerapan SPM yang disusun	5	1	1	0	0%	1	20%	Bagian Organisasi
			2			Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan jumlah dokumen penyusunan IKM	52	10	10	0	0%	10	19.23 %	Bagian Organisasi
			4			Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah pegawai yang paham inovasi pelayanan publik	128	0	128	128	100%	128	100%	Bagian Organisasi
			7			Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah peserta bimtek	112	0	112	112	100%	112	100%	Bagian Organisasi
1	2	1	3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan teknologi Informasi										
0	2	8	1			Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	Jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara dan Jumlah Peserta Pelatihan	278	240	240	94	39.17 %	334	120.14 %	Bagian Organisasi

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11		
				2	Kegiatan Penyelenggaraan Pusat Pelayanan Akses Informasi Bagi Masyarakat	Rata-rata jumlah kunjungan pada Pusat Pelayanan Akses Informasi (telecenter) per tahun	2400	2400	2400	749	31.21 %	3149	131.21 %	Bagian Organisasi	
				3	Kegiatan Pelaksanaan E-procurement di Pemerintah Kota Madiun	Prosentase fasilitasi pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik	100	100	100	98	98%	198	198%	Bagian Organisasi	
				4	Kegiatan Pelaksanaan Studi Kelayakan Pengembangan Infrastruktur Jaringan	Jumlah Dokumen	1	0	1	0	0%	0	0%	Bagian Organisasi	
				5	Kegiatan Pengembangan Website Pemerintah Kota Madiun	Jumlah Website resmi terbaru di Pemerintah Kota Madiun	38	0	38	0	0%	0	0%	Bagian Organisasi	
				1 3	Kegiatan Sosialisasi Pengetahuan TIK untuk Top Level Manajemen	Jumlah peserta yang paham akan pengetahuan TIK untuk Top Level Manajemen	150	0	150	130	86.67 %	130	86.67 %	Bagian Organisasi	
1	2	1	3	0	2	9									
					0	7									
					2	2									
					3	3									
					3	Kegiatan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Jumlah Dokumen	7	0	7	1	14.29 %	1	14.29 %	Bagian Organisasi
					2	URUSAN PILIHAN									
					1	URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	0	2	1									
					0	7									
					1	1									
					1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
					1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	1	1	1	100%	2	200%	Bagian Hukum	
					2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	70	21	40	12,5%	26	37,14%	Bagian Hukum	

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			4	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum dan penyelesaian kasus sengketa hukum	3	3	3	2	66,66%	5	166%	Bagian Hukum
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
	0	2											
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	13	13	13	13	100%	26	200%	Bagian Umum
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	500	491	491	292	59.47 %	783	156.6 %	Bagian Umum
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
	0	2											
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	2	2	2	1	50%	3	150%	Bagian Umum
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	34	34	34	34	100%	68	200%	Bagian Umum
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	3	3	3	3	100%	6	200%	Bagian Umum
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	4	4	4	4	100%	8	200%	Bagian Umum
1	2	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
	0	2											
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Bagian Umum

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	2	1	4	0	2	0	7	0						
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	1	3	1	1	100%	4	400%	Bagian Umum
			2		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	5850	5850	5850	0	0%	5850	100%	Bagian Umum
			4		Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1	1	1	0	0%	1	100%	Bagian Umum
1	1				Kebudayaan									
1	1	1	1	7	2	5								
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan Jumlah Group Kesenian Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Jumlah Penonton Dalam Pentas Seni								
			1		Kegiatan Fasilitas Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Madiun yang dilaksanakan	18	18	18	7	38.89 %	25	138.89 %	Bagian Umum
2					URUSAN PILIHAN									
1					URUSAN WAJIB									
1	1	1	1	0	1	1								
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	5	1	1	0,35	0,35%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
			2		Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi	150	60	54	13	25%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	1	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik									
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	1	1	1	1	100%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	15	7	15	10	60%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana	68	45	45	0	0%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	1	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu									
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	25	5	5	4	80%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur									
				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Paket	4	0	1	1	100%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
				6	Kegiatan Relokasi Kantor	Jumlah Arsip yang terelokasi	1	0	1	1	100%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
1	2				Kearsipan									
1	2	1	1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Prosentase Pengelola Arsip yang mempunyai Kompetensi									
				1	Kegiatan Monitoring, Evaluasi & Pelaporan Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan	155	31	31	31	100%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
				3	Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah	Jumlah Peserta Sosialisasi	1165	200	200	200	100%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1 4	Kegiatan Pengembangan SIM Perustakaan dan Pemutakiran Data	Jumlah Paket	2	0	1	0,9	90%	0	0%	Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	3	1 0 3 0 1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (ATK, Alat Listrik, Perangko, Materei, Surat kabar dll)	100	30	100	30	30%	60	60%	Dinas Pekerjaan Umum
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	40	15	38	15	39.47 %	30	75%	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1 0 3 0 1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	100	27	43	12	27.91 %	39	39%	Dinas Pekerjaan Umum
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	100	10	100	10	10%	20	20%	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1 0 3 0 1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan/laporan yang disusun tepat waktu	50	10	10	6	60%	16	32%	Dinas Pekerjaan Umum

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	3	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	50	10	10	0	0%	10	20%	Dinas Pekerjaan Umum
			3	Pembangunan Gedung	Jumlah Gedung	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			9	Kegiatan Pembangunan Pujasera Sumber Umis Tahap I	Jumlah Pekerjaan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			10	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan (Perluasan Lahan parkir Graha Krida Praja)	Jumlah Pekerjaan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
1	3			Pekerjaan Umum									
1	3	1	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik								
		0	5										
			3	Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	10	2	3	3	100%	5	50%	Dinas Pekerjaan Umum
			4	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jalan	Jumlah Bangunan pelengkap yang dibangun	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			14	Kegiatan Pembangunan dan Penataan Arena Road Race Bantaran Kali Madiun	Jumlah Pekerjaan	1	0	1	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			31	Kegiatan Pembangunan Jalan...	Jumlah Ruas Jalan yang dibangun	12	8	5	3	60%	11	91.67 %	Dinas Pekerjaan Umum
			32	Kegiatan Peningkatan Jl. Tawang Bhakti - Jl. Sri Sedani (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			33	Kegiatan Pembangunan Jl. soko tembus Jl. yos sudarso (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			34	Kegiatan Peningkatan Jl. Prambanan - Jl. Mendut (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
	3 5	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Kapten Saputro (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	3 6	Kegiatan Pembangunan Bangunan Pelengkap Jl. Barito (DAK)	Panjang jalan yang dibangun	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	3 7	Kegiatan Peningkatan Jl.Keningar dan Jl.Kunir (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	3 8	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jl.Pasopati-Jl.Rimba Jaya (DAK)	Panjang Jalan yang dipelihara	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	3 9	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Berkala Jalan (DAK)	Panjang Jalan yang dipelihara	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 0	Kegiatan Peningkatan Jl.Kapten Tendean (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 1	Kegiatan Peningkatan Jl.AURI-Jl.Ronggo Tohjoyo (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 2	Kegiatan Peningkatan Jl.Gajah Mada-Jl.Apotik Hidup (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 3	Kegiatan Peningkatan Jl.Durian-Jl.Mundu (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 4	Kegiatan Peningkatan Jl.Jenggolo Puro-Jl.Tawang asri (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 5	Kegiatan Peningkatan Jl.Tirtaraya (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 6	Kegiatan Peningkatan Jl.Suhud Nosingo-Jl.Mobilisasi Pelajar (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 7	Kegiatan Peningkatan Jl. Sri Rejeki (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 8	Kegiatan Peningkatan Jl.Dawuhan-Jl.Ngebong (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
	4 9	Kegiatan Peningkatan Jl.Pilang Muda (DAK)	Panjang Jalan yang ditingkatkan	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Air Limbah	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			1	Kegiatan Penyusunan Naskah Akademis dan Raperda Retribusi Air Limbah	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2	Program Pembangunan Saluran/Drainase/Gorong-gorong	Meningkatnya Jumlah Drainase dalam Kondisi Baik/Pembuangan air Tidak Tersumbat								
			1	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Panjang Saluran yang dapat berfungsi dengan baik	7.5	1.5	1.5	1.5	100%	3	40%	Dinas Pekerjaan Umum
			3	Kegiatan Pemeliharaan Rutin Kecamatan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Daerah Bebas Banjir	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			4	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	Jumlah Dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			1	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong di Kota madiun	Jumlah Daerah Bebas Banjir	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2	Program Pengendalian Banjir	Meningkatnya Jumlah Kawasan Bebas Banjir								
			1	Kegiatan Operasional Pengendali Banjir dan Pintu Air	Persentase berfungsinya mesin pompa pengendali banjir	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			2	Kegiatan Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Jumlah Infrastruktur pendukung pompa pengendali banjir	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			3	Kegiatan Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai	Jumlah Daerah Bebas Banjir	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum
			5	Kegiatan Pembangunan Rumah Pompa, Pompa Banjir dan Pintu Air	Jumlah Pekerjaan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
			1	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan (AP)	Persentase Pemanfaatan Ruang sesuai RT/RW yang diperdakan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum	
			2	Kegiatan Pengawasan Bangunan (Wasbang)	Persentase Surat Teguran yang diterbitkan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pekerjaan Umum	
2				URUSAN PILIHAN										
1				URUSAN WAJIB										
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran									
	0	2		1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pendapatan Daerah
				1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan bahan penunjang	100	8	8	8	100%	16	16%	Dinas Pendapatan Daerah
				2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan dinas keluar daerah	100	12	38	3	7.89 %	15	15%	Dinas Pendapatan Daerah
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik									
	0	2		1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Perbaikan gedung kantor	100	1	1	1	100%	2	2%	Dinas Pendapatan Daerah
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kendaraan dinas yang diperbaiki	100	2	2	2	100%	4	4%	Dinas Pendapatan Daerah
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Perbaikan sarana prasarana kantor	100	4	4	3	75%	7	7%	Dinas Pendapatan Daerah
1	2	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu									
	0	2		1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan dokumen SKPD	100	7	7	5	71.43 %	12	12%	Dinas Pendapatan Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11		
				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Barang	10	12	5	4	80%	16	160%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				3	Pembangunan Gedung	Jumlah gedung yang dibangun	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
				8		pembelian tanah	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
1	2				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	2	1	1		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah									
					0										
					0										
					1	Penghapusan Aset Daerah	Jumlah aset yang dihapus dari neraca	3	3	3	1	33.33 %	4	133.33 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					2	Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun	Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikat	30	26	30	0	0%	26	86.67 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					3	Penyelenggaraan Asuransi Aset Daerah Kota Madiun	Jumlah aset daerah yang diasuransikan	3	3	2	0	0%	3	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					4	Pengamanan Aset Tanah dan Bangunan Milik Pemkot Madiun	Jumlah pengamanan Aset Tetap Tanah dan Bangunan milik Pemkot	3	3	1	0	0%	3	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					6	Rekonsiliasi Pencatatan Aset dengan Realisasi Belanja Modal	Jumlah Laporan Rekonsiliasi Aset Daerah dan Belanja Modal Daerah	18	18	18	6	33.33 %	24	133.33 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					7	Kegiatan Inventarisasi WR pemanfaatan aset milik daerah	Jumlah WR pemakaian kekayaan daerah	500	500	100	0	0%	500	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					8	Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah	Jumlah kasus TPTGR	1	1	1	0	0%	1	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					9	Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemkot Madiun yang dipelihara	3	2	3	0	0%	2	66.67 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Pemeliharaan aplikasi persediaan	Jumlah aplikasi	1	0	1	1	100%	1	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Kegiatan Pendampingan Penatausahaan aset daerah	Jumlah SKPD yang didampingi Penggunaan Aplikasi SIM Barang Daerah	34	34	34	34	100%	68	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Kegiatan Penyusunan RKBMD dan RKPBM	Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan barang	2	2	2	0	0%	2	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah dokumen kajian	2	2	1	0	0%	2	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Penyusunan Sistem Informasi Geografis (SIG)	Jumlah database SIG	1	0	1	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Bintek pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Peserta	183	0	183	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Kegiatan Pengadaan Tanah	Jumlah Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	2	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Unsur PAD sesuai dengan Landasan Hukum								
	0	2	9	1	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah dokumen Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah	3	1	2	0	1	33.33 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				2	Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	2	2	2	1	3	150%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				3	Penyusunan dan Penerbitan Anggaran Kas SPD dan SP2D	Jumlah Dokumen Anggaran Kas, SPD dan SP2D	3	3	3	3	6	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				4	Pengelolaan Administrasi Gaji	Jumlah Dokumen admin gaji	14	20	14	7	27	192.86 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				5	Penyusunan Data-data Pemerintah Pusat	Jumlah Data	17	18	17	5	23	135.29 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
	6	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran	2	2	2	0	0%	2	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	7	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah buku pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	2	2	2	2	100%	4	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	8	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah landasan hukum sebagai dasar perubahan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran	2	2	2	0	0%	2	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	9	Kegiatan Pemeliharaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah aplikasi	1	1	1	1	100%	2	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	10	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan keuangan semesteran dan prognosis	2	2	2	0	0%	2	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	11	Verifikasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Jumlah Laporan Penerimaan Daerah dari SKPD sesuai dengan Laporan Penerimaan dari Kas Umum Daerah	25	25	25	10	40%	35	140%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	12	Pendampingan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah SKPD yang didampingi penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	34	34	34	34	100%	68	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	13	Kegiatan Bimtek Pengelolaan Keuangan daerah	Jumlah peserta bintek	350	305	345	0	0%	305	87.14 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	14	Kegiatan Bimtek Pendapatan Daerah	Jumlah peserta bintek	40	40	40	40	100%	80	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	15	Kegiatan Rekonsiliasi Data Dana Hibah Pemkot Madiun	Jumlah Laporan dana hibah Pemkot Madiun	4	4	4	1	25%	5	125%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
	16	Kegiatan Penyusunan standar biaya umum dan standar biaya khusus	Jumlah dokumen tentang standar biaya umum dan khusus	2	2	2	2	100%	4	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Kegiatan Evaluasi 8 Penyerapan Anggaran	Jumlah Ringkasan dan Penjabaran Realisasi SKPD	4	0	4	1	25%	1	25%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1	Kegiatan Pengelolaan Arsip 9 Perbendaharaan	Jumlah arsip yang dikelola	34	34	34	34	100%	68	200%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Penyusunan LKPD Kota 0 Madiun	Jumlah dokumen	1	0	1	1	100%	1	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Penyusunan sistem dan 1 prosedur pengelolaan keuangan daerah berbasis akrual	Jumlah dokumen	3	0	3	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Pendampingan pengelolaan 2 keuangan daerah	Jumlah pendampingan pengelolaan keuangan	10	1	10	1	10%	2	20%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Rekonsiliasi penyusunan 3 laporan keuangan bulanan SKPD	Jumlah laporan hasil rekonsiliasi	12	0	12	5	41.67 %	5	41.67 %	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2	Penyusunan Rancangan 4 Perda Dana Cadangan	Jumlah produk hukum	1	0	1	0	0%	0	0%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	8	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	9	9	9	6	66.67 %	15	166.67 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	17	17	13	5	38.46 %	22	129.41 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	8	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	jumlah gedung / lokasi	3	2	3	3	100%	5	166.67 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	jumlah kendaraan dinas	38	31	32	37	115.63 %	68	178.95 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	67	67	67	9	13.43 %	76	113.43 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	8	1	3		Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
				1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	8	8	8	3	37.5 %	11	137.5 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	8	1	4		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
				1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana kantor	111	0	14	0	0%	0	0%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	290	262	267	267	100%	529	182.41 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				4	Rehab Gedung dan Bangunan	jumlah gedung yang direhab	1	0	1	0	0%	0	0%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	4				Perumahan									
1	4	1	1		Program Pengelolaan Areal Pemakaman	Rasio tempat pemakaman umum yang dikelola								
				1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	jumlah lokasi makam	34	5	3	4	133.33 %	9	26.47 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	8				Lingkungan Hidup									
1	8	1	1		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun Volume Sampah yang Tertangani								
				2	Kegiatan Projasih	jumlah tenaga pemeliharaan kebersihan jalan	50	45	40	45	112.5 %	90	180%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Umum	jumlah titik	4200	4017	3750	1250	33.33 %	5267	125.4 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			2	Pemeliharaan Taman Alun-Alun	jumlah lokasi	1	1	1	1	100%	2	200%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			3	Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Materisasi PJU	pemasangan lampu jaringan dan meterisasi PJU	496	242	100	0	0%	242	48.79 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			4	Pemeliharaan Taman Bantaran	jumlah lokasi	1	1	1	1	100%	2	200%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			5	Kegiatan Perawatan Pohon Lindung pada Tepi Jalan dan RTH Pulau Jalan/Median Jalan	jumlah jenis (tanaman, alat, dan tanah urug)	3	3	3	3	100%	6	200%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			6	Kegiatan Pemasangan Lampu Hemat Energi	jumlah lampu hemat energi	170	34	34	0	0%	34	20%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			7	Kegiatan Penataan Ruang Terbuka Hijau	jumlah lokasi	3	3	3	1	33.33 %	4	133.33 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			8	Kegiatan Pemeliharaan Lampu Taman	lokasi pemeliharaan lampu taman	5	5	5	2	40%	7	140%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			9	Kegiatan Program Taman Bersih (Protasih)	jumlah tenaga pemeliharaan dan perawatan taman	58	55	51	55	107.84 %	110	189.66 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			10	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	Jumlah lokasi	7	8	7	4	57.14 %	12	171.43 %	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
			11	Kegiatan Perencanaan Detail (DED) RTH Kota	Jumlah Laporan	2	1	0	0	0%	1	50%	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	8	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	34.49	34.49 %	134.49	134.49 %	Kantor Lingkungan Hidup
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	100	100	100	95.69	95.69 %	195.69	195.69 %	Kantor Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	8	1	2	0	8	0	2							
					Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung dan bangunan yang rutin di maintain	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup
			2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	100	100	100	31.22	31.22 %	131.22	131.22 %	Kantor Lingkungan Hidup
			3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang rutin di maintain	100	100	100	29.79	29.79 %	129.79	129.79 %	Kantor Lingkungan Hidup
1	8	1	3	0	8	0	2							
					Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi fisik dan keuangan yang tersusun	100	100	100	68.37	68.37 %	168.37	168.37 %	Kantor Lingkungan Hidup
1	8	1	4	0	8	0	2							
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup
1	8													
					Lingkungan Hidup									
1	8	1	1	0	8	0	2							
					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun Volume Sampah yang Tertangani								
			7		Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Pengadaan gerobak sampah, tempat sampah pemilah dan komposter aerob	100	100	100	0.97	0.97 %	100.97	100.97 %	Kantor Lingkungan Hidup
			2		Kegiatan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan (DAK)	Jumlah Pengadaan Kendaraan Operasional Persampahan	0	0	0	0	0%	0	0%	Kantor Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	8	1	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian memenuhi passing grade yang ditetapkan Tim Penilai Adipura Prosentase Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan								
		0	6										
		8											
		0											
		2											
			2	Kegiatan Penyusunan Laporan Kualitas Lingkungan (SLHD)	Jumlah titik pantau kualitas lingkungan	100	100	100	33.12	33.12 %	133.12	133.12 %	Kantor Lingkungan Hidup
			3	Kegiatan Pelayanan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan masyarakat yang tertangani	100	100	100	2.43	2.43 %	102.43	102.43 %	Kantor Lingkungan Hidup
			4	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan (ADIPURA)	Jumlah sekolah yang mengikuti dan mendukung adipura	100	100	100	45.62	45.62 %	145.62	145.62 %	Kantor Lingkungan Hidup
			5	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kelurahan yang Bersih, Sehat, Lestari dan Asri (KELURAHAN BERSERI)	Jumlah kelurahan yang mendapatkan penghargaan Kelurahan Berseri	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup
			6	Kegiatan Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air, Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Kerusakan Lahan untuk Produksi Biomassa	Jumlah titik pengambilan sampling air, tanah dan udara	100	100	100	20.8	20.8 %	120.8	120.8 %	Kantor Lingkungan Hidup
			7	Kegiatan Monitoring Limbah B3	Jumlah perusahaan yang mematuhi aturan tentang pengelolaan limbah B3	100	100	100	28.34	28.34 %	128.34	128.34 %	Kantor Lingkungan Hidup
			8	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Langit Biru	Jumlah kendaraan yang lulus uji emisi	100	100	100	99.24	99.24 %	199.24	199.24 %	Kantor Lingkungan Hidup
			9	Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup	Jumlah peserta yang mengikuti peringatan hari lingkungan hidup	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
			10	Kegiatan Pengadaan Penunjang Laboratorium	Jumlah pengadaan alat laboratorium dan bahan laboratorium	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup	
			11	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup	
			12	Kegiatan PROPER (Program Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan)	Jumlah perusahaan yang lulus proper	100	100	100	18.89	18.89 %	118.89	118.89 %	Kantor Lingkungan Hidup	
			13	Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan saka kalpataru	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup	
			14	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat Mengenai Izin Lingkungan	Jumlah pelaku usaha yang mengajukan izin lingkungan	100	100	100	50.04	50.04 %	150.04	150.04 %	Kantor Lingkungan Hidup	
			15	Kegiatan Pemeliharaan Taman Hijau Bantaran Sungai Madiun	Jumlah lokasi pemeliharaan	100	100	100	29.32	29.32 %	129.32	129.32 %	Kantor Lingkungan Hidup	
			16	Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen lingkungan hidup yang tersusun	100	100	100	1.66	1.66 %	101.66	101.66 %	Kantor Lingkungan Hidup	
1	8	1	08002	1	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan								
				1	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat provinsi dan tingkat nasional	100	100	100	20.18	20.18 %	120.18	120.18 %	Kantor Lingkungan Hidup
				2	Kegiatan Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan sosialisasi	100	100	100	0	0%	100	100%	Kantor Lingkungan Hidup
1	8	1	0802	1	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase Sarana dan Prasarana Perlindungan Sumber-sumber air yang berfungsi dengan layak dan baik								

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja SKPD	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
1	2	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang akan dipakai DPRD	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			3	Pembangunan Gedung	Jumlah Paket	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
1	2			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	2	1	2	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu								
			1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi perda	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			2	Hiereng/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah hearing	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			3	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi dan badan anggaran	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			4	Kegiatan Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah rapat paripurna	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			5	Kegiatan Reses	Jumlah reses yang dilaksanakan DPRD	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			6	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			7	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop yang dilaksanakan DPRD	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			8	Kegiatan Fasilitasi Penyebarluasan Informasi Kegiatan DPRD	Jumlah kegiatan DPRD yang bisa diakses publi	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
			9	Kegiatan Fraksi	Jumlah pemandangan umum dan pemandangan akhir fraksi	0	0	0	0	0%	0	0%	Sekretariat DPRD
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	7	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pelaksanaan kegiatan administrasi	17	1	1	0,5	50%	1	600%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	42	31	35	11	31%	42	100%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Pemeliharaan	1	6	2	2	100%	8,00	800%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	0	46	35	0	0%	46,00	0%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	8	14	14	14	100%	28	350%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
				1 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Jumlah Kegiatan	7	10	15	0	0%	0	0%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				2 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan	Jumlah Awak Kendaraan Umum	35	35	35	35	100%	70	200%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				3 Kegiatan Pembinaan Keselamatan LLAJ	Jumlah Pelajar yang dibina	3	1	1	0	0%	1	33%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				4 Kegiatan Penyelenggaraan Balik Gratis Angkutan Lebaran	Jumlah Penumpang	350	427	427	0	0%	427	122%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				5 Kegiatan Pemilihan dan Pemberiaan Penghargaan Pemuda Pelopor	Jumlah Peserta	50	50	50	50	100%	100	200%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				6 Kegiatan Pengamanan Insidentil Terpadu	Jumlah pos pantau	5	3	3	0	0%	3	60%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				8 Kegiatan Pelatihan/Pembinaan SDM Perhubungan	Jumlah Peserta	0	80	80	80	100%	160	0%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				9 Lomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota (LLAK) Wahana Tata Nugraha (WTN)	Lomba Tertib lalu lintas angkutan kota	2	0	2	0	0%	0	0%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				10 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	Jumlah Hari	65	65	65	8	12%	73	112%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	7	1	1	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan								
				1 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	Jumlah Rambu Lalu Lintas	250	237	237	237	100%	474	190%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				2 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Marka Jalan	1.450	1.325	1.332	0	0%	1.325	91%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			1	Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	Jumlah dokumen	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Frekwensi Pengawasan	12	12	12	6	50%	18	150%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			3	Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi	Jumlah peserta yang diPembinan	150	2	4	2	50%	4	3%	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2				URUSAN PILIHAN									
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
	0	2											
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	12	75	12	75	625%	150	1250%	Bagian Humas dan Protokol
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	314	75	100	26	26%	101	32.17 %	Bagian Humas dan Protokol
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
	0	2											
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	1	75	100	1	1%	76	7600%	Bagian Humas dan Protokol
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas	2	75	100	6	6%	81	4050%	Bagian Humas dan Protokol
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	jumlah sarana dan prasarana	40	75	100	100	100%	175	437.5 %	Bagian Humas dan Protokol
1	2	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
	0	2											
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	100	10	100	10	10%	20	20%	Bagian Humas dan Protokol

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1				URUSAN WAJIB									
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
	0	2											
		0											
		1											
		1											
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	14	14	60	15	25%	29	207.14 %	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	43	18	60	15	25%	33	76.74 %	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
	0	2											
		0											
		1											
		1											
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung kantor yang bersih dan nyaman	1	1	60	15	25%	16	1600%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang aman dan nyaman	8	8	60	15	25%	23	287.5 %	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis sarana kantor yang memadai	4	3	60	15	25%	18	450%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1	2	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
	0	2											
		0											
		1											
		1											
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	10	10	60	15	25%	25	250%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
1	2	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	0	2											
		0											
		1											
		1											
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang diadakan	3	2	60	15	25%	17	566.67 %	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	2				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	2	1	2	2	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Rasio Izin yang Diterbitkan								
				1	Surveylance ISO 9001 :2008	Jumlah sertifikat manajemen ISO 9001:2008	0	0	0	0	0%	0	0%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
				2	Inventarisasi dan Evaluasi Potensi Data Perizinan	Jumlah dokumen yang disusun	0	0	0	0	0%	0	0%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
				4	Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Perizinan	Jumlah baliho/ gambar yang dibuat	0	0	0	0	0%	0	0%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
				6	Peningkatan Ketrampilan dan Profesionalisme SDM Perizinan	Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan.keterampilan dan profesionalisme SDM perijinan	0	0	0	0	0%	0	0%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
				7	Kegiatan Penataan Arsip	Jumlah yang dikelola	1764	0	92	100	108.7 %	100	5.67 %	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
				8	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah Dokumen	1	1	84.59	21.14	24.99 %	22.14	2214%	Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu
2					URUSAN PILIHAN									
1					URUSAN WAJIB									
2	6	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
				1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	8	8	8	8	100%	16	200%	Dinas Pasar
				2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	14	28	21	3	14.29 %	31	221.43 %	Dinas Pasar

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
2	6	2	2	0	6	0	0	2						
					Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	1	1	1	1	100%	2	200%	Dinas Pasar
			2		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang layak pakai	26	26	26	26	100%	52	200%	Dinas Pasar
			3		Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	44	44	44	46	104.55 %	90	204.55 %	Dinas Pasar
2	6	2	3	0	6	0	2							
					Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	1	1	1	1	100%	2	200%	Dinas Pasar
2	6	2	4	0	6	0	2							
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1		Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	100	100	100	100	100%	200	200%	Dinas Pasar
			2		Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang disediakan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pasar
			6		Kegiatan Relokasi Kantor	Jumlah Pekerjaan	0	0	0	0	0%	0	0%	Dinas Pasar
2	6				Perdagangan									
2	6	2	1	0	6	0	2							
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan/Usaha Informal								
			8		Kegiatan Pendataan Sirkulasi Perputaran Uang/Modal di Pasar	Jumlah Dokumen yang disusun	1	1	1	1	100%	2	200%	Dinas Pasar
			9		Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar yang dikembangkan sarana dan prasarana pasarnya	17	17	17	17	100%	34	200%	Dinas Pasar

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11	
1	2	1	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Penataan Pegawai yang terealisasi									
0	0	0	0											
				1	Seleksi Penerimaan CPNS	Jumlah Peserta	15020	18	0	0	0%	18	0,12%	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai	1920	208	630	182	29%	390	20%	Badan Kepegawaian Daerah
				3	Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Persentase Permasalahan Kepegawaian Tertangani	242	52	62	19	31%	71	29%	Badan Kepegawaian Daerah
				5	Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi	Jumlah PNS	900	89	200	0	0%	89	10%	Badan Kepegawaian Daerah
				8	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta	200	30	0	0	0%	30	15%	Badan Kepegawaian Daerah
				9	Kegiatan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah Peserta	180	34	0	0	0%	34	19%	Badan Kepegawaian Daerah
1	2	1	2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur									
0	0	0	1											
				2	Diklat Kepemimpinan Tk. II	Jumlah PNS	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kepegawaian Daerah
				3	Diklat Kepemimpinan Tk. III	Jumlah PNS	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kepegawaian Daerah
				4	Diklat Kepemimpinan Tk. IV	Jumlah PNS	0	0	0	0	0%	0	0%	Badan Kepegawaian Daerah
				5	Diklat Teknis dan Fungsional	Jumlah Peserta	612	317	60	12	20%	329	54%	Badan Kepegawaian Daerah
				8	Diklat Pra Jabatan CPNS	Jumlah PNS	620	18	2	0	0%	18	2,90%	Badan Kepegawaian Daerah
1	2	1	2	Program Peningkatan Manajemen Pelayanan Kepegawaian	Persentase Penyelesaian Administrasi Kepegawaian Sesuai dengan Peraturan									
0	0	0	1											
				1	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Kegiatan	472	81,97	90	28,92	32%	110,89	23%	Badan Kepegawaian Daerah
				2	Kegiatan Penataan Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	Jumlah SK	19500	3580	3900	1263	32%	4843	25%	Badan Kepegawaian Daerah

1				2		3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Kegiatan Pemberhentian Pegawai yang Pensiun		Jumlah PNS	947	115	182	40	22%	155	16%	Badan Kepegawaian Daerah
			7	Operasional dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kepegawaian dan SAPK		Jumlah Data	5	1	1	1	100%	2	40%	Badan Kepegawaian Daerah
2				URUSAN PILIHAN										
1				URUSAN WAJIB										
1	2	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran								
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10	10	10	10	100%	20	200%	Kecamatan Taman
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	25	24	73	26	35.62 %	50	200%	Kecamatan Taman
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik								
			1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan		Jumlah Gedung	10	10	10	6	60%	16	160%	Kecamatan Taman
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas		Jumlah Kendaraan Dinas	51	51	51	10	19.61 %	61	119.61 %	Kecamatan Taman
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor		Jumlah Sarpras Kantor	10	10	10	7	70%	17	170%	Kecamatan Taman
1	2	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase Dokumen Perencanaan/Laporan yang disusun Tepat Waktu								
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah Dokumen	5	8	5	5	100%	13	260%	Kecamatan Taman
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/Kelurahan		Jumlah Dokumen	2	2	2	1	50%	3	150%	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
			3	Kegiatan Penyusunan Buku Kecamatan dalam Angka	Jumlah Dokumen	1	1	1	1	100%	2	200%	Kecamatan Taman
1	2	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur								
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	5	2	1	0	0%	2	40%	Kecamatan Taman
1	1			Kebudayaan									
1	1	1	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan Jumlah Group Kesenian Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya Jumlah Penonton Dalam Pentas Seni								
			1	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah Kegiatan Pentas Seni	3	3	3	2	66.67 %	5	166.67 %	Kecamatan Taman
1	1			Pemuda dan Olah Raga									
1	1	1	1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Peserta Olahraga, Jumlah Kegiatan Olah Raga								
			1	Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	Jumlah pelaksanaan kegiatan	2	2	2	1	50%	3	150%	Kecamatan Taman
1	1			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
1	1	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban								
			2	Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Kehadiran Peserta	100	100	100	100	100%	200	200%	Kecamatan Taman

1				2	3	4	5	6	7	(8) = (7/6)	(9) = (5+7)	(10) = (9/4)	11
1	1	1	1	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Jumlah Peserta Olahraga, Jumlah Kegiatan Olah Raga								
	8	2	5										
				1 Kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	jumlah pelaksanaan kegiatan olahraga	2	2	2	1	50%	3	150%	Kecamatan Manguharjo
1	1			Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri									
	9												
1	1	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban								
	9	2	1										
				2 Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Kehadiran Peserta	100	100	100	0	0%	100	100%	Kecamatan Manguharjo
1	2			Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
	0												
1	2	1	2	Program Optimalisasi Pemungutan PBB	Persentase Penerimaan PBB								
	0	2	5										
				1 Koordinasi Pengamanan Penerimaan PBB	Prosentase penerimaan PBB	0	0	0	0	0%	0	0%	Kecamatan Manguharjo
1	2			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	2												
1	2	1	2	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kelurahan	Persentase Kehadiran dalam Perencanaan Pembangunan Kelurahan								
	2	2	0										
				1 Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	Jumlah pelaksanaan musrenbang kelurahan dan kecamatan	0	0	0	0	0%	0	0%	Kecamatan Manguharjo
				2 BOP PMDPK Bina Lingkungan	Jumlah Kelompok TPKK yang berpartisipasi dalam PMDPK	9	9	9	0	0%	9	100%	Kecamatan Manguharjo

BAB III

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Berdasarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2014-2019 maupun perkembangan kebijakan pemerintah dalam skala regional dan nasional, serta dengan memperhatikan kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi adanya perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD tahun 2016, maka dalam rangka penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah untuk tahun 2016 disusun fokus pembangunan daerah yang menjadi kebijakan umum dalam penyusunan Perubahan APBD tahun 2016. Fokus pembangunan daerah yang tercakup dalam Perubahan RKPD ini pada dasarnya merupakan kerangka operasional sebagai arah atau tindakan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah, yang berisi sasaran dan kebijakan daerah dalam perubahan anggaran.

Dalam rangka pencapaian keenam prioritas pembangunan daerah tersebut dijabarkan ke dalam program dan kegiatan serta pagu indikatifnya per prioritas seperti dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pendidikan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab		
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3		4	5	6			7	8	9	10		
		sebelum	sesudah	sesudah	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)						
1	URUSAN WAJIB													
1	Pendidikan							15.576.034.000						
1	1	1	1	0	5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pengolahan database informasi pendidikan dan evaluasi pelaporan berbasis TIK				298.915.000			
		6	Lomba Kopetensi Siswa SMK	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Rutin	30 lembaga	251.085.000	550.000.000	298.915.000		30 lembaga	256.331.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
		3	Kegiatan LKS (BK Provinsi)			Dinas Dikbudmudora	0 paket	300.000.000	0	-300.000.000		0	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
		4	Kegiatan Peningkatan Mutu Pendidikan SMK (BK Prov.)	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	4 lembaga	0	300.000.000	300.000.000		0 lembaga	0	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	0	8	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang Mengikuti Pelatihan Profesional				525.000.000			

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			6	Pembinaan Tenaga Pendidik	Jumlah Guru	Jumlah Guru	Dinas Dikbudmudora	1000 orang	200.000.000	725.000.000	525.000.000	-	1000 orang	175.000.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	1	Program Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Murni SD/SMP						14.424.980.000				
			1	Rehabilitasi Bangunan Sekolah	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	14 lembaga	11.981.219.000	12.618.447.000	637.228.000		14 lembaga	11.510.844.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 1	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	1.141.419.000	1.755.535.000	614.116.000		1 lembaga	2.996.431.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 2	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	1.324.384.000	2.063.008.000	738.624.000		1 lembaga	1.324.384.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 3	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	587.148.000	1.420.088.000	832.940.000		1 lembaga	587.148.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 4	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	536.960.000	1.779.147.000	1.242.187.000		1 lembaga	536.960.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 5	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	360.668.000	1.144.850.000	784.182.000		1 lembaga	360.668.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 6	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	351.903.000	1.485.178.000	1.133.275.000		1 lembaga	359.536.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 7	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	649.694.000	1.736.761.000	1.087.067.000		1 lembaga	649.694.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 8	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	412.007.000	878.402.000	466.395.000		1 lembaga	412.007.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 9	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	444.982.000	1.469.841.000	1.024.859.000		1 lembaga	393.411.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 10	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	358.458.000	1.229.414.000	870.956.000		1 lembaga	358.458.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 11	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	481.047.000	1.395.750.000	914.703.000		1 lembaga	481.047.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 12	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	502.118.000	2.622.862.000	2.120.744.000		1 lembaga	502.118.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 13	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	450.528.000	1.445.387.000	994.859.000		1 lembaga	450.528.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			3	Kegiatan Penyelenggaraan SMPN 14	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	335.497.000	1.298.342.000	962.845.000		1 lembaga	335.497.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	1	2	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar PAUD						327.139.000				
			1	APE PAUD Swasta (APE Luar ruangan)	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	172 lembaga	426.200.000	753.339.000	327.139.000	Rutin	1 lembaga	435.935.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
1	1	7		Kebudayaan							461.527.900				

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
1	1	1	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dilestarikan						56.192.900				
7	2	0	5		Jumlah Group Kesenian Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya										
					Jumlah Penonton Dalam Pentas Seni										
			1	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Madiun yang dilaksanakan	Jumlah Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Jadi Kota Madiun yang dilaksanakan	Kota Madiun	18 kegiatan	3.104.000.000	3.154.192.900	50.192.900		18 kegiatan	3.120.075.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
			1	Kegiatan Fasilitasi Perkembangan Keragaman Budaya	Jumlah Kegiatan Pentas Seni	Jumlah Kegiatan Pentas Seni	Kecamatan Manguharjo	6 kegiatan	300.000.000	306.000.000	6.000.000		6 kegiatan	310.000.000	Kecamatan Manguharjo
1	1	1	1	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Budaya Lokal yang dipentaskan, Sarana penyelenggaraan seni dan budaya						405.335.000				
7	0	1	6												
			1	Grebeg Maulud dan Pameran Seni Budaya	Jumlah paket	Jumlah paket	Dinas Dikbudmudora	2 paket	272.500.000	283.750.000	11.250.000		2	275.625.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			2	Pentas Seni Secara Periodik, Car Free Day dan Car Free Night	Jumlah group	Jumlah group	Dinas Dikbudmudora	12 kelompok	465.000.000	659.085.000	194.085.000		12 kelompok	483.500.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga

Tabel 3.2
Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab					
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif						
1	2	3		4	5	6			7	8	9	10					
		sebelum	sesudah	sesudah	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)									
1	URUSAN WAJIB																
1	2	Kesehatan															
								1.211.244.000									
1	2	1	1	0	6	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit yang sesuai standar										
		2				Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	46 Jenis	23.000.000.000	9.587.370.000	-13.412.630.000		15 Jenis	4.670.559.000	Rumah Sakit Umum Daerah
		1				Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Rumah Sakit (DAK)	Jumlah instalasi pengolahan air limbah rumah sakit yang dibangun	Jumlah instalasi pengolahan air limbah rumah sakit yang dibangun	RSUD Kota Madiun	1 Unit	2.060.960.000	1.996.510.000	-64.450.000		0 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah
		2				Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (Pajak Rokok)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	17 Jenis	3.010.340.000	3.909.296.000	898.956.000		0 Jenis	0	Rumah Sakit Umum Daerah

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
				2 5	Kegiatan Penyelesaian Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diselesaikan	Jumlah Pembangunan Gedung Kantor yang diselesaikan	RSUD Kota Madiun	1 Unit	1.954.785.000	1.961.485.000	6.700.000		0	0	Rumah Sakit Umum Daerah
				2 7	Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit (DAK)	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	Jumlah alat kesehatan rumah sakit yang diadakan	RSUD Kota Madiun	14 Jenis	2.299.199.000	1.470.039.000	-829.160.000		0 Jenis	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	2	1	2	0	0	Program Pengendalian Penyakit	Jumlah Kasus pada KLB					-149.657.000				
				1	Kegiatan Pencegahan Penyakit DBD (Demam Berdarah)	Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	Angka kesakitan DBD (Insidence Rate DBD)	Kota Madiun	75 Penduduk	691.379.000	555.039.000	-136.340.000	Pemindahan belanja modal pembelian alat fogging ke kegiatan pengadaan sarana dan prasarana kantor	50 Penduduk	692.196.000	Dinas Kesehatan
				2	Kegiatan Pengendalian Penyakit TB (Tuberkolosis)	Prosentase Case Notification Rate pada TB	Prosentase Case Notification Rate pada TB	Kota Madiun	3%	81.862.000	88.862.000	7.000.000	Penambahan kegiatan pembinaan kelurahan bebas TB	3%	81.862.000	Dinas Kesehatan
				4	Kegiatan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS	Prosentase penemuan Kasus HIV	Prosentase penemuan Kasus HIV	Kota Madiun	32%	317.614.000	322.647.000	5.033.000	Penambahan kegiatan sosialisasi HIV/AIDS di Car free day	25%	317.614.000	Dinas Kesehatan
				5	Kegiatan Pemberantasan Penyakit Menular langsung (P2ML)	Prosentase cakupan penyakit menular langsung yang ditemukan dan ditangani	Prosentase cakupan penyakit menular langsung yang ditemukan dan ditangani	Kota Madiun	100%	66.983.000	41.633.000	-25.350.000	Pengurangan belanja modal pengadaan soundtimer	100%	66.983.000	Dinas Kesehatan

1				2		3		4	5	6		7	8	9	10		
1	2	1	2	0	1	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Prosentase kecukupan alat kesehatan di puskesmas dan jaringannya					-157.243.000					
				1	2	Pengadaan Kendaraan Distribusi Gudang Farmasi (DAK)	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Kota Madiun	6 buah	157.243.000	0	-157.243.000	kegiatan dihapus karena adanya pemotongan dana DAK	0	0	Dinas Kesehatan
1	2	1	2	0	2	Program Kesehatan Ibu	Prosentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standart					10.308.000					
				1		Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu	Prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Prosentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Kota Madiun	100%	267.618.000	277.926.000	10.308.000	Penambahan kegiatan cetak lembar balik kegiatan kelas ibu balita	100%	297.380.000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2	0	3	Program Upaya Penyehatan Lingkungan	Prosentase TTU dan TPM sehat					788.685.000					
				1		Kegiatan Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Prosentase TTU dan TPM Sehat	Prosentase TTU dan TPM Sehat	Kota Madiun	82%	519.113.000	574.839.000	55.726.000	penambahan kegiatan untuk uji emisi kualitas udara gas buang pada incenerator	83%	574.839.000	Dinas Kesehatan
				2		Kegiatan Pengembangan Kota Sehat	Prosentase Kelurahan Kawasan Sehat Mandiri	Prosentase Kelurahan Kawasan Sehat Mandiri	Kota Madiun	48%	437.228.000	1.170.187.000	732.959.000	Penambahan pengadaan seragam untuk kegiatan verifikasi kota sehat	6667%	437.228.000	Dinas Kesehatan
1	2	1	2	0	4	Program Kesehatan Bayi dan Balita	Prosentase Balita Gizi Kurang					5.750.000					

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			3	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Imunisasi pada Balita	Prosentase kelurahan yang mencapai UCI Kelurahan	Prosentase kelurahan yang mencapai UCI Kelurahan	Kota Madiun	100%	149.951.000	155.701.000	5.750.000	Penambahan kegiatan pencanangan PIN Polio	100%	160.291.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2	05	Program Pengawasan dan Pengendalian Makanan dan Minuman	Prosentase Produk Makanan Olahan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat					37.225.000					
			1	Kegiatan Peningkatan Mutu Makanan dan Minuman	Prosentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	Prosentase produk makanan olahan industri rumah tangga pangan (IRTP) yang dinilai memenuhi syarat	Kota Madiun	72%	86.466.000	123.691.000	37.225.000	penambahan pembelian reagen pemeriksaan reagen food contamination kit	75%	86.466.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2	06	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Kelurahan Siaga Aktif Berstrata PURI					-43.320.000					
			1	Kegiatan Pengembangan media Kesehatan dan informasi sadar hidup sehat	Prosentase Puskesmas dan Jaringannya memberikan promosi kesehatan minimal 12 kali	Prosentase Puskesmas dan Jaringannya memberikan promosi kesehatan minimal 12 kali	Kota Madiun	100%	661.457.000	498.582.000	-162.875.000	pemindahan belanja modal rambu-rambu ke kegiatan pengadaan sarana dan prasarana	100%	661.457.000	Dinas Kesehatan	

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			3	Kegiatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Prosentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan minimal satu kali dalam satu Tahun	Prosentase Sekolah yang mendapat Promosi Kesehatan minimal satu kali dalam satu Tahun	Kota Madiun	100%	972.632.000	1.035.137.000	62.505.000	-	100%	1.184.106.000	Dinas Kesehatan	
			4	Kegiatan Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat	Prosentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI	Prosentase Kelurahan Siaga aktif berstrata PURI	Kota Madiun	63%	347.671.000	404.721.000	57.050.000	Penambahan untuk kegiatan Pengiriman kontingman SBH ke kegiatan Pertinas	67%	732.163.000	Dinas Kesehatan	
1	2	1	2	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Madiun						-812.006.000					
			1	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan data bidang kesehatan	Prosentase pemenuhan kebutuhan data bidang kesehatan	Dinas Kesehatan	100%	172.218.000	86.765.000	-85.453.000	pengurangan karena adanya aplikasi Sistem Informasi Puskesmas (SIP) baru	100%	202.095.000	Dinas Kesehatan	
			2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Kesehatan	Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun sesuai ketentuan	Jumlah jenis dokumen kepegawaian yang tersusun sesuai ketentuan	Dinas Kesehatan	3 Dokumen	104.193.000	183.193.000	79.000.000	penambahan kegiatan anjab dan ABK serta belanja pengahargaan untuk nakes teladan	3 Dokumen	87.004.000	Dinas Kesehatan	
			3	Kegiatan Penyusunan Produk Hukum Bidang Kesehatan	Jumlah Rancangan Perda	Jumlah Rancangan Perda	Kota Madiun	1 Dokumen	99.245.000	114.595.000	15.350.000	penambahan kegiatan sosialisasi produk hukum ke stake holder	0	0	Dinas Kesehatan	

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			6	Kegiatan Upaya Penanggulangan Masalah Kesehatan	Prosentase penyediaan tenaga P3K sesuai kebutuhan	Prosentase penyediaan tenaga P3K sesuai kebutuhan	Kota Madiun	100%	161.567.000	164.047.000	2.480.000	Adanya penambahan honor panitia pengadaan seragam P3K dan penyesuaian standar pada perjalanan dinas sesuai perwal perjadin terbaru	100%	310.578.000	Dinas Kesehatan
			7	Kegiatan Jaminan Kesehatan Masyarakat Kota Madiun	Prosentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	Prosentase masyarakat memiliki jaminan kesehatan prabayar	Kota Madiun	73%	30.889.895.000	30.891.095.000	1.200.000	Penambahan kegiatan pengadaan seragam tenaga verifikator jamkesmasta	82%	30.889.895.000	Dinas Kesehatan
1	2	1	3	Program Peningkatan Kualitas Sumberdaya Kesehatan	Jumlah Sarana Pelayanan Kesehatan yang beroperasi sesuai perundangan						307.395.000				
			3	Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar	Persentase Puskesmas dan Klinik terakreditasi	Persentase Puskesmas dan Klinik terakreditasi	Dinas Kesehatan	30%	588.359.000	895.754.000	307.395.000	Penambahan kegiatan penilaian pra survey akreditasi	9 Unit	588.359.000	Dinas Kesehatan
1	2	1	3	Program Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD	Persentase Pencapaian Kinerja Badan Layanan Umum Daerah						14.621.011.000				
			1	Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan BLUD pada Puskesmas Manguharjo	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Persentase Capaian Kinerja Mencapai Target	Puskesmas Manguharjo	84%	1.263.900.000	1.738.809.000	474.909.000	penyesuaian dengan pendapatan	100%	1.349.580.000	Dinas Kesehatan

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			4	Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri (Gebyar Wisata dan Budaya Nusantara)	jumlah promosi/pameran yang diikuti	jumlah promosi/pameran yang diikuti	Jakarta	1 kali	193.109.000	306.324.000	113.215.000	Rutin	1 kali	193.109.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
2	5			Kelautan dan Perikanan							2.100.000				
2	5	2	1	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembenihan						2.100.000				
		0	7												
		1	0												
		0	1												
			2	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perbenihan Kewenangan Kabupaten/ Kota (DAK 2016)	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah Sarana Prasarana Balai Benih Ikan (BBI)	Kota Madiun	1 paket	2.240.400.000	2.242.500.000	2.100.000		0	0	Dinas Pertanian
2	6			Perdagangan							710.800.300				
2	6	2	1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Cakupan Bina Kelompok Perdagangan /Usaha Informal						710.800.300				
		0	6												
		0	0												
		1	1												
			7	Kegiatan Study Banding Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Pasar	Jumlah Pegawai	Jumlah Peserta Study Banding	Luar daerah	103 orang	0	333.300.000	333.300.000		0 orang	0	Dinas Pasar
			9	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar	Jumlah pasar yang dikembangkan sarana dan prasarana pasarnya	Jumlah pasar yang dikembangkan sarana dan prasarana pasarnya	Lanjutan	17 pasar	426.500.000	859.000.000	432.500.000	Lanjutan	17 pasar	426.500.000	Dinas Pasar
			1	Kegiatan Pengamanan Terpadu Pasar-Pasar di Kota Madiun	Jumlah pasar yang dijaga petugas keamanan	Jumlah pasar yang dijaga petugas keamanan	Lanjutan	17 Pasar	648.000.000	702.500.300	54.500.300		17 Pasar	702.500.300	Dinas Pasar

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			2 5	Penyusunan Perda Izin Gangguan (HO)	Jumlah Indikator	Jumlah Indikator	Kota Madiun	1 Dokumen	306.000.000	0	(306.000.000)		0	0	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata	
			2 6	Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Pasar Induk	Persentase Jumlah Pedagang yang dibina	Persentase Jumlah Pedagang yang dibina	Kota Madiun	85%	0	196.500.000	196.500.000	Kegiatan Baru	0	0	Dinas Pasar	
2	7			Perindustrian							153.853.000					
2	7	2 0 6 0 1	1 5	Program Pengembangan Industri Kecil Menengah	Jumlah IKM dan IRT						153.853.000					
			1	Kegiatan Fasilitasi Pameran Industri Mikro, Kecil dan menengah tingkat nasional	Jumlah promosi/pameran yang diikuti	Jumlah promosi/pameran yang diikuti	Tingkat Nasional	1 kali	184.300.000	338.153.000	153.853.000	Rutin	1 kali	215.985.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata	
2	8			Transmigrasi							0					
1	1 1			Pemberdayaan Perempuan							322.500.000					
1	1 1 2 0 1	1 2 6		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	partisipasi perempuan di lembaga swasta						158.000.000					
			6	Kegiatan Pengembangan Kota Layak Anak	Jumlah pertemuan gugus tugas dan forum anak serta dokumen laporan pengembang an KLA	Jumlah pertemuan gugus tugas dan forum anak serta dokumen laporan pengembang an KLA	Kota Madiun	4 kali	82.000.000	240.000.000	158.000.000		4 kali	82.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
1	1	1	1	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan						200.500.000				
			1	Kegiatan Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan	Jumlah tenaga relawan dan jumlah pertemuan pleno	Jumlah tenaga relawan dan jumlah pertemuan pleno	Kota Madiun	8 orang	169.500.000	370.000.000	200.500.000		8 orang	370.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	1	1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan						-36.000.000				
			8	Kegiatan Pelatihan dan Pameran Karya Perempuan di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah peserta pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah peserta pelatihan dan kegiatan yang dilaksanakan	Kota Madiun	90 orang	350.700.000	314.700.000	-36.000.000	5 kegiatan dan 90 orang	90 orang	315.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	4		Tenaga Kerja							232.066.000				
1	1	1	1	Program Perlindungan dan Pengembangan Kelembagaan Ketenagakerjaan	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah Angka sengketa pengusaha pekerja per tahun Rasio lulusan S1/S2/S3						232.066.000				

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			6	Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja	Pembinaan norma keselamatan dan kesehatan kerja	Kota Madiun	80 Perusahaan	142.000.000	374.066.000	232.066.000		1	0	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	
1	1			Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							223.041.000					
1	1	2	1	Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Cakupan bina UKM						223.041.000					
			3	Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan KUMKM oleh Dekranasda	Jumlah pameran yang diikuti	Jumlah pameran yang diikuti	Lokal, Regional dan Nasional	3 kali dan Rakor	264.500.000	487.541.000	223.041.000	Rutin	3 kali	278.300.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata	
1	1			Penanaman Modal							0					
1	2			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							-460.979.000					
1	2	1	1	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan	Jumlah LPMK aktif						-423.279.000					
			9	Kegiatan Lomba Karya Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah peserta lomba karya penanggulangan kemiskinan	Jumlah peserta lomba karya penanggulangan kemiskinan	Kota Madiun	3 peserta	95.000.000	0	-95.000.000	-	3 peserta	95.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			1	Pencanangan BBGRM, HKG PKK dan Penilaian Gotong Royong Terbaik	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pencanangan	Jumlah kelurahan yang mengikuti lomba dan pencanangan	Kota Madiun	4 kelurahan	510.000.000	363.000.000	-147.000.000	-	4 kelurahan	525.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	

Tabel 3.4
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3		4	5	6			7	8	9	10	
		sebelum	sesudah	sesudah	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)					
1	URUSAN WAJIB												
1	1												
2	2												
1	1												
2	2												
0	0												
1	1												
2	2												
5	5												
	9	Pengembangan Sarana dan Prasarana Program KB (DAK)	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Jumlah sarana dan prasarana yang diadakan	Kota Madiun	3 paket	1.597.647.000	372.294.000	-1.225.353.000		3	1.597.647.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1												
2	2												
2	2												
0	0												
1	1												
2	2												
6	6												
	3	Kegiatan Fasilitasi Kelompok PIK Remaja	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	Jumlah pertemuan dan jumlah peserta	Kota Madiun	17 kali	156.000.000	332.160.000	176.160.000		17 kali	32.500.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10	
1	1	1	2	0	Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak dan Remaja	Jumlah kegiatan					226.000.000					
				5	Kegiatan Pembinaan Bagi Kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL) dan UPPKS	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kota Madiun	17 kali	269.000.000	495.000.000	226.000.000		17 kali	269.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan
1	1	3			Sosial						203.500.000					
1	1	1	1	7	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	PMKS yang memperoleh bantuan					203.500.000					
				4	Pemberdayaan Pelayanan Karang Werdha dan Kesejahteraan Lansia	Terwujudnya kesejahteraan lanjut usia dan tertib administrasi karang werdha dan lanjut usia	Terwujudnya kesejahteraan lanjut usia dan tertib administrasi karang werdha dan lanjut usia	Kota Madiun	27 kelurahan	888.500.000	1.016.240.000	127.740.000		27 kelurahan	888.500.000	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
				8	Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Validasi Verifikasi data BPJS	Terealisasinya pemutakhiran fakir miskin di Kota Madiun	Terealisasinya pemutakhiran fakir miskin di Kota Madiun	Kota Madiun	27 kelurahan	150.000.000	225.760.000	75.760.000	Pembiayaan kegiatan pemutakhiran fakir miskin	27 kelurahan	0	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
1	2	1			Ketahanan Pangan						70.000.000					

1				2	3		4	5	6		7	8	9	10		
1	2	1	1	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Regulasi ketahanan pangan					70.000.000						
1	1	2	5													
				6	Sosialisasi Keamanan Pangan	jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi	jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi	Kota Madiun	1500 peserta	155.000.000	225.000.000	70.000.000		60 peserta	154.500.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan

Tabel 3.5
Peningkatan Pelayanan Publik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3		4	5	6			7	8	9	10			
		sebelum	sesudah	sesudah	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)							
1		URUSAN WAJIB													
1	2	Rutin						22.892.306.300							
1	1	1	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peresentase Terlaksananya Administrasi Perkantoran			8.239.958.600							
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Lembaga	Jumlah Lembaga	Dinas Dikbudmudora	1 lembaga	3.502.150.000	3.545.170.000	43.020.000	Rutin	1 lembaga	3.502.150.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis jasa, peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	Prosentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran	Dinas Kesehatan	100%	716.331.000	705.778.000	-10.553.000	- Honor PNS 11 org - Tenaga kontrak 33 org - Tenaga upahan 2 orang - Belanja ATK - Belanja Alat Listrik - Belanja perangko - Belanja Alat Kebersihan - Belanja Listrik, Air, Telepon - Belanja Surat kabar - Penggandaan - Belanja Makmin Rapat	13 %	939.839.000	Dinas Kesehatan

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	Honorarium PNS dan non PNS yang disediakan	RSUD Kota Madiun	53 Orang.	898.000.000	884.800.000	-13.200.000		49 Orang.	898.600.000	Rumah Sakit Umum Daerah	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	10 paket	348.776.000	400.000.000	51.224.000	-	10 paket	400.000.000	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana dan Ketahanan Pangan	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Barang dan jasa yang tersedia	Barang dan jasa yang tersedia	Disperindagkoppar	1 paket	371.596.000	419.596.000	48.000.000	ATK, alat Listrik, materai, perangko, alat pembersih, pengirm surat, fotocopi	1 paket	371.596.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa dan peralatan bahan penunjang administrasi perkantoran	Jumlah jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	Dinas Pertanian Kota Madiun	10 paket	309.078.000	331.578.000	22.500.000	Menyesuaikan Peraturan Walikota Madiun nomor 12 Tahun 2015	10 paket	325.000.000	Dinas Pertanian	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Jumlah Peralatan	Persentase Jumlah Peralatan	Bappeda Kota Madiun	72%	195.177.000	195.177.000	0		72%	200.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persediaan Peralatan Bahan Penunjang : ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan	Persediaan Peralatan Bahan Penunjang : ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, Cetak dan Penggandaan	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	5 paket	317.850.000	360.050.000	42.200.000	Pembelian ATK, Alat Listrik dan Elektronik, Benda Pos, Peralatan Kebersihan dan Alat Pembersih, Cetak dan Penggandaan	5 paket	317.850.000	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	2 Jenis	250.865.000	275.065.000	24.200.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6 Jenis	228.123.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah/Jenis Barang Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satuan Polisi Pamong Praja	6 Jenis	1.293.039.000	1.313.039.000	20.000.000	-	7 Jenis	1.299.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	BPBD Kota Madiun	12 Unit	297.192.000	463.292.000	166.100.000	Jumlah Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	11 Jenis	386.350.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	7 Jenis	670.848.000	676.848.000	6.000.000	kegiatan penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan kantor	7 Jenis	676.848.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan perlengkapan kantor	Kota Madiun	1 paket	211.490.000	224.690.000	13.200.000	-	1 paket	232.639.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kota Madiun	13 Jenis	1.722.081.000	2.320.598.600	598.517.600	3 BELANJA PEGAWAI 10 BELANJA BARANG DAN JASA	13 Jenis	1.722.081.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan	Jumlah Peralatan	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	1 paket	203.117.000	209.117.000	6.000.000	Layanan Free Wifi Pengunjung	1 paket	180.000.000	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	Jenis barang dan jasa operasional kantor	KPPT	14 Jenis	386.400.000	436.400.000	50.000.000	Rutin	14 Jenis	395.000.000	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pasar Ikan Kota Madiun	8 Jenis	294.500.000	319.500.000	25.000.000	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8 Jenis	319.500.000	Dinas Pasar

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan penyediaan bahan penunjang	Jumlah kegiatan penyediaan bahan penunjang	BKD	9 kegiatan	408.062.000	393.318.000	-14.744.000	-	9 kegiatan	400.000	Badan Kepegawaian Daerah	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Taman	10 paket	1.229.067.000	1.263.067.000	34.000.000	Kecamatan Taman	10	1.229.067.000	Kecamatan Taman	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kartoharjo dan 9 kelurahan	10 paket	1.194.280.000	1.296.280.000	102.000.000	Kecamatan Kartoharjo	10	708.578.000	Kecamatan Kartoharjo	
			1	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Manguharjo	10 paket	1.297.548.000	1.525.953.000	228.405.000	Kecamatan Manguharjo	10	1.525.953.000	Kecamatan Manguharjo	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas	Dinas Dikbudmudora	127 kali	153.125.000	198.947.000	45.822.000	Rutin	99 kali	153.125.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan keluar daerah bagi pejabat dan staf Dinas Pertanian Kota Madiun	Jumlah Perjalanan Dinas	luar daerah	67 kali	84.660.000	170.140.000	85.480.000	Karena s.d bulan Mei telah terealisasi anggaran sebesar Rp.42.339.000,00 (50% dari total anggaran yang diajukan dalam APBD 2016), dan sisa 7 bulan selanjutnya juga membutuhkan tambahan alokasi anggaran terkait dengan undangan-undangan rapat koordinasi	67 kali	155.220.000	Dinas Pertanian	

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Perjalanan Dinas Keluar Daerah bagi pejabat dan staf Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1 paket	69.984.000	94.984.000	25.000.000	Pembiayaan Perjalanan Dinas Keluar Daerah	1 paket	69.984.000	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Kota Madiun	55 kali	51.188.000	90.408.000	39.220.000		55 kali	0	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sosial Sekretariat Daerah	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas keluar Daerah	Inspektorat	57 orang/kali	62.785.000	91.700.000	28.915.000	Rutin	57 orang/kali	91.700.000	Inspektorat	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Luar Kota Madiun	45 kali	119.153.000	170.153.000	51.000.000	Perjalanan Dinas Keluar Daerah	100 kali	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Tahun	42.000.000	56.014.000	14.014.000	Bagian Administrasi Pembangunan	1 Tahun	42.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kota Madiun	38 kali	111.456.000	158.134.000	46.678.000	-	40 kali	133.747.000	Dinas Pekerjaan Umum	
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas	Jumlah perjalanan dinas	KLH Kota Madiun	26 kali	27.000.000	103.938.000	76.938.000	26 kali perjalanan dinas keluar daerah untuk memenuhi undangan dari Kementerian LHK/BLH Prov Jatim/dinas instansi terkait	1 kali	80.000.000	Kantor Lingkungan Hidup	

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Sekretariat DPRD	45 kali	2.769.392.000	2.775.386.000	5.994.000	Untuk biaya transportasi keluar daerah Sekretariat DPRD	40 kali	2.775.389.000	Sekretariat DPRD
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kota Madiun	27 kali	65.000.000	125.250.000	60.250.000	-	1 kali	65.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	KPPT	50 kali	58.710.000	83.710.000	25.000.000	Rutin	30 kali	75.000.000	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah	Dinas Pasar	21 kali	49.974.000	66.942.000	16.968.000	Rutin	21 kali	66.942.000	Dinas Pasar
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Perjalanan Dinas	Jumlah Perjalanan Dinas	BKD	70 kali	124.871.000	165.603.000	40.732.000	-	50 kali	130.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Taman	73 kali	623.450.000	727.842.000	104.392.000	Untuk 9 Kelurahan dan 1 Kecamatan	24 kali	727.842.000	Kecamatan Taman
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kecamatan Kartoharjo	30 kali	514.520.000	514.520.000	0	Untuk 9 Kelurahan dan 1 Kecamatan	16 kali	85.106.000	Kecamatan Kartoharjo
			2	Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kecamatan Manguharjo	10 paket	499.594.000	631.280.000	131.686.000	Kecamatan Manguharjo	10	631.280.000	Kecamatan Manguharjo

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
1	2	1	2	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah		Persentase Barang Inventarisasi dalam Kondisi Baik				636.063.700						
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/ Bangunan	Pemeliharaan dan Perawatan Gedung/ Bangunan	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1 paket	206.680.000	33.344.000	-173.336.000	Pembiayaan Pemeliharaan Gedung/ Bangunan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dialihkan ke Kegiatan Rehab Gedung/ Bangunan	1 paket	206.680.000	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung yang dipelihara	Jumlah gedung yang dipelihara	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	0%	24.000.000	0	-24.000.000	Rutin	1%	26.400.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	1 paket	21.000.000	29.705.000	8.705.000	Perawatan ringan dan Pengecatan dgn Luasan 2740m2	1 paket	23.000.000	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	Jumlah gedung/kantor yang terpelihara	kota madiun	1 Gedung	100.000.000	150.000.000	50.000.000	Pergeseran anggaran	1 Gedung	25.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kecamatan Taman	10 Gedung	86.500.000	91.000.000	4.500.000	Untuk 9 Kelurahan dan 1 Kecamatan	10 Gedung	91.000.000	Kecamatan Taman
				1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan	Jumlah gedung	Jumlah gedung	Kecamatan Manguharjo	10 paket	77.200.000	129.200.000	52.000.000	Kecamatan Manguharjo	10	129.200.000	Kecamatan Manguharjo
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang memperoleh biaya pemeliharaan	Prosentase terwujudnya kendaraan dinas yang layak pakai	Dinas Kesehatan	100%	191.740.000	189.940.000	-1.800.000	24 unit kendaraan roda 4 dan 105 unit kendaraan roda 2	129%	253.710.000	Dinas Kesehatan
				2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	Satuan Polisi Pamong Praja	12 Unit	172.500.000	297.035.000	124.535.000	-	12 Unit	195.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan	Jumlah Kendaraan	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	8 Unit		57.057.000	120.257.000	63.200.000	4 Unit Mobil dan 12 Unit Sepeda Motor	8 Unit	58.000.000	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kota Madiun	43 Unit		202.150.000	345.798.000	143.648.000	-	43 Unit	200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Jumlah kendaraan dinas yang dirawat	Sekretariat DPRD	23 Unit		331.572.000	439.842.000	108.270.000	10 kendaraan roda 4 dan 13 uit kendaraan roda 2	21 Unit	331.572.000	Sekretariat DPRD
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	BKD	20 kendaraan dinas		44.392.000	31.428.000	-12.964.000	2 Kendaraan Roda 4 18 Kendaraan Roda 2	20 kendaraa n dinas	40.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas	Kecamatan Manguharjo	1 paket		83.270.000	89.078.000	5.808.000	Kecamatan Manguharjo	2	89.078.000	Kecamatan Manguharjo
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah jenis sarana dan prasarana kantor yang mendapatkan biaya pemeliharaan	Prosentase terwujudnya sarana kantor yang layak pakai	Dinas Kesehatan	100%		69.700.000	79.884.000	10.184.000	- 30 unit AC - 17 buah Mesin Ketik - 47 unit Komputer - 55 buah Printer	4 %	88.220.000	Dinas Kesehatan
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	3 Jenis		75.700.000	256.382.500	180.682.500	Pemeliharaan Alat Kantor, Mesin, alat Studio/Komunikasi	3 Jenis	80.944.430	Bagian Umum Sekretariat Daerah
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana Kantor	Kota Madiun	4 paket		540.984.000	539.134.000	-1.850.000	-	4 paket	900.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	Sekretariat DPRD	7 Jenis		151.610.000	171.543.200	19.933.200	Untuk pemeliharaan komputer, mesin ketik, foto copy, meubelair, dan sound sistem	9 Jenis	151.610.000	Sekretariat DPRD
			3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarpras Kantor	Jumlah Sarpras Kantor	Kecamatan Taman	10 paket		65.300.000	80.400.000	15.100.000	Untuk 9 Kelurahan dan 1 Kecamatan	10 paket	80.400.000	Kecamatan Taman

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			4	Kegiatan Pemeliharaan Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	Jumlah Rumah Dinas	Kota Madiun	4 paket	1.240.780.000	1.302.330.000	61.550.000	Rumah Dinas Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Rumah Dinas Di Surabaya	4 paket	1.240.780.000	Bagian Umum Sekretariat Daerah
			5	Kegiatan Pemeliharaan Gedung Diklat	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Gedung Diklat	1 Gedung	106.329.000	108.227.000	1.898.000	-	1 Gedung	105.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
1	3	1	3	Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Dokumen Perencanaan/ Laporan yang disusun Tepat Waktu						336.333.000				
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu	Persentase Dokumen Perencanaan/ laporan yang disusun tepat waktu	Kota Madiun	10 Dokumen	40.000.000	55.000.000	15.000.000	-	10 Dokumen	45.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	8 Dokumen	30.000.000	40.670.000	10.670.000	-	8 Dokumen	30.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan	Jumlah Laporan	BKD	7 Laporan	20.000.000	27.663.000	7.663.000	-	7 Laporan	20.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	7 Dokumen	30.000.000	33.000.000	3.000.000	Kecamatan Manguharjo	6 Dokumen	33.000.000	Kecamatan Manguharjo
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/Kelurahan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kecamatan Kartoharjo	3 Dokumen	65.000.000	165.000.000	100.000.000		2 Dokumen	70.000.000	Kecamatan Kartoharjo
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/Kelurahan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kecamatan Manguharjo	3 Dokumen	65.000.000	165.000.000	100.000.000		2 Dokumen	70.000.000	Kecamatan Manguharjo
			2	Penyusunan Buku Profil dan Monografi Kecamatan/Kelurahan	jumlah dokumen	jumlah dokumen	Kecamatan Taman	3 Dokumen	65.000.000	165.000.000	100.000.000		2 Dokumen	70.000.000	Kecamatan Taman

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
1	1	1	4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur						13.679.951.000				
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana yang diadakan	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana prasarana kantor sesuai kebutuhan	Dinas Kesehatan	100%	519.409.000	948.113.000	428.704.000	Penambahan kegiatan karena pemindahan belanja modal dari beberapa kegiatan : pengadaan alat fogging, pengadaan alat laboratorium (incenerator) dan Pengadaan peralatan perlengkapan lalu lintas	2%	259.635.000	Dinas Kesehatan
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	RSUD Kota Madiun	11 paket	3.007.992.000	3.825.302.000	817.310.000		0 paket	550.000.000	Rumah Sakit Umum Daerah
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	Jumlah sarana dan prasarana yang dibeli	Kantor Disperindagkoppar	5 Jenis	44.199.000	94.544.000	50.345.000	rutin	5 Jenis	46.500.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah paket	Jumlah paket	Bappeda Kota Madiun	1 paket	133.000.000	334.860.000	201.860.000	APBD tahun 2016	1 paket	250.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana Prasarana	Jumlah Sarana Prasarana	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	837.271.000	898.540.000	61.269.000	Rutin Sarpras (Tambah Mobil Keliling	4 Jenis	1.250.000.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Baik	Tercukupinya Sarana dan Prasarana Kantor Yang Baik	Kota Madiun	6 Jenis	0	76.800.000	76.800.000	-	0 Jenis	0	Satuan Polisi Pamong Praja

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana Komputer dan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan	Jumlah sarana prasarana Komputer dan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan	BPBD Kota Madiun	1 paket	33.500.000.000	33.131.655.000	(368.345.000)	Jumlah sarana prasarana Komputer dan Mobil Pemadam Kebakaran yang diadakan	1 paket	2.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana	Jumlah sarana dan prasarana	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum	26 Unit	20.186.000	45.186.000	25.000.000	Rutin	26 Unit	0	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah/jenis sarana dan prasarana kantor	Jumlah/jenis sarana dan prasarana kantor	Bagian Administrasi Pembangunan	127 Unit	65.000.000	91.725.000	26.725.000	Bagian Administrasi Pembangunan	220 Unit	30.000.000	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	1 paket	78.257.000	103.157.000	24.900.000	Penyediaan dana untuk melengkapi sarana prasarana kantor yang belum ada/kurang maupun penggantian yang mengalami kerusakan berat	1 paket	25.575.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kota Madiun	3 paket	3.477.650.000	4.269.650.000	792.000.000	Modal Alat Angkutan Komputer, Alat Rumah Tangga	0 paket	0	Bagian Umum Sekretariat Daerah	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Jumlah sarana prasarana kantor	Kota Madiun	10 buah	0	9.407.300.000	9.407.300.000	-	10 buah	0	Dinas Pekerjaan Umum	
			1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Barang	Jumlah Barang	Kota Madiun	7 Jenis	285.843.000	411.383.000	125.540.000	.	3 Jenis	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1			2		3		4	5	6			7	8	9	10
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	Sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	KLH Kota Madiun	1 paket	0	182.208.000	182.208.000	Pengadaan sarana dan prasarana kantor berupa : 1. 1 unit lcd proyektor 2. 5 unit sepeda motor roda 2 3. 4 unit lemari besi 4. 2 unit meja kursi tamu 5. 3 unit laptop 6. 3 unit printer	1 paket	190.000.000	Kantor Lingkungan Hidup	
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Kegiatan pengadaan sarpras kantor	1 paket	0	68.800.000	68.800.000	Untuk pengajuan Kegiatan Pengadaan Sarpras kantor pd tahun 2016 belum di ajukan Baru diajukan setelah adanya Perubahan Renja tahun 2016	1 paket	68.800.000	Dinas Pasar	
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jenis Barang	Jenis Barang	BKD	4 Jenis	135.000.000	99.940.000	(35.060.000)	-	10 Jenis	0	Badan Kepegawaian Daerah	
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana kantor	Kecamatan Taman	1 paket	0	140.650.000	140.650.000	Pengadaan 1 unit kendaraan dinas pic up (alat angkut)	0 paket	0	Kecamatan Taman	
		1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor	Kecamatan Manguharjo	2 paket	380.000.000	579.475.000	199.475.000	Kecamatan Manguharjo	2	579.475.000	Kecamatan Manguharjo	
		2	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Satuan Polisi Pamong Praja	70 Orang	141.900.000	176.900.000	35.000.000	Anggota Satpol PP	120 Orang	150.000.000	Satuan Polisi Pamong Praja	
		3	Pembangunan Gedung	Gedung Jumlah Pekerja	Jumlah Pekerjaan	Kelurahan Oro-oro Ombo dan Kelurahan Sukosari	2 paket	1.200.000.000	1.300.000.000	100.000.000	-	0	0	Kecamatan Kartoharjo	

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Paket	Jumlah Paket	Dinas Dikbudmudora	1 paket	3.150.000.000	3.385.000.000	235.000.000	Rutin	1 paket	3.307.500.000	Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Jumlah Paket	Jumlah gedung/ bangunan	Kota Madiun	1 paket	146.500.000	148.450.000	1.950.000	penambahan anggaran untuk honorarium (verifikator dokumen teknis konstruksi, PPHP pada masing-masing paket, pejabat pengadaan pada masing-masing paket) ysebagaimana Peraturan Walikota Madiun No.12 Tahun 2015 dan ada perubahan kode rekening dari belanja	2 lokasi	393.000.000	Dinas Pertanian	
			4	Rehab Gedung dan Bangunan	Rehab Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Rehab Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	1 paket	200.050.000	385.570.000	185.520.000	Pembuatan tribun, lantainisasi/ pemasangan paving, pemasangan keramik dan pemasangan pintu gerbang Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Madiun	1 paket	200.050.000	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	
			1 1	Kegiatan Pembangunan Gedung dan Bangunan	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dibangun	Jumlah Gedung dan Bangunan yang dibangun	BPBD Kota Madiun	1 paket	0	897.000.000	897.000.000	BPBD Kota Madiun	0 paket	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	6			Perencanaan Pembangunan							197.466.000					

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10	
1	6	1	1	0	5	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan yang Mengakomodir Kepentingan Masyarakat Kota Madiun					27.466.000					
					2	Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Madiun	2 Dokumen	331.000.000	358.466.000	27.466.000		2 Dokumen	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1	1	0	6	Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah					30.000.000					
					2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana	Jumlah Koordinasi	Jumlah Koordinasi	Bappeda Kota madiun	1 kali	100.000.000	130.000.000	30.000.000		1 kegiatan	150.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
1	6	1	1	0	8	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi					75.000.000					
					1	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah Frekwensi FGD bidang Ekonomi	Jumlah Frekwensi FGD bidang Ekonomi	Bappeda Kota Madiun	35 kali	75.000.000	100.000.000	25.000.000		4 kali	80.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
					3	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Corporate Sosial Responsibility	Jumlah Rakor	Jumlah Rakor	Bappeda Kota Madiun	1 Kegiatan	100.000.000	150.000.000	50.000.000		1 kegiatan	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
1	6	1	2	Program Pengembangan Data dan Informasi	Dokumen Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Tersedia							40.000.000				
		0	0		4	Kegiatan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Madiun	1 Dokumen	100.000.000	140.000.000	40.000.000		1 Dokumen	50.000.000
1	9			Pertanahan								0				
1	1	0		Kependudukan dan Catatan Sipil								700.602.000				
1	1	1	1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan regulasi							700.602.000				
		0	1			4	Penataan dan Perawatan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen yang ditata dan dirawat	Jumlah Dokumen yang ditata dan dirawat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13 Jenis	106.912.000	235.902.000	128.990.000		13 Jenis
				7	Peningkatan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM), KK, KTP, AKTA2 Pencatatan Sipil	Jumlah Cakupan SPM yang ditingkatkan	Jumlah Cakupan SPM yang ditingkatkan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2 Jenis	99.955.000	134.955.000	35.000.000		0 Laporan	0	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1	Kegiatan Sosialisasi Kepemilikan KTP Elektronik	Jumlah peserta sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	650 orang	256.352.000	474.352.000	218.000.000		1700 orang	406.987.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				1	Kegiatan Sosialisasi Pencatatan Sipil	Jumlah badan yang mendapatkan sosialisasi	Jumlah peserta sosialisasi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	560 Org	180.140.000	498.752.000	318.612.000		607 Org	544.420.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	1	9		Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri								79.157.000				

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10												
1	1	1	2	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Keamanan dan Ketertiban	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban						79.157.000																
9	2	1	2		Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Kehadiran Peserta	Persentase Kehadiran Peserta	Kecamatan Taman	100%	110.000.000	122.575.000	12.575.000		100%	125.175.000	Kecamatan Taman											
0			2		Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Prosentase Kehadiran Peserta	Prosentase Kehadiran Peserta	Kecamatan Kartoharjo	100%	110.000.000	142.000.000	32.000.000		100%	120.000.000	Kecamatan Kartoharjo											
0			2		Kegiatan Koordinasi Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Kehadiran Peserta	Persentase Kehadiran Peserta	Kecamatan Manguharjo	100%	110.000.000	144.582.000	34.582.000		100%	144.582.000	Kecamatan Manguharjo											
8				Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian							7.630.066.400																
1	2	1	1	Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah						94.565.000																
0	2	5	3													Kegiatan Pengamanan Penerimaan Pajak Daerah	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	Surat himbauan pemberitahuan jatuh tempo pembayaran pajak	Kota Madiun	1 paket	460.021.000	501.641.000	41.620.000	Surat himpauan kepada wajib pajak	1	460.021.000	Dinas Pendapatan Daerah
			5													Kegiatan Pemberian Hadiah Gebyar undian PBB dan Wajib Pajak Prestasi	Pemberian hadiah gebyar undian PBB	Pemberian hadiah gebyar undian PBB	Kota Madiun	1 paket	280.544.000	290.169.000	9.625.000	Pemberian hadiah kepada wajib pajak PBB	1	280.544.000	Dinas Pendapatan Daerah

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			9	Kegiatan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Daerah	Wajib pajak membayara tepat waktu	Wajib pajak membayara tepat waktu	Kota Madiun	56715 orang	81.080.000	104.400.000	23.320.000	Wajib pajak membayar pajak tepat waktu	56790 orang	86.000.000	Dinas Pendapatan Daerah
			1 1	Pemeliharaan Frame Reklame	Jumlah Relokasi Frame Reklama	Jumlah Relokasi Frame Reklama	Kota Madiun	3 buah	0	20.000.000	20.000.000		0 buah	0	Dinas Pendapatan Daerah
1	2	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase Jumlah Aset yang dikelola Pemerintah Daerah						117.000.000				
0	2	8	2			Pensertifikatan Tanah Milik Pemkot Madiun	Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikat	Jumlah bidang tanah yang diajukan sertifikat	kota madiun	30 bidang tanah	125.000.000	200.000.000	75.000.000	.	30 bidang
			9	Pemeliharaan Aset-aset Milik Daerah	Jumlah Gedung Milik Pemkot Madiun yang dipelihara	Jumlah Gedung Milik Pemkot Madiun yang dipelihara	Kota Madiun	3 Gedung	175.000.000	87.000.000	-88.000.000		3 Gedung	175.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1 6	Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Aset Daerah	Jumlah jenis dokumen kajian	Jumlah dokumen kajian	kota madiun	2 Dokumen	100.000.000	200.000.000	100.000.000	.	1 Dokumen	100.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			2 0	Bintek pengelolaan barang milik daerah	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	Kota Madiun	183 orang	250.000.000	280.000.000	30.000.000		183 orang	250.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	2	1	1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Unsur PAD sesuai dengan Landasan Hukum						323.395.000				
0	2	9	2			Penyusunan DPA dan DPPA	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	Jumlah dokumen rencana pelaksanaan anggaran	kota madiun	2 Dokumen	150.000.000	226.568.000	76.568.000		2 Dokumen

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			6	Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Jumlah landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran	Jumlah landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran	kota madiun	2 Produk Hukum	430.282.000	612.659.000	182.377.000		2 Produk	430.282.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			8	Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Jumlah landasan hukum sebagai dasar perubahan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran	Jumlah landasan hukum sebagai dasar perubahan pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran	kota madiun	2 Produk Hukum	452.652.000	470.152.000	17.500.000		2 Produk	452.652.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
			1 8	Kegiatan Evaluasi Penyerapan Anggaran	Jumlah Dokumen	Jumlah Ringkasan dan Penjabaran Realisasi SKPD	Kota Madiun	4 data	110.000.000	156.950.000	46.950.000		4 data	110.000.000	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
1	2	1	2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Penataan Pegawai yang terealisasi						935.551.000				
			2	Kegiatan Penempatan Pegawai	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai	BKD	640 orang PNS	1.158.910.000	2.169.711.000	1.010.801.000		630 orang	1.158.910.000	Badan Kepegawaian Daerah
			3	Pembinaan Pegawai dan Penanganan Masalah Kepegawaian	Persentase Permasalahan Kepegawaian Tertangani	Persentase Permasalahan Kepegawaian Tertangani	BKD	100%	80.000.000	94.750.000	14.750.000		100%	70.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
			8	Kegiatan Bimtek/Sosialisasi/Workshop Pengembangan Aparatur	Jumlah Peserta	Jumlah Peserta	BKD	0 orang PNS	90.000.000	0	-90.000.000		50 orang	90.000.000	Badan Kepegawaian Daerah

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10												
1	2	1	2	Program Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	Persentase Pendidikan Aparatur yang Terealisasi	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur											-191.470.000											
0	2	0	1														2	Diklat Kepemimpinan Tk II	Jumlah PNS	Jumlah PNS	BKD	1 orang PNS	90.260.000	47.070.000	-43.190.000	2 orang	95.000.000	Badan Kepegawaian Daerah
0	1	0	3														Diklat Kepemimpinan Tk III	Jumlah PNS	Jumlah PNS	BKD	5 orang PNS	415.550.000	267.270.000	-148.280.000	10 orang	335.000.000	Badan Kepegawaian Daerah	
1	2	1	2	Program Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Perda yang disahkan tepat waktu												4.600.817.900											
0	2	0	3														1	Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi perda	Jumlah rancangan peraturan daerah yang ditetapkan menjadi perda	Sekretariat DPRD	24 raperda	2.253.778.000	4.030.224.000	1.776.446.000	11 raperda	2.253.778.000	Sekretariat DPRD
0	0	0	4														3	Kegiatan Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi dan badan anggaran	Jumlah rapat komisi, badan anggaran, badan musyawarah, badan legislasi dan badan anggaran	Sekretariat DPRD	45 kali	798.091.000	1.176.094.000	378.003.000	45 kali	798.091.000	Sekretariat DPRD
																	6	Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan	Jumlah kunjungan kerja yang dilaksanakan	Sekretariat DPRD	10 kali	4.609.977.000	5.330.579.900	720.602.900	11 kali	4.609.977.000	Sekretariat DPRD

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			7	Kegiatan Peningkatan Kaapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop yang dilaksanakan DPRD	Jumlah diklat, bintek, workshop yang dilaksanakan DPRD	Sekretariat DPRD	10 kali	3.133.666.000	4.859.432.000	1.725.766.000	Untuk biaya bintek dan diklat	8 kali	3.133.666.000	Sekretariat DPRD
1	2	1	2	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Entits yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja dengan Baik						123.426.000				
			1	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Jumlah entitas yang telah diperiksa	Jumlah entitas yang telah diperiksa	Inspektorat	86 Obrik	756.488.000	719.772.000	-36.716.000	Tahunan	86 Obrik	756.488.000	Inspektorat
			2	Kegiatan Penanganan Pengaduan/tujuan tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Prosentase kasus pengaduan yang dapat diselesaikan	Prosentase kasus pengaduan yang dapat diselesaikan	Inspektorat	100%	147.000.000	170.000.000	23.000.000	Inspektorat	100%	147.000.000	Inspektorat
			6	Kegiatan Review Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen hasil Reviu atas LKPD	Jumlah dokumen hasil Reviu atas LKPD	Inspektorat	1 Dokumen	93.778.000	230.920.000	137.142.000	Tahunan	1 Dokumen	93.778.000	Inspektorat
1	2	1	3	Program Penataan Daerah Otonom Baru	Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Otoda						225.000.000				
			6	Kegiatan Penyusunan Raperda Identitas Daerah	Terbitnya Raperda	Terbitnya Raperda	Kota Madiun	1 Dokumen	0	150.000.000	150.000.000		1 Dokumen	150.000.000	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah
			1	Kegiatan Pemekaran Kecamatan.	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Kota Madiun	1 Kecamatan	0	75.000.000	75.000.000		0 Kecamatan	0	Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Kegiatan Pembinaan Kelompok Budaya Kerja	Jumlah aparatur yang dibina dan jumlah keikutsertaan gelar KBK	Jumlah aparatur yang dibina, jumlah gelar KBK Tingkat Kota dan jumlah keikutsertaan Gelar KBK Tingkat Propinsi	Kota Madiun	202 Orang dan 1 kali	270.000.000	365.959.000	95.959.000		202 Orang dan 1 kali	370.000.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1	2	1	3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Prosentase Capaian SPM					103.100.000				
			4	Kegiatan Sosialisasi Inovasi Pelayanan Publik	Jumlah pegawai yang paham inovasi pelayanan publik	Jumlah pegawai yang paham inovasi pelayanan publik	Kota Madiun	128 Orang dan 1 kali	180.000.000	283.100.000	103.100.000		128 Orang dan 1 kali	283.100.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1	2	1	3	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah Kelompok User yang memanfaatkan teknologi Informasi						193.736.000				
			1	Kegiatan Pemeliharaan Kualitas Jaringan Intranet dan Internet Kota Madiun	Jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara	Jumlah client intranet dan titik CCTV yang dipelihara dan Jumlah Peserta Pelatihan	Kota Madiun	102 Client + 138 titik C	300.000.000	438.736.000	138.736.000		102 Client + 138 titik CCTV	524.100.000	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			5	Kegiatan Pengembangan Website Pemerintah Kota Madiun	Jumlah Sistem Informasi	Jumlah Website resmi terbaru di Pemerintah Kota Madiun	Kota Madiun	38 Website	165.000.000	220.000.000	55.000.000		0	0	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1	2	1	3	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Kelembagaan yang sesuai dengan Perundang-undangan						149.000.000				
			3	Kegiatan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Kota Madiun	7 Dokumen	766.000.000	915.000.000	149.000.000		0	0	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
1	2	1	4	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Perda yang dilakukan konsultasi Publik						190.341.500				
			1	Kegiatan Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan Keserasian antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	Jumlah raperda, kompilasi peraturan dan keputusan walikota, sosialisasi perda dan bintek	Jumlah raperda, kompilasi peraturan dan keputusan walikota, sosialisasi perda dan bintek	Kota Madiun	3 Jenis	1.080.000.000	1.128.000.000	48.000.000		4 Jenis	1.080.000.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
			3	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penerbitan JDIH, himpunan lembaran daerah, peraturan perundang-undangan dan lembaran lepas perda	Jumlah penerbitan JDIH, himpunan lembaran daerah, peraturan perundang-undangan dan lembaran lepas perda	Kota Madiun	1 paket	255.726.000	352.675.000	96.949.000		1	255.726.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			4	Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum dan penyelesaian kasus sengketa hukum	Jumlah pembinaan kadarkum, penyuluhan hukum dan penyelesaian kasus sengketa hukum	Kota Madiun	1 paket	722.544.000	767.936.500	45.392.500		1	722.544.000	Bagian Hukum Sekretariat Daerah
1	2	1	4	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Perhari						32.680.000				
			5	Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengamanan Kegiatan Pemerintah	Jumlah Pengamanan	Jumlah Pengamanan	Kota Madiun	323 kali	153.113.000	185.793.000	32.680.000	-	323 kali	185.793.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	2	1	4	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Kelurahan						-6.176.000				
			3	Kegiatan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dalam peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Jumlah Pos Kamling	Jumlah Pos Kamling	Kota Madiun	815 Pos	164.200.000	158.024.000	-6.176.000	-	820 Pos	158.024.000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	2	1	4	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Alam	Persentase Pencegahan Dini dan Penanggulan gan Korban Bencana Alam						443.092.000				
			1	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	Jumlah Piket Siaga Bencana	Kota Madiun	1095 shif	534.209.000	590.359.000	56.150.000		1095 shif	694.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			2	Kegiatan Hari Ulang Tahun DAMKAR, Rakornas dan Rakorda Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Apel Siaga HUT Damkar, Rakornas, dan Rakorda Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta yang mengikuti Apel Siaga HUT Damkar, Rakornas, dan Rakorda Penanggulangan Bencana	Pusat, Provinsi Jawa Timur	67 orang	193.833.000	343.000.000	149.167.000		67 orang	258.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			5	Pembekalan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana	Jumlah Peserta Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	Jumlah Peserta Pembekalan Dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Kebakaran)	Kota Madiun	210 orang	160.000.000	342.000.000	182.000.000		200 orang	208.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			7	Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	Jumlah Dokumen Pendataan Korban Pasca Bencana	Kota Madiun	2 Dokumen	30.000.000	85.775.000	55.775.000		1 Dokumen	40.000.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	2			Statistik							0				
1	2			Kearsipan							46.150.000				
1	2	1	1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Arsip yang diselamatkan						46.150.000				
			1	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	Jumlah Unit Kearsipan	Jumlah Unit Kearsipan	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah	3 Unit	108.992.000	155.142.000	46.150.000		3 Unit	115.000.000	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah

Tabel 3.6
Peningkatan Infrastruktur Sanitasi Kota untuk Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan,	Indikator Kinerja Program/ kegiatan		Rencana Tahun 2016					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017		SKPD Penanggung Jawab
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3		4	5	6			7	8	9	10
		sebelum	sesudah	sesudah	sesudah	sebelum	sesudah	selisih (+/-)				
1	URUSAN WAJIB											
1 3	Pekerjaan Umum							5.815.898.810				
1 3 1 0 3 0 1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rasio Panjang jalan dalam kondisi baik						3.165.600.000				
	3 Kegiatan Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	Jumlah Jembatan yang dibangun	Kota Madiun	3 buah	1.536.900.000	2.179.500.000	642.600.000	1. Pembangunan jembatan Sri Rejeki, 2. Pembangunan Jembatan Jalan Pilang Karsa, 3. Pembangunan Jembatan Jalan Sri Gunting	3 buah	1.864.965.000	Dinas Pekerjaan Umum
	3 1 Kegiatan Pembangunan Jalan...	Jumlah Ruas Jalan yang dibangun	Jumlah Ruas Jalan yang dibangun	Kota Madiun	17 Ruas	1.169.000.000	3.692.000.000	2.523.000.000	-	1 Ruas	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
1 3 1 0 3 0 1	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Baik						313.998.000				
	2 Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Bangunan Pelengkap Jalan di Kecamatan	Jumlah Jalan yang dipelihara	Jumlah Jalan yang dipelihara	Kota Madiun	3 paket	720.000.000	1.033.998.000	313.998.000		3	800.000.000	Dinas Pekerjaan Umum

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	jumlah lokasi makam	jumlah lokasi makam	Kota Madiun	11 lokasi	3.585.215.000	3.832.983.600	247.768.600	1. Makam Precet, 2. Makam Reksogati Sogaten, 3. Makam Sobrah Moyo, Nambangan Lor, 4. Makam Bulusari, Pandean, 5. Makam Tilamsari, Josenan, 6. Makam Sedor, 7. Pagar Makam Taman sisi belakang, 8. Makam Kuncen, 9. Makam Jl. Diponegoro	3 lokasi	692.000.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	4	1	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rasio rumah layak huni						1.757.700.000				
			7	Kegiatan Pembangunan Rusunawa	Jumlah Gedung	Jumlah Gedung	Kota Madiun	1 Gedung	0	1.757.700.000	1.757.700.000		1 Gedung	0	Dinas Pekerjaan Umum
1	5			Penataan Ruang							25.000.000				
1	5	1	1	Program Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya Pedoman Perencanaan Teknis Tata Ruang Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang						25.000.000				
			2	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen	Jumlah Dokumen	Bappeda Kota Madiun	1 Dokumen	150.000.000	175.000.000	25.000.000		1 Dokumen	100.000.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10
1	7			Perhubungan						330.211.000						
1	7	1 0 7 0 1	1 5	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ	Persentase Sarana Fasilitas LLAJ yang Berfungsi Baik							19.368.000				
			3	Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal Barang	Jumlah Pemeliharaan	Jumlah Pemeliharaan	Kota Madiun	1 paket	1.975.225.000	1.994.593.000	19.368.000	-	1	239.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
1	7	1 0 7 0 1	1 6	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	IKM							162.073.000				
			1	Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya	Operasional Dishub kominfo	Operasional Dishub kominfo	Kota Madiun	15 kegiatan	400.000.000	492.380.000	92.380.000	-	15 kegiatan	400.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			1 0	Kegiatan Peningkatan Pelayanan Perijinan Angkutan	Pelaksanaan Pelayanan Perijinan angkutan barang di luar terminal barang	Pelaksanaan Pelayanan Perijinan angkutan barang di luar terminal barang	Kota Madiun	1 kegiatan	48.000.000	117.693.000	69.693.000	-	1 kegiatan	50.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
1	7	1 0 7 0 1	1 7	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Cakupan Tingkat Keselamatan							148.770.000				
			2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah Marka Jalan	Jumlah Marka Jalan	Kota Madiun	1332 m2	200.000.000	308.470.000	108.470.000	-	1332 m2	200.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
			5	Kegiatan Pengadaan Cermin Tikungan	Jumlah Cermin Tikungan	Jumlah Cermin Tikungan	Kota Madiun	10 Unit	45.000.000	85.300.000	40.300.000	-	10 Unit	50.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	
1	8			Lingkungan Hidup								618.736.800				

1				2		3		4	5	6			7	8	9	10	
1	8	1	1	0	5	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase Sarana dan Prasarana Persampahan di Kota Madiun	Volume Sampah yang Tertangani					154.800.000				
				1	5	Kegiatan Peningkatan Fasilitas TPA Winongo	jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo	jumlah lokasi pemeliharaan dan penambahan fasilitas TPA Winongo	Kota Madiun	1 lokasi	821.877.000	976.677.000	154.800.000		1 lokasi	821.877.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	8	1	1	0	7	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Ruang terbuka Hijau Kondisi Baik						445.526.800				
				3		Kegiatan Pemasangan Jaringan dan Meterisasi PJU	pemasangan lampu jaringan dan meterisasi PJU	pemasangan lampu jaringan dan meterisasi PJU	Kota Madiun	245 Titik	808.877.000	996.847.000	187.970.000		200 Titik	808.877.000	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
				1	0	Kegiatan Peningkatan Fasilitas Taman Kota	Jumlah lokasi	Jumlah lokasi	Kota Madiun	6 lokasi	1.835.310.000	2.092.866.800	257.556.800		6 lokasi	2.092.866.800	Dinas Kebersihan dan Pertamanan
1	8	1	1	0	8	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Prosentase Masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan						18.410.000				

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Kegiatan Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan (ADIWIYATA)	Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat provinsi dan tingkat nasional	Jumlah sekolah yang mendapatkan penghargaan adiwiyata tingkat provinsi dan tingkat nasional	Seluruh sekolah yang ada di Kota Madiun	1 paket	379.675.000	398.085.000	18.410.000		1 paket	400.000.000	Kantor Lingkungan Hidup
1	2	5		Komunikasi dan Informatika					1.007.434.000						
1	2	1	1	Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa	Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi	Jumlah Media Elektronik milik Pemerintah Kota					502.950.000				
				2	Kegiatan Jumpa Pers (Press Conference) secara periodik	Jumlah Kegiatan jumpa pers (Secara Periodik)	Jumlah Kegiatan jumpa pers dengan pemerintah	12 kali	400.000.000	480.000.000	80.000.000		75%	216.000.000	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
				6	Kegiatan Pengelolaan Operasional Radio Suara Madiun	Waktu Pelaksanaan Pengelolaan	Waktu Pelaksanaan Pengelolaan	12 bulan	200.000.000	227.450.000	27.450.000	-	1 Tahun	200.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
				7	Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Penyiaran Radio	Jumlah Alat - Alat Penyiaran Radio	Jumlah Alat - Alat Penyiaran Radio	1 set	100.000.000	495.500.000	395.500.000	-	1 set	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1	2	1	1	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	Prosentase Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah yang disampaikan melalui Media						500.000.000				

1				2	3		4	5	6			7	8	9	10
			1	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	Jumlah dokumentasi dan informasi berbagai kebijakan pemerintah	Jumlah dokumentasi dan informasi berbagai kebijakan pemerintah	Kota Madiun	468 kali	1.800.000.000	2.300.000.000	500.000.000		75%	1.730.000.000	Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah
1	2	1	1	Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi	Jumlah Menara Komunikasi						4.484.000				
			2	Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Jumlah Data	Jumlah Data	Kota Madiun	12 kali	100.000.000	104.484.000	4.484.000	-	12 kali	100.000.000	Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah digunakan untuk acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan dan dasar-dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah berperan menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rencana kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian daerah secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja-SKPD). Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Madiun Tahun 2016 ini disusun mengacu kepada:

1. Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Madiun Tahun 2005-2025 dan Substansi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Madiun Tahun 2014-2019;
2. Substansi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 mengacu pada APBN-P Tahun 2016 dan Substansi Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2016.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Madiun Tahun 2016 yang akan melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Madiun Tahun Anggaran 2016.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. BAMBANG IRIANTO, SH, MM.